



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI
DENGAN MENTERI PERDAGANGAN RI DAN BKPM**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : III
- Rapat Ke- : ---
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Rabu, 3 Februari 2021
- Waktu : 13.21 s.d. 17.35 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI,
Gedung Nusantara I Lt.1,
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
- Acara : Penjelasan Pemerintah terhadap Rencana Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesepuluh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa (*Protocol to Implement the Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services*)
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
46 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
11 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima.
 2. Adisatrya Surya Sulisto
 3. Muhammad Prakosa
 4. Darmadi Duriyanto
 5. Rieke Diah Pitaloka
 6. ST. Ananta Wahana, S.H.
 7. Sonny T. Danaparamita
 8. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 9. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.

10. Sondang Tiar Debora
Tampubolon
11. dr. H. Mufti A. N. Anam.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
7 dari 8 orang Anggota
 1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
 2. Ir. H.M. Idris Laena, M.H.
 3. Drs. Mukhtarudin
 4. Lamhot Sinaga
 5. H. Singgih Januratmoko, S.K.H.,M.M.
 6. Doni Akbar, S.E.
 7. Nusron Wahid
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
5 dari 7 orang Anggota
 1. Mohamad Hekal, M.B.A.
 2. Andre Rosiade
 3. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H.,M.H.
 4. Khilmi
 5. Hendrik Lewerissa, S.H.,LL.M
4. FRAKSI PARTAI NASDEM
(F-NASDEM)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Martin Manurung, S.E.,M.A.
 2. Nyat Kadir (Matriks)
 3. H. Subardi, S.H., M.H
 4. Zuristy Firmadata, S.E., M.M
 5. Muhammad Rapsel Ali
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
6 dari 6 orang Anggota
 1. Faisol Riza, S.S.
 2. Ir. H. M. Nasim Khan
 3. Tommy Kurniawan
 4. Marwan Ja'far
 5. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos.,
M.Si.
 6. Siti Mukaromah, S.Ag.,M.A.P
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muhammad Dhevy Bijak
3. Hj. Melani Leimena Suharli
4. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)

2 dari 4 orang Anggota

1. Hj. Nevi Zuairina
2. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)

4 dari 5 orang Anggota

1. Abdul Hakim Bafagih
2. Primus Yustisio, S.E.
3. Daeng Muhammad, S.E.,M.Si.
4. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.
2. Elly Rachmat Yasin

B. LEMBAGA NEGARA.

C. PEMERINTAH.

D. UNDANGAN YANG LAIN.

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):

(suara tidak terdengar) Pimpinan DPR, maka rapat dapat dilaksanakan secara tatap muka atau secara virtual. Liputan pelaksanaan Rapat Komisi VI DPR RI dilakukan *live streaming* oleh TV Parlemen, media cetak maupun media lainnya mendapatkan sumber dari TV Parlemen.

Berdasarkan Pasal 249 Ayat (1) DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, menyebutkan bahwa untuk kepentingan administrasi setiap Anggota menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat. Dikarenakan kondisi tidak kondusif, maka daftar hadir juga dapat dilakukan secara elektronik melalui *list* partisipasi dalam aplikasi zoom.

Rapat dihadiri paling banyak 20% dari Anggota jumlah komisi serta mitra kerja dengan komposisi sebagai berikut. Pendamping mitra kerja berjumlah maksimal 5 orang dan ditempatkan di balkon ruang komisi. Pendamping dari

mitra kerja yang tidak berhubungan langsung dengan rapat dan tidak tertampung dapat meninggalkan gedung DPR RI.

Pendamping dari mitra kerja yang tidak tertampung di ruang rapat maupun di balkon dapat mengikuti rapat secara virtual, pendamping dari Anggota, tenaga ahli atau staf administrasi Anggota untuk tidak mendampingi Anggotanya ke komisi.

Selanjutnya berdasarkan surat dari Ketua DPR Nomor: PW-10736/DPR-RI/9/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Pembatasan Kehadiran Fisik pada rapat-rapat kami meminta kesepakatan tata cara rapat yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Kegiatan rapat-rapat di komisi dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat;
2. Lamanya pelaksanaan rapat dapat disepakati pada saat pembukaan rapat agar lebih efisien maksimal *dua setengah jam*;
3. Alur rapat sebagai berikut:
 1. Pembukaan;
 2. Presentasi singkat oleh kementerian/lembaga;
 3. Pertanyaan Anggota;
 4. Tanggapan kementerian/lembaga;
 5. Tanggapan balik Anggota;
 6. Tanggapan akhir kementerian/lembaga;
 7. Kesimpulan; dan
 8. Penutup.
4. Presentasi awal diberikan waktu 5 menit, tanggapan 10 menit, dan tanggapan akhir 10 menit;
5. Anggota diberikan waktu menyampaikan pertanyaan selama 3 menit dan tanggapan balik selama 3 menit;
6. Lalu lintas rapat diatur oleh administrasi yang membantu Pimpinan Rapat terutama dalam menghidupkan dan mematikan *microphone* masing-masing peserta.

Bapak, Ibu dan hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI, Rapat Kerja hari ini dihadiri dan ditandatangani oleh 24 orang Anggota, izin 1 dari 9 Fraksi sehingga kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 Ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka rapat kami buka dan rapat kami nyatakan terbuka untuk umum. Setuju?

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.21 WIB)

Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM atas kesediaan waktunya untuk menghadiri Rapat Kerja pada hari ini guna membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020, dan rencana pelaksanaan kegiatan anggaran tahun Anggaran 2021.

Untuk itu waktu dan saya minta persetujuan dulu untuk kita tutup rapatnya, karena hari ini ada dua rapat kita berharap sebelum maghrib dua-

duanya udah bisa selesai. Mungkin rapat yang pertama kita sepakati tutup jam 3 ya, dapat disetujui ya.

(RAPAT: SETUJU)

Nah itu 2 (dua) agenda Pak, dua agenda, betul-betul. Baik, Bapak Ibu yang agenda pertama ini kita mengenai evaluasi anggaran. Nah ini kami persilakan Menteri Perdagangan dan BKPM untuk menyampaikan perihal:

1. Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2021; dan
2. Pelaksanaan program investasi di masa pandemi.

Kami persilakan Menteri Perdagangan untuk sekalian memperkenalkan diri di forum ini. Silakan.

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak-bapak Pimpinan Komisi VI DPR RI.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Yang saya hormati Bapak Kepala BKPM beserta seluruh jajarannya.

Kami didampingi oleh Bapak Eselon I dari Kementerian Perdagangan.

Bapak Ketua Rapat yang saya hormati,

Perkenalkan saya Muhammad Lutfi mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Menteri Perdagangan pada tanggal 23 Desember yang lalu dan ini bukan kali pertama di Komisi VI sebenarnya ini adalah kali ke-3 di Komisi VI jadi banyak pengalaman dan sukacita daripada pengurusan di masa-masa yang lalu dan mudah-mudahan kita bisa bekerjasama kembali di tahun-tahun depan.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Berarti *nggak* ada dukanya dong, sukacita saya dengar tadi bukan suka dukanya. *Nggak* ada dukanya rupanya.

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Ini memang dipilih, tetapi karena memang tajam sekali penglihatannya Pak Ketua Umum Bali ini. Jadi saya minta maaf suka dukanya di Komisi VI ini karena tidak kurang daripada 2 undang-undang dan banyak keputusan-keputusan penting dilaksanakan di ruangan ini.

Terima kasih Bapak dan Ibu, karena ini masalahnya detail izinkan saya untuk membacakan laporan sesuai yang sudah disiapkan.

Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Suatu kehormatan bagi kami dapat bertatap muka kembali dengan seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

Perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami atas undangan dari Komisi VI DPR RI untuk melakukan Rapat Kerja pada hari ini dengan agenda pembahasan kegiatan realisasi Tahun Anggaran 2020 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021.

Bapak Ibu Pimpinan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Pada tahun 2020 Kementerian Perdagangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.747.064.284.000,- termasuk anggaran untuk cadangan stabilisasi harga pangan atau CSHP khususnya untuk stabilisasi harga komoditi gula sebesar Rp1.123.777.151.000,-.

Dari total anggaran tersebut sebesar Rp3.078.191.063.000,- atau 89,3% dikelola oleh Satker yang ada di pusat, untuk pencapaian target kinerja sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2020, dan sebesar Rp398.873.221.000 atau 11,57% dilaksanakan oleh Satker di daerah melalui dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan.

Realisasi Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp3.244.519.263.966,- atau setara dengan 93,31% dari total alokasi anggaran. Realisasi anggaran pada Tahun 2020, lebih baik dibandingkan dengan realisasi anggaran Kemendag selama 4 tahun terakhir yang rata-rata hanya 89,09%, dari total Pagu alokasi.

Tentunya harapan kami bahwa ke depan capaian ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia dan memperbaiki berbagai kendala teknis maupun administrasi yang masih dijumpai dalam pelaksanaannya.

Terdapat beberapa hal yang dapat kami sampaikan, terkait capaian kinerja utama, sasaran strategis, sesuai dengan rencana anggaran dan Tahun Anggaran 2020 antara lain:

1. Sasaran strategis ialah meningkatkan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa.
Dari kalau kita melihat dari kinerjanya total neraca perdagangan dari target 1,6 miliar pada tahun 2020 terealisasi USD 21,7 miliar meskipun kami secara pribadi melihat bahwa ini ada dampak-dampak yang di luar daripada nilai dan angka tersebut.
Pertumbuhan ekspor nonmigas yang prediksi kontraksi 3,5% ternyata realisasinya hanya 0,6%. Untuk perjanjian-perjanjian perdagangan bebas PTA, AFTA, CEPA yang disepakati dari 14 kesepakatan kita berhasil menyelesaikan 15 kesepakatan;
2. Untuk mewujudkan stabilitas harga dan ketersediaan harga pasokan bahan pangan. Inflasi pangan yang bergejolak dari target antara 3,2% lebih kurang 1% teralisasi 3,62%; dan
3. Mengoptimalkan peranan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Pertumbuhan nilai transaksi

perdagangan berjangka komoditi targetnya pada tahun 2020 adalah 5% realisasinya adalah 7,74%.

Bapak-bapak Ibu Pimpinan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Perlu kami sampaikan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo telah memberikan mandat kepada kami di Kementerian Perdagangan yaitu:

1. Menjaga stabilitas harga terutama inflasi;
2. Untuk membantu pelaku UKM, perdagangan agar dapat masuk ke dalam pasar ekspor, termasuk memperbaiki struktur kerja dengan Balai Latihan Ekspor; dan
3. Bagaimana agar Indonesia bisa menembus pasar non tradisional dengan melakukan seperti *partnership agreement* atau perjanjian kerjasama dan kemitraan.

Dalam melaksanakan mandat tersebut Kementerian Perdagangan telah menyusun sasaran strategis tahun 2021, yang sejalan dengan rencana kerja Pemerintah tahun 2021 dan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2021.

Beberapa sasaran strategis Kementerian Perdagangan tahun 2021 telah kami sampaikan pada label sebagai berikut. Sasaran strategis yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa.

Jadi neraca perdagangan diharapkan akan tumbuh, neraca perdagangan akan mendapatkan *balance* USD1 miliar. Pertumbuhan ekspor nonmigas kami targetkan 6,3%. PTA, AFTA, CEPA yang akan disepakati adalah 25 kesepakatan kumulatif. Dan yang kedua mewujudkan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan.

Inflasi pangan yang bergejolak kami prediksi atau kami targetkan 3,2% dengan lebih kurang 1%. Dan yang ketiga mengoptimalkan peranan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi kami targetkan 8%.

Dan yang terakhir meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional. Opini BPK yang dihitung dengan opini BPK terhadap laporan keuangan yaitu menjadi WTP.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan sasaran strategis tersebut dan mendukung pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor perdagangan beberapa kegiatan prioritas akan dilaksanakan antara lain:

1. Pembangunan dan revitalisasi 119 unit pasar rakyat tipe C dan D, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 550 miliar;
2. Membangun pusat jajanan kuliner dan souvenir di daerah destinasi wisata prioritas dengan dukungan anggaran sebesar Rp 49,8 miliar;
3. Peningkatan pengawasan perdagangan dan edukasi konsumen dengan dukungan anggaran Rp112 miliar;
4. Optimalisasi pemanfaatan SRG, dengan dukungan dana sebesar Rp 20 miliar;

5. Pembinaan dan pelaku usaha perdagangan dalam negeri dan stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting dengan dukungan anggaran Rp 255 miliar;
6. Melaksanakan Expo 2020 Dubai dengan dukungan anggaran sebesar Rp 235 miliar;
7. Pelaksanaan misi dagang, pameran dan promosi luar negeri dengan dukungan anggaran sebesar Rp137 miliar;
8. Perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional dengan dukungan anggaran sebesar Rp 90 miliar;
9. Fasilitas pelayanan perizinan dan fasilitas ekspor impor dengan dukungan anggaran sebesar Rp 90 miliar;
10. Pengembangan sarana dan prasarana Kementerian Perdagangan dengan dukungan anggaran Rp103 miliar; dan yang terakhir
11. Pengembangan SDM perdagangan dengan dukungan anggaran Rp 47 miliar.

Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa daerah penerima tugas pembantuan telah ditetapkan pada tahun pada awal tahun 2021. Hal ini dilakukan agar kinerja pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat dapat semakin optimal serta dapat segera memulihkan perekonomian daerah di masa pandemi ini.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perdagangan tahun 2021, Kementerian Perdagangan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3.028.964.712.000,- sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor: S-903/MK/02/2020 tanggal 2 Oktober 2020. Namun pada tanggal 12 Januari 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan surat Nomor S-30/MK/02/2021 perihal *refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2021, di mana Kementerian Perdagangan diminta untuk melakukan penghematan atau *refocusing* anggaran sebesar Rp 91.577.966.000,-.

Sehingga alokasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2021 menjadi sebesar Rp2.937.386.806.000,-. Alokasi anggaran tersebut, alokasi anggaran sebelum dan sesudah dilakukan *refocusing* dan realokasi sebagaimana pada tabel berikut. Jadi Bapak dan Ibu untuk:

- Sekretariat Jenderal terjadi *refocusing* sebesar Rp10.077.906.000,-;
- Ditjen Perdagangan Dalam Negeri menjadi *refocusing* dan realokasi sebesar Rp 35.000.000.000,-;
- Ditjen Perdagangan Luar Negeri *refocusing* Rp 9.000.000.000,-;
- Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional sebesar Rp 7.500.000.000,-;
- Inspektorat Jenderal *refocusing* Rp 3.500.000.000,-;
- Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Rp 8.500.000.000,-;
- BAPPEBTI Rp 5.000.000.000,-;
- BPPT Rp 3.000.000.000,-; dan
- Ditjen PKTN sebesar Rp 10.000.000.000,-

Dengan begitu total dari pada *refocusing* adalah Rp 91.577.906.000,-. Alokasi anggaran ini tentunya akan kami optimalkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perdagangan sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat,

Demikian penyampaian kami secara singkat mengenai kegiatan dan realisasi tahun anggaran 2020 serta rencana kegiatan dan anggaran tahun 2021.

Melalui kesempatan yang baik ini kami mohon dukungan dari Anggota dan Pimpinan Komisi VI DPR RI terhadap rencana kerja Kementerian Perdagangan tahun 2021. Akhir kata sekali lagi kami haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, terima kasih.

Kita lanjutkan kepada Kepala BKPM untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan.

KEPALA BKPM:

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera.

Shalom.

Om Swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI Komisi VI.

Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan yang juga adalah Kepala BKPM senior.

Izin Pimpinan, saya harus menyampaikan bahwa hari ini saya berbahagia karena sejak rapat kerja bersama dengan Mendag dalam forum ini belum pernah Mendag itu Wamennya hadir. Tapi hari ini lengkap, ini menuju perubahan baru untuk Kementerian Perdagangan kelihatannya sudah paten ini Pimpinan, Pak Andre.

Pimpinan yang saya hormati,

Saya juga membawa seluruh Eselon I. Yang saya hormati Eselon I dari Perdagangan dan BKPM dan yang paling khusus adalah setengah penguasa sedikit Pak staf khusus Pak Eka Sastra mana Pak Eka Sastra yang ketua kelas BKPM Pak yang sering membantu saya dalam menyiapkan materi tapi materinya hari ini kurang lengkap kelihatannya.

Pimpinan yang saya hormati,

Saya tidak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh Pimpinan oleh Pak Mendag terkait dengan Nomor Surat Menkeu, tapi saya hanya menyampaikan bahwa realisasi anggaran pada periode 2020 BKPM sebesar 97%. Artinya bahwa BKPM urusan bagaimana menghabiskan duit tidak perlu diragukan karena hampir 100%.

Pimpinan yang saya hormati,

Inilah repotnya kalau kita rapat sama Kepala BKPM senior ini. Saya ingin menyampaikan Pimpinan bahwa sejak kami dilantik sebagai Kepala BKPM dalam proses penggunaan anggaran kami fokuskan pada KPI yang telah diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami. KPI kami itu Pimpinan ada 6, saya tidak akan berbicara tentang realisasi anggaran kami karena pasti sudah ada di dokumen yang kami sudah serahkan.

Yang pertama bahwa ada 6 poin:

1. Perbaikan peringkat kemudahan berusaha;
2. Eksekusi realisasi investasi mangkrak;
3. Mendorong investasi besar bermitra dengan UMKM;
4. Penyebaran investasi yang berkualitas;
5. Promosi; dan
6. Mendorong PMDN.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Bapak Ibu semua.

Di 2020 kita tahu semua pandemi Covid. Target realisasi investasi pada 2020 awalnya sebesar Rp 886 triliun. Namun pandemi Covid kita melakukan revisi, revisinya menjadi Rp 817 triliun.

Alhamdulillah dalam proses 1 tahun berjalan realisasi investasi kita mencapai Rp 826,3 triliun atau kenaikannya *satu koma* 101,1%. Dalam konteks itu dikaitkan dengan KPI Pimpinan kami harus mengatakan sejujurnya bahwa dalam 5 tahun terakhir baru kali ini investasi antara Jawa dan luar Jawa itu mulai berimbang di mana realisasi investasi di luar Pulau Jawa lebih besar daripada Jawa.

Yang kedua kita tahu semua di pandemi Covid di hampir semua negara, investasi FDI-nya itu menurun tapi di Indonesia turunnya tidak lebih dari 10% dan ini juga menunjukkan bahwa di era pandemi Covid PMDN kita lebih besar dan sangat luar biasa sekali dalam memberikan kontribusi dari sisi investasinya dibandingkan dengan PMA.

Pimpinan, dalam waktu 2020 dari total investasi Rp 826,3 triliun tersebut akumulasi dari 153.349 *project* dengan penyerapan kerja langsung sebesar 1.156.361 ini adalah peta realisasi kalau dikaitkan dengan KPI kami Pimpinan. Investasi berkualitas itu salah satu di antaranya adalah antara Jawa dan luar Jawa berimbang, kemudian antara PMA dan PMDN pun *Alhamdulillah* udah mulai bagus Pimpinan. Data ini bisa diverifikasi, bisa kita uji, dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan karena kalau KPI Mendag Pak Pimpinan bisa dibuat narasi kalau KPI BKPM harus dengan angka, jadi kalau angka ini *nggak* bisa kita buat-buat memang.

Pimpinan yang kami hormati,

Adapun negara-negara yang masuk yang paling besar itulah Singapura Pimpinan kita tahu Singapura USD 9,8 *billion*. Tiongkok 4,8. Hongkong 3,5. Jepang 2,6 ini Jepang sudah menurun Pimpinan sudah menjadi nomor 4 awalnya nomor 2 ini karena Dubes Jepangnya udah jadi Mendag jadi *nggak* terus lagi di sana mungkin, jadi agak menurun Pimpinan. Korea Selatan 1,8. Yang menarik itu adalah Belanda, Belanda sekarang masuk nomor 6.

Kami sempat berpikir kenapa kemudian Belanda bisa masuk nomor 6, ternyata begitu Inggris keluar dari Uni Eropa Brexit itu Belanda sekarang dijadikan sebagai *hub*.

Jadi banyak kantor-kantor perwakilan mereka dibangun di Belanda dan In Sya Allah di tahun ini kita berencana untuk membuka kantor perwakilan di Belanda dan karena itu kami sangat mengharapkan bantuan dari Bapak-bapak yang terhormat Bapak-bapak Anggota DPR dan Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama melihat ke sana dalam rangka bagaimana melakukan penetrasi pasar Eropa secara baik dalam kerangka kepentingan ekonomi nasional.

KETUA RAPAT:

Kepala, Kepala. Itu sebelumnya memang di nomor berapa itu Belanda?

KEPALA BKPM:

Sebelumnya tidak masuk nomor 10 besar.

KETUA RAPAT:

Oh, jadi memang harus ditinjau itu ya.

KEPALA BKPM:

Memang kita harus tinjau di sana karena saya melihat ada beberapa keunikan karena memang masyarakat budayanya memang agak sedikit

familiar dengan Indonesia karena itu perlu kita lakukan penetrasi ke sana Pimpinan.

Pimpinan, dalam rangka mempercepat forum rapat ini sengaja saya menyampaikan bahwa penting untuk melakukan peninjauan itu. Pimpinan ada satu hal dari data kami bahwa investasi ini di industri pembangunan industri mesin itu nomor 3 Pimpinan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan industri kita sudah mulai bagus. Jadi investasi tidak lagi pada sektor-sektor jasa saja, tidak hanya di sektor gudang atau di infrastruktur, tapi barang di sini sudah mulai bagus. Ini menunjukkan bahwa pembangunan industri dalam rangka menuju ke transformasi ekonomi *alhamdulillah* sudah mulai ada secercah harapan.

Pimpinan yang kami hormati,

Kami satu data lagi yang perlu kami sampaikan kepada Pimpinan bahwa tujuan PMA itu ada dua Provinsi yang tertinggal selama ini tapi sekarang menjadi tujuan PMA yaitu Maluku Utara dan Sulawesi dan kami punya keyakinan bahwa ke depan tujuan para investor yang akan membangun industri khususnya pertambangan itu akan di luar Pulau Jawa.

Pimpinan yang kami hormati,

Kami juga melaporkan di awal tahun bahwa investasi mangkrak kami kurang lebih sekitar Rp708 triliun, dalam proses selanjutnya kami sudah mampu menyelesaikan kurang lebih sekitar Rp 474,9 triliun atau 67,1%.

Investasi mangkrak ini yang dulu pernah kami laporkan kepada Pimpinan bahwa ini terjadi akibat karena ego sektoral antara kementerian/lembaga, aturan tumpang tindih antara kabupaten, kota, provinsi dan pusat, serta ada memang pola-pola lama yang terjadi di lapangan urusan tanah, urusan lain-lain Pimpinan, dan saya pikir tidak perlu saya mengulas karena para Pimpinan dan Bapak Ibu semua sudah tahu, tapi *alhamdulillah* dengan kerja tim BKPM yang luar biasa kita bisa menyelesaikan sebesar Rp 474,9 triliun.

Inilah jawaban kenapa *Foreign Direct Investment* kita hanya turun tidak lebih dari 10% ini jawabannya, karena kita punya cadangan ini Pimpinan. Jadi pada saat era pandemi kami seperti main bola seperti Juventus, bertahan menyelesaikan urusan di dalam dan kalau ada peluang kita menyerang sekali-sekali Pimpinan. Pimpinan memang kalau Persibura selalu mengalahkan Persija, jadi kalau Pak Lutfi memang Persija saya Persibura soalnya Pimpinan.

Pimpinan yang kami hormati,

Dalam konsep pengembangan investasi sudah barang tentu Pemerintah harus memberikan beberapa skala prioritas, terlepas dari persoalan Inpres Nomor 7 di mana seluruh kementerian/lembaga sudah mendelegasikan kewenangan perizinan termasuk insentif fiskal kepada BKPM. Oleh karena itu, kita merumuskan sektor apa aja sih yang menjadi prioritas untuk kita.

Yang pertama, adalah industri kesehatan Pimpinan. Kita akan memfasilitasi industri kesehatan ini secara baik, sebab apa? Di era pandemi inilah kemudian tabir terbuka, bahwa alat kesehatan, obat-obat 90% itu impor Pimpinan dan sengaja memang ini dimainkan dari awal. Saya sedikit tahu cerita ini Pimpinan, biarlah di belakang layar kita akan ceritakan. Karena itu kami atas arahan Bapak Presiden dan Pak Menko untuk merumuskan langkah-langkah strategis terukur agar bagaimana bisa mendatangkan investasi untuk di sektor kesehatan, izinnya kita urus sendiri, insentifnya kita kasih agar kita tidak impor-impor terlalu banyak lagi untuk menghemat devisa kita.

Yang berikut adalah industri otomotif Pimpinan, ini kita sudah fokus kepada mobil listrik. Kemarin kami sedikit menyampaikan Pimpinan bahwa urusan pembangunan pengelolaan nikel dari mobil baterai dan untuk mobil baterai, dari hulu ke hilir kemarin CATL sudah, kemudian LG, sekarang tinggal BASF sama Tesla yang akan masuk. Sektor pertambangan, energi baru terbarukan, infrastruktur.

Pimpinan, yang terakhir saya mau melaporkan menyangkut dengan relokasi investasi mangkrak.

Di 2018-2019 ketika terjadi perang dagang antara Cina dan Amerika konon katanya nggak ada satupun perusahaan yang melakukan relokasi dari Cina ke Indonesia, atas dasar spirit itu tim BKPM membentuk Satgas Investasi. *Alhamdulillah* hasilnya dalam waktu 2020 kita berhasil mendatangkan 16 perusahaan yang relokasi dari Cina ke Indonesia, dan perusahaan ini bukan perusahaan yang baru nanti akan tetapi 16 perusahaan ini sudah melakukan *groundbreaking* hampir semuanya Pimpinan dan sekarang ada satu perusahaan di Subang ya yang sudah memproduksi Pimpinan dan ini kita lakukan di saat relokasi pandemi.

Kemudian ada 14 perusahaan yang sudah negosiasinya sudah 70 sampai 80% kemudian sisanya 122 itulah yang berpotensi.

Saya pikir itu Pimpinan beberapa EoDB Pimpinan kita belum diumumkan di tahun 2000 harusnya sudah di bulan November itu sudah diumumkan, tapi karena ada satu dan lain hal sehingga World Bank belum bisa mengumumkan. Tapi kalau itu kalau Pimpinan mau tanya apa masalahnya mumpung Pak Mendag ini masih Dubes Amerika jadi bisa juga kita tanyakan Pimpinan dalam rangka transparansi informasi karena sebenarnya beliau ini ada satu tugas harus EoDB ini selesai, tapi karena garis tangannya bagus dilantik lagi barang ini jadi Presiden, jadi Menteri Pimpinan.

Pimpinan yang kami hormati,

Terakhir menyangkut dengan kerjasama antara UMKM dan pengusaha besar. Kemarin kami sudah melakukan kolaborasi 54 perusahaan besar, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan 198 UMKM dengan nilai proyek kerjasama 1,5 triliun.

Ini bukan dana APBN Pimpinan, karena di dalam DIPA BKPM nggak punya, tetapi perintah Bapak Presiden sekarang adalah setiap investasi yang

masuk baik dari dalam maupun luar daerah wajib hukumnya untuk bergandeng dengan pengusaha nasional yang di daerah dan UMKM.

Jadi Pimpinan mohon maaf kalau ada pengusaha yang datang mengadu kepada Pimpinan kalau pada saat mereka mengurus izin kemudian kita minta mereka harus kolaborasi dengan pengusaha daerah itu adalah merupakan tuntutan dari KPI BKPM dan sekaligus perintah daripada Undang-undang Cipta Kerja Pasal 90.

Ini akan menjadi suatu perhatian kita semua, sebab apa? kita tidak ingin lagi ada investasi yang masuk ke daerah orang daerah menjadi penonton atau orang daerah itu hanya tunggu dapat mohon maaf sekali musibahnya saja. Sudah harus saatnya negara berpikir untuk menjalankan undang-undang secara konsisten dalam rangka membangun kebersamaan untuk membangun ekonomi dari daerah sampai dengan pusat. Itu menyangkut dengan program 2020 Pimpinan.

Terakhir Kawasan Batang nanti kita sudah bangun Pimpinan nanti itu LG akan masuk sudah ada sekitar dari 4300 hektar Kawasan Industri Batang itu Pimpinan izinnya semua diurus oleh BKPM.

Jadi kalau ada Bapak-bapak Ibu Pimpinan yang punya mitra pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri yang membutuhkan Kawasan Industri izinnya nanti BKPM yang urus, mereka cukup datang bawa teknologi, bawa modal, tanah dan izinnya BKPM yang urus. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa ini hanya untuk asing, tidak, dalam negeri juga kita memberikan proporsinya sama, termasuk UMKM.

Pimpinan yang kami hormati,

Di dalam anggaran 2021, Surat Menteri Keuangan nomor yang sudah dibacakan oleh Menteri Perdagangan tadi karena nomornya sama kami mendapat alokasi 1 miliar, eh 1 triliun 89 miliar Bapak Pimpinan. Ini kita cuma baca angka aja sudah lama *nggak* pegang barangnya soalnya, iya benar benar memang kalau BKPM itu *nggak* penting terlalu triliun yang penting eksekusinya ratusan triliun itu yang paling penting.

Pimpinan dari *Satu Triliun Delapan Puluh Sembilan Lima Ratus Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu* tersebut berdasarkan surat Menteri Keuangan. Kita juga melakukan revisi pemotongan kurang lebih sekitar *158 miliar 574 Ribu 7 Ratus* waduh Rp 128.574.714.000,-.

Memang kalau nomornya ribu-ribu ini biasanya *nggak* terbiasa lidah kita Pak biasanya biasanya ngomongnya miliar, begitu juta agak melelet kita. Kita dipotong Pimpinan, kita punya pemotongan lebih besar dari pada pemotongan Mendag, nah ini kelebihanannya Pak Mendag lobynya lebih bagus. Kalau dulu kita agak sedikit lincah, kalau Mendag yang ini susah kita kalah terus kita ditikung terus Pimpinan.

Penjabarannya adalah universitasnya sama cuma seniornya dia Pimpinan. Pembagiannya adalah di Sekretaris Utama 303 miliar 723, oh salah, oh halaman salah. Saya pikir Pimpinan daripada saya baca salah halamannya sudah pas di situ Pimpinan.

Nanti kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, mohon maaf Pimpinan ini cuaca lagi nggak bagus. Yang terpenting adalah target kita realisasi investasi ke depan Pimpinan insya Allah mencapai kalau di target Bappenas, coba buka di angka master apa nih kita punya di perencanaan di Bappenas RPJM itu di tahun 2021 kita Rp 856.000.000.000.000,- Pimpinan tetapi perintah Bapak Presiden kita harus mencapai Rp 900.000.000.000.000,.

Ini memang BKPM suka dikasih tambah-tambahan tugas Pimpinan dalam konteks realisasi, tapi Insyaa Allah kita akan berusaha karena itu mohon dukungan daripada Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Demikian Pimpinan karena waktu kita cuma 1,5 jam. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom.

Om santi santi santi om.

Namo buddhaya dan Salam kebajikan.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Ketua.

Ini kelihatannya ini harus disebutin ini Ketua karena kita lagi rapat anggaran ini masalah persetujuan kita. Yang paling penting bukan capaiannya sebenarnya, sekarang ini adalah *refocusing* ini direkam masalahnya ini menjadi bukti ada dokumen negara. Nanti kalau nggak disebutin ini yang dari apa pemotongannya berapa terus menjadi berapa ini dokumen negara bos, jadi bukan.

KEPALA BKPM:

Pimpinan mohon maaf Pimpinan tadi kami sudah sebutin Pimpinan pemotongannya 100 miliar lebih, 150, entar saya baca ulang deh Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Begini, mungkin yang perlu dibaca.

KEPALA BKPM:

Saya ingin baca ulang Pimpinan. Pemotongan anggaran kita dari anggaran semula sebesar Rp 1.089.500.127.000,- menjadi dipotong sebesar Rp158.574.714.000,- Pimpinan.

Jadi anggaran kita menjadi Rp 930.925.413.000,- terdistribusi biar lengkap barang ini:

1. Sekretaris Utama, itu sebesar Rp 317.292.383.000,-;
2. Deputi Bidang Pengembangan Iklim sebesar Rp52.292.967.000,-;
3. Deputi Bidang Promosi sebesar Rp 265.512.000.000,-;
4. Deputi Bidang Kerja sama sebesar Rp 27.654.890.000,-;
5. Deputi Bidang Pelayanan sebesar Rp 179.963.724.000,-;
6. Deputi Pengendalian sebesar Rp 100.009.163.000,-;
7. Dekonsentrasi kita transfer ke Daerah Rp 15.000.000.000,-; serta
8. Deputi Bidang Perencanaan sebesar Rp 131.775.000.000,-.

Lengkap Pimpinan.

Demikian penambahan keterangan yang perlu kami sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Maaf. Tadi yang sebetulnya belum dibacakan adalah realisasi capaian belanja 2020 yang dari anggaran dan itu mungkin itu juga perlu dibacakan.

KEPALA BKPM:

Izin, Pimpinan.

Mohon maaf kalau tidak salah sudah kami sampaikan Pimpinan bahwa realisasinya 97% dengan angkanya 500 miliar lebih Pimpinan, dari awal pembukaan tadi baca apa ini Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih.

Kalau begitu ini sebelum kita ke sesi pendalaman mungkin karena ada Pak Menteri baru walaupun sudah berkali-kali ke Komisi VI tapi di Komisi VI ini juga kayaknya mayoritas kebanyakan anggota baru ini. Jadi mungkin kita beri kesempatan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri baru kita masuk sesi tanya jawab.

Kita mulai dari yang hadir fisik dulu dari sebelah kanan ini dari Pak Rapsel lah nanti kita mulai mundur ke belakang sebelah kiri, baru yang online.

Silakan.

F-P. NASDEM (MUHAMMAD RAPSEL ALI):

Saya Muhammad Rapsel Ali dari Fraksi Nasdem, Dapil 1 Sulawesi Selatan.

Terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Mohon izin Pimpinan.

Saya Mufti Anam dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Pasuruan, Probolinggo.

F-P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Pimpinan.

Saya Hendrik Lewerissa dari Fraksi Partai Gerindra, Dapil Maluku. Terima kasih.

F-PDIP (SONDANG TIAR TAMPUBOLON):

Izin Pimpinan.

Saya Sondang Tiar Tampubolon, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan DKI Jakarta. Salam hormat Pak Menteri.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Herman Khaeron, Fraksi Partai Demokrat, Jawa Barat VIII, Cirebon dan Indramayu.

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mukhtarudin, Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Menteri, saya Andre Rosiade Dapil Sumatera Barat I dari Fraksi Partai Gerindra.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bu Evita, perkenalkan diri Bu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Perkenalkan Pak Menteri Perdagangan, nama saya Evita Nursanty. Saya dari Dapil Jatim III Grobogan, Pati, Blora, Rembang dari Fraksi PDIP Perjuangan. Di Komisi VI ini memang baru ketemu dengan Pak Menteri. Namun, kita dulu mitra di Komisi I.

Terima kasih.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Saya Darmadi Durianto, Fraksi PDI Perjuangan, Dapil DKI III.

Terima kasih.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nama saya Daeng Muhammad dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil PKB-Purwakarta, Karawang, Bekasi.

Terima kasih.

F-PDIP (ADISATRYA SURYO SULISTO):

Saya Sulisto Fraksi PDI Perjuangan, Jateng VIII, Kabupaten Banyumas dan Cilacap.

Terima kasih.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Khilmi dari Dapil Jatim dari Fraksi Partai Gerindra.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Hj. Nevi Zuariana, Dapil Sumbar II, Fraksi PKS.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya mungkin yang online satu per satu yang ada fotonya saja yang kira-kira lagi *online* yang ada videonya.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Sonny, Sonny, Sonny. Saya Sonny Danaparamita, Fraksi PDI Perjuangan, Jawa Timur III Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso.

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Ya, terima kasih Pak Menteri.

Saya Ananta Wahana dari Fraksi PDI Perjuangan, Banten III meliputi Tangerang Raya. Terima kasih.

F-PD (EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.):

Edhie Baskoro Yudhoyono, Fraksi Partai Demokrat, Dapil Jawa Timur VII. Selamat Pak Menteri Perdagangan dan salam Kepala BKPM.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Selamat pagi Pak Menteri. Saya Deddy Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Utara. Selamat bertugas.

Terima kasih.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Assalammu'alaikum.

Saya Melani Leimena Suharli, saya di Fraksi Partai Demokrat Dapil DKI II meliputi Jakarta Pusat, Selatan, dan Luar Negeri.

Terima kasih.

F-PPP (ELLY RACHMAT YASIN):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Elly Rachmat Yasin Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dapil Jabar V Kabupaten Bogor.

Terima kasih.

F-PG (H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Singgih Januratmoko dari Jateng V.

Terima kasih Pak Menteri.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Abdul Hakim Bafagih, Jatim VIII. Terima kasih Pimpinan.

F-PG (DONI AKBAR, S.E.):

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan. Saya Doni Akbar dari Fraksi Partai Golkar, Daerah Pemilihan Jateng X Kabupaten Batang, Pekalongan, dan Pemasang.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ada lagi yang *online*?

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Saya Ketua, saya Ketua.

KETUA RAPAT:

Itu Pak Toha itu suaranya.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ya sudah saya buka Ketua. Boleh langsung Ketua?

KETUA RAPAT:

Ini perkenalan Pak, perkenalan dulu.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Oh *Astaghfirullah, Subhanallah.*

KETUA RAPAT:

Silakan loh Pak. Mau memperkenalkan diri Pak dengan Pak Mendag? Oh ini satu Partai ini sudahlah selesai.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Kita ketemu di DPP tapi saya *nggak anu nggak say hello.* Saya Mohammad Toha Pak, dari Fraksi PKB, Dapil Solo, Sukoharjo, Klaten, Boyolali.

Terima kasih Pak Lutfi. Pak Bahlil mainkan.

KETUA RAPAT:

Oke, ada lagi yang *online*?

F-PG (H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak siapa?

F-PG (H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.):

Singgih Pak. Singgih Januratomoko dari Dapil Jateng V. Selamat siang Pak Menteri, Fraksi Partai Golkar Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, cukup ya yang *online*. Yang baru hadir di ruangan, silakan Pak Nusron.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Loh Pak Nusron kapan sampai di sana, tadi di sini sama saya.

KETUA RAPAT:

Baik. Mungkin dari meja Pimpinan Pak Martin.

F-P. NASDEM (MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.):

Terima kasih Ketua Rapat. Pimpinan.

Saya Martin Manurung, Fraksi Partai Nasdem, Dapil Sumatera Utara II.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Gde Sumarjaya Linggih, Fraksi Partai Golkar, Dapil Bali.

KETUA RAPAT:

Oke dan ini ada anggota baru kita. Silakan perkenalkan diri Pak. Kita kayaknya juga belum ya? udah belum.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Belum, ini pertama kali masuk Pimpinan. Terima kasih banyak.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan saya Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, Dapil Sulsel III, Fraksi Partai Demokrat.

Terima kasih.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Nggak kedengaran suaranya Pimpinan.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Hakim ini kayaknya.

KETUA RAPAT:

Ya nanti japri saja. Baik, sudah ya semua. Saya sendiri Mohamad Hekal dari Dapil Jateng IX Tegal, Brebes, mewakili Fraksi Gerindra. Oke, kita lanjut ke, ini ini sahabat sahabat kita yang *alhamdulillah* luar biasa hadir pada hari ini.

Silakan Pak perkenalkan diri Pak.

F-P. GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS, S.H., M.H.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Supratman Pak, Partai Gerindra, Sulawesi Tengah.

Terima kasih,

Assalammu'alaikum.

KETUA RAPAT:

Beliau ini sudah lama sekali nggak kelihatan kok kayaknya agak tambah gelap ya, saya dengar banyak di Bali Pak.

Baik, kita ke sesi tanya jawab. Ini ada yang kita mulai dari Pak Herman Khaeron, mana Pak Herman ada.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI):

Demokrat solid, coba bung Hendrik minggir sedikit, nggak kelihatan Pak Menteri. Pak Pratman ke kiri, Pak Hendrik ke kanan iya.

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI.

Saudara Menteri Perdagangan.

Kepala BKPM beserta seluruh jajaran yang hadir.

Wakil Menteri Kementerian Perdagangan.

Bapak, Ibu sekalian yang hadir pada rapat hari ini,

Pertama untuk seluruh anggaran tentu saya menyetujuinya karena dalam situasi anggaran yang terjadi *refocusing* tentu harus ada hal-hal yang bisa mempertahankan target-target yang ingin tercapai kecuali BKPM karena anggarannya dua kali lipat tahun 2021. Selamat berarti pandai meyakinkan Presiden untuk anggarannya naik.

Pertama saya ingin mengomentari terhadap Kementerian Perdagangan. Saya masih ingat dulu Pak Lutfi, tentu selamat diberikan amanat oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Perdagangan karena beliau juga pernah mengemban amanah Menteri Perdagangan Februari sampai Oktober tahun 2014. Saya masih ingat dan pada waktu itu bisa mempertahankan kinerja bahkan meningkatkan kinerja di Kementerian Perdagangan, mudah-mudahan bisa diulang di era Pemerintahan Pak Jokowi.

Tentu Menteri Perdagangan semakin progresif bukan hanya progresif untuk berdagang ke luar negeri tetapi yang paling penting sebetulnya masih banyak pekerjaan rumah ke dalam negeri.

Dan kalau melihat situasi produksi dalam negeri saat ini khususnya bidang pangan semestinya memang Kementerian Perdagangan menjadi stimulus atau menjadi magnet terhadap pertumbuhan produksi pangan dalam negeri. Saya dulu Ketua Panja Undang-Undang Pangan No.18 Tahun 2012 yang 40%-nya undang-undang itu meskipun dulu saya Pimpinan di Komisi IV mendelegasikan kepada Menteri Perdagangan. Dan kalau tadi disampaikan bahwa wabil khusus Menteri Perdagangan saat ini diberikan penugasan untuk menjaga inflasi boleh untuk sektor-sektor lain, tetapi sangat berbahaya bagi sektor pangan yang sebagian besar ini menjadi hajat hidup produksi rakyat.

Saya kira kalau saya berbicara persoalan gula misalkan menaikkan HPP gula yang paling setuju di ruangan ini adalah Pak Nusron, betul ya Pak Nusron? gitu. Kemudian HPP beras misalkan atau padi, ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus, karena berbicara persoalan pangan sebagian besar *pasca* produksi pangan tidak akan terlepas dari eksistensi dan tugas pokok fungsi di Menteri Perdagangan.

Jadi kalau berbicara persoalan perjanjian bilateral dengan berbagai negara, *fine*, saya kira itu harus kita lakukan karena ke depan bagaimanapun itu adalah pangsa pasar yang bisa kita buka, namun pada sisi lain tentu produksi dalam negeri ini sangat bergantung terhadap sistem pasar.

Jangan setiap tahun, setiap kali panen raya, setiap produksi petani pada panen raya harganya jatuh tapi pada waktu tidak memproduksi atau tidak

menghasilkan produksi harganya naik, kan ini menjadi hal yang biasa, menjadi biasa menyengsarakan rakyat, menyengsarakan petani.

Kasus terakhir adalah kedelai misalkan, saya sudah mendapatkan jawaban dari Pak Lutfi secara langsung tentu saya puas dengan jawaban itu, tetapi apa ke depan yang bisa dilakukan supaya hajat hidup rakyat ini tentu bisa dikelola dengan baik. Jangan kemudian pada sisi lain harga-harga lain naik tetapi harga produksi yang dihasilkan oleh rakyat malah tidak pernah naik gitu, pada sisi lain juga mata rantainya *nggak* pernah diurus.

Dari produksi hasil pertanian sampai kepada produsen contoh beras saja itu bisa menjadi tujuh tahap itu, Pak Bahlil tahu karena dulu Pak Bahlil juga petani sebetulnya waktu di Papua sana. Petani Pak, saya tahu petani dan dagang ikan, jadi ngerti betul.

Nah, oleh karenanya menurut saya ini harus diurus betul Pak Lutfi. Saya mengatakan di awal Menteri Perdagangan yang masih muda ini yang punya pengetahuan luas, berpengalaman karena satu-satunya Menteri Perdagangan yang berpengalaman ya Pak Lutfi karena ini yang kedua kalinya gitu ya.

Menurut saya harus progresif bukan hanya ke luar negeri tetapi ke dalam negeri. Boleh untuk mencegah inflasi terhadap komoditas lain tetapi hasil-hasil yang ini dihasilkan oleh rakyat mohon juga harus diperhatikan stimulusnya. Kalau ditekan harga ya harus diberikan insentif, jangan kemudian ditekan harga tidak ada insentif, ini yang kasihan. Kalau sekali waktu para petani sudah malas memproduksi karena harganya rendah kemudian ditekan dibatasi oleh HPP, apalagi kemudian juga komoditasnya rentan dengan situasi dan perubahan iklim sekali waktu orang enggan lagi untuk memproduksi yang repot Menteri Perdagangan gitu. Nah ini yang menurut saya, saya tidak menyebutkan per komoditas tetapi Pak Lutfi saya harap ini bisa menangkap apa yang saya sampaikan.

Yang kedua, untuk Menteri BKPM supaya seajarlah ya, *nggak* usah pakai Kepala gitu ya, Menteri BKPM. Saya senang sekali kalau membaca apa yang disampaikan oleh Pak Bahlil gitu ya karena semuanya optimis dan memang ini di era yang sedang kita susah ini optimis ini penting. Ya meski angka-angka bagus menurut saya saya masih butuh mana yang kategori ini adalah komitmen gitu ya, mana yang bisa realisasi dan sebetulnya 2021 ini mana yang bisa realisasi. Mana yang *hand carry* dari 2020 ke 2021 yang tentu saya harap Pak Bahlil sebagai representasi dari berbagai organisasi dan representasi dari masyarakat Timur bisa berhasil di dalam mengelola BKPM.

Pak Bahlil ini sahabat saya, nasibnya jauh lebih hebat daripada saya, itu yang saya hormat. Oleh karenanya, saya hanya minta angka-angka yang tadi disampaikan di *categorize* ya ini adalah yang *hand carry* dari 2020 ini yang komitmen baru 2021, ini yang menjadi angka komitmen untuk berinvestasi, tapi ini adalah angka realitas supaya supaya tidak berbanding terbalik. Lho kok investasinya naik terus berarti kan semestinya kondisi ekonomi naik, semestinya juga lapangan pekerjaan naik tapi kenapa kemudian kondisi ekonomi saat ini turun. Kemudian kenapa kemudian untuk membuka lapangan pekerjaan agak sulit misalkan, ini banyak pertanyaan

yang tentu saya harapannya Pak Bahlil bisa sukses terhadap situasi seperti ini.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Baik, terima kasih.

Kita ke seberang ke kiri cuma orangnya nggak ada. Pak Darmadi, silakan.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Selamat bertugas Pimpinan, kok Pimpinan Pak Menteri.

Ini Menteri Perdagangan kelima atau keenam yang sudah saya berhubungan di Komisi VI, dan Bapak kan sudah yang kedua walaupun di era Presiden yang berbeda, visi misinya berbeda Pak, SBY berbeda dengan Jokowi. Nah tentu saya menaruh harapan besar menteri-menteri sebelumnya *behavior*-nya berbeda-beda, ada yang tidak tahu apa-apa kemudian masuk belajar, ada yang tahu sedikit masuk belajar, ada yang tahu terlalu banyak ngajarin. Saya *nggak* tahu Bapak nanti masuk ke yang mana karena kita baru bertemu walaupun saya sering mendengar nama Bapak.

Tentu saya mengharapkan begini karena orang kecil itu selalu berbicara berbicara mengenai orang lain, orang biasa berbicara dengan orang-orang di sekitarnya dia membicarakan orang-orang sekitarnya, orang besar itu selalu berbicara mengenai gagasan. Nah yang kita pingin tahu ini sebetulnya gagasan besar apa yang Bapak akan bawa ke Kementerian Perdagangan karena dari presentasi Bapak kan sebetulnya hal-hal biasa Pak, menteri sebelumnya juga ngomongnya begitu juga.

Stabilisasi harga, tiap hari ngurusin harga, kalau harga naik Presiden marah, Bapak bisa nanti bahaya karena kursi itu panas Pak, iya kan, sudah 6 menteri kan dicopot Pak, ada yang setahun ada yang itu panas sekali. Kemudian membicarakan tentang UMKM, berbicara mengenai ekspor tentu kami mengharapkan sebetulnya gagasan besar apa yang Bapak bawa ke sini menjadi Menteri Perdagangan mengingat waktu Bapak juga nggak lama karena sudah tersita satu tahun oleh menteri sebelumnya walaupun dari partai yang sama. Sama ya Pak ya, Bapak dari PKB atau?

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Saya utusannya PKB.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Jadi sudah jelas ini kan Pak Faisol. Nah gagasan besar ini menjadi penting bagi kami ada apa *breakthrough*-nya? Bapak sudah habis satu tahun, tahun 2024 sudah tahun politik. Nah ini yang kita pingin tahu, nanti bicaranya selalu defisit impor ekspor kemudian ngurusinnya banyak impornya. Banyak mengatakan bahwa ini kementerian impor dan sebagainya. Ini yang kami pingin tahu sebetulnya hari ini karena kalau bicara teknis juga Bapak sudah lama ninggalin perdagangan mungkin sudah banyak lupa juga. Tapi sekarang ini yang kita pingin tahu ke depan ini mau seperti apa, apakah seperti *roadmap*-nya menteri yang sebelumnya, apakah ada hal baru yang kepingin Bapak bawa. Itu yang pertama Pak.

Terus soal transparan Pak, pidato pertama Bapak saya cermati dengan baik waktu yang pakai jaket biru yang semuanya disuruh pakai jaket biru kan. Itu kami cermati dengan baik Bapak bicara dengan tentang transparansi, saya nggak bisa nebak ke mana sebetulnya saat itu. Tapi Bapak bicara mengenai petinju, penonton, dan Bapak adalah wasit. Ini tolong jelaskan kepada kami Pak, petinju itu apa dan ada masalah apa, penontonnya kenapa, kemudian Bapak wasitnya mau bagaimana Pak Menteri. Apa paham yang Bapak anut ini kita juga belum *ngerti*, *neo-liberalisme*, kerakyatan karena kan ini banyak Mahaka kan, ini kan banyak jebolan Mahaka ini. Pak Bahlil juga Mahaka, iya HIPMI dan Mahaka kan.

KEPALA BKPM:

Pimpinan. HIPMI belum tentu Mahaka Pimpinan, biar *clear* di sini.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Pak Bahlil setengah Mahaka juga, iya kan. Maka alirannya kan jadi Mahaka *no mix* Pak.

ANGGOTA:

Ini aliran (*suara tidak jelas*) itu (*suara tidak jelas*).

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Alirannya lari ke *neo-liberalisme* atau alirannya lari ke kerakyatan, iya kan. Nah ini juga menjadi hal kalau kita lihat kalau Bapak ini kan kita kenal banyak pahamnya *neo-liberalisme* ini iya kan. Artinya apa? kalau bukunya yang terkenal di Amerika yang sama di Amerika Thomas Thomas Piketty itu Capital itu kan jelas tuh penelitian dia yang begitu banyak ratusan tahun itu menjelaskan bahwa *neo-liberalisme* menciptakan *inequality* Pak *inequality*, ketimpangan kesenjangan yang semakin besar. Nah faham-faham ini apakah

faham mana yang Bapak mau terapkan, ini menjadi contoh menjadi salah satu pertanyaan saya.

Yang terakhir karena waktunya nggak banyak juga adalah saya pingin tahu ke depan pembagian Bapak dengan Wamen itu seperti apa? Apakah Bapak mau jadikan Wamen itu hanya boneka atau diaktifkan atau pelengkap atau ban serep Pak. Ini berbeda ga dengan sebelumnya, karena ini sayang Pak anak muda ini. Umurnya baru 35 masih muda sekali ya kemarin digoncang sedikit isu bawang putih kan *shock* juga dia, oh kemarin kan disinggung dia masuk namanya. Artinya ini hati-hati kan, dibimbing Pak Menteri yang muda ini.

Kalau yang selanjutnya ke Pak Bahlil anggaran saya terima kasih saya selamat buat dia luar biasa memang Pak Bahlil ini jago meyakinkan orang, harus kita akui ya. Komunikasinya bagus sekali, Presiden saja sampai takluk sebetulnya iya kan. Nah tapi saya minta begini Pak Bahlil selalu menyebutkan 700 investasi mangkrak, bisa diperjelas kepada kami Pak bikin klasifikasi saja investasi mangkrak ini 700 T lebih ini apa saja dan akibat apa gitu kan.

Apakah banyak perusahaan-perusahaan yang sebetulnya gara-gara orangnya *nggak* serius faktor karena dia spekulasi dulu ya, kemudian diambil proyek itu kemudian sekarang berhenti dia sudah punya izin dan sebagaimana. Nah ini ini yang kayak-kayak gini ini tolong dibuat klasifikasi kepada kepada kami Pak, termasuk 16 perusahaan yang relokasi dari Cina itu Pak, karena banyak mengatakan di luar itu Pak Bahlil lagi ngibul, ya bohong-bohongan saja 700 T, kemudian karena pintar dia menyajikan angka kan.

Tapi saya *nggak* percaya itu Pak, saya percaya Pak Bahlil ini integritasnya tinggi gitu kan ya. Jadi karena dia pengusaha dari HIPMI, orang HIPMI itu profesional semua saya lihat.

Terima kasih Pimpinan.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Baik. Merdeka.

Kembali lagi sebelah kanan Pak Rapsel Ali, silakan Pak.

F-P. NASDEM (MUHAMMAD RAPSEL ALI):

Terima kasih.

Segenap jajaran Pimpinan yang saya hormati, serta

Rekan-rekan Komisi VI yang saya banggakan.

Saya langsung aja ke Saudara Menteri Investasi, Saudara Menteri Investasi. Ada empat hal yang ingin saya diskusikan, yang pertama adalah saya minta data daftar PMA 5 tahun terakhir.

Yang kedua daftar perusahaan PMA yang aktif 5 tahun terakhir, ketiga, daftar perusahaan PMA yang di-*blacklist*. Yang keempat ini merupakan aspirasi dari kawan-kawan para pengusaha bahwa terhadap perusahaan PMA yang dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut tidak melakukan aktivitas usaha dan investasi, langsung saja masuk dalam daftar *blacklist*.

Demikian.

Terima kasih Pimpinan.

WAKIL MENTERI PERDAGANGAN:

Izin Pimpinan, Pak Hekal sedikit.

Saya sesuai arahan Pak Mendag saya harus meninggalkan tempat sebentar mewakili Pak Mendag dalam rapat sama Pak Menko nanti setelah itu saya kembali lagi untuk persiapan di G-21 Pak.

Jadi persiapan saya nanti, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya pikir sudah selesai cuma kasih tunjuk Pak Bahlil bahwa bisa di ruangan bersama gitu kan.

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Tapi Bapak Pimpinan karena Pak Wamennya di sini menjawab Pak Darmadi saya ingin meyakinkan bahwa dan menggarisbawahi bahwa Kementerian Perdagangan itu pimpinannya adalah Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan. Apapun yang saya lakukan pasti sepengetahuan beliau dan apapun yang beliau lakukan sepengetahuan saya, jadi inilah kembaran yang tidak bisa dipisahkan.

KETUA RAPAT:

Tapi dipisahkan buat acara dulu ya. Oke, ya silakan Pak. Oke kita ke Ibu Evita, Silakan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih Bapak Pimpinan, Pak Menteri dan Pak Kepala BKPM yang saya hormati.

Saya ke Pak Menteri Perdagangan dulu, selamat Pak atas penugasan yang diberikan kembali luar biasa ya Pak ya tadi saya ini tiga kali ya kan Pak ya. Saya hanya berharap Bapak ini merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan kita ke depan. Jadi Bapak ini menjadi solusinya nih Pak. Jadi Bapak Jokowi juga menempatkan Bapak yaitu Pak Jokowi mencari siapa nih yang bisa menjadi solusi dari masalah-masalah yg kita hadapi sekarang. Tentunya harapan saya juga dari paparan yang Bapak berikan tadi mengenai neraca perdagangan dan prioritas kita ke depan itu saya berharap tentunya Bapak bisa mengevaluasi kembali apa-apa sebenarnya yang belum tercapai yang kemarin ini karena yang 2020 itu kan Bapak bukan menterinya gitu Pak. Apa-apa yang belum tercapai dan kira-kira kebijakan-kebijakan apa yang menghambat daripada apa namanya menjadi kelemahan dari pada perdagangan kita Pak meningkatkan neraca perdagangan kita. Dan harapan saya Pak Menteri ada Pak Kepala BKPM, saya melihat Menteri BUMN sudah memaparkan apa namanya hal-hal yang menjadi gebrakan-gebrakan ke depan ada kaitannya dengan ekspor impor, ada kaitannya dengan hubungan kita di luar negeri, ada kaitannya dengan investasi walaupun itu menyangkut BUMN. Saya inginkan sinergisitas antara perdagangan tentunya BUMN, BKPM, dan perindustrian karena ujung-ujungnya itu ya di perdagangan kebijakannya Pak untuk ekspor impornya. Sinergisitas ini saya harapkan bisa lebih ditingkatkan jangan sampai nanti semuanya jalan-jalan sendiri Pak.

Kemudian saya juga merasa Pak setelah saya duduk saya baru di Komisi VI ini, saya melihat bahwa persoalannya sih saya anggap sepele gitu mungkin dianggapnya sepele bahwa kita ini masyarakat dan dunia usaha kita ini Pak belum mampu memanfaatkan perjanjian perdagangan luar negeri kita. Begitu banyaknya perdagangan luar negeri *Comprehensive Partnership Agreement* iya kan *Trade Agreement* yang sudah kita tandatangani, nah ini belum mampu dimanfaatkan secara maksimal Pak oleh masyarakat dan dunia usaha kita Pak.

Nah ini apa nih yang bisa Pak Menteri lakukan, program-program apa ke depan Pak, sosialisasi seperti apa karena tidak ada gunanya ketika kita melakukan perjanjian-perjanjian dengan negara lain namun masyarakat dan dunia usaha sendiri tidak mengetahui keuntungan dan *benefit* dari pada setiap apa namanya perjanjian-perjanjian yang kita tandatangani tersebut. Karena saya yakin setiap perjanjian perdagangan itu nanti toh ada dampaknya kepada *performance* daripada neraca perdagangan kita. Jadi harapan saya itu saja Pak Menteri, kalau ngajarin Pak Menteri tidak perlu lagi karena Bapak sudah dua kali di apa namanya di sektor perdagangan ini.

Untuk Bapak Kepala BKPM. Terima kasih Pak atas paparannya tadi saya juga mengapresiasi di saat kita ini lagi Covid-19 ini menurun kita punya optimisme Bapak tetap optimis luar biasa. Saya hanya ada pesan saja kepada Bapak mengenai investasi saya setuju saja kita harus menggalakkan investasi itu saya sepakat dan saya mendukung, tapi ada sektor-sektornya yang harus juga kita lihat. Sekarang kita lagi ramai Pak, lagi ramai dengan urusan daripada investasi OTT (*Over The Top*) itu di Kominfo di Komisi I lagi diributkan juga, bagaimana investasi dari pada *Over The Top* ini mereka tidak mau bekerjasama dengan operator lokal.

Jadi mereka sudah tulis surat ke 5 menteri yang saya dengar kan ada aturan. Jadi sebenarnya tuh peraturan Pemerintah RPP rancangan yang sekarang turunan dari Undang-Undang nomor 11/2020 mengenai Cipta Kerja sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran itu di dalamnya dikatakan bahwa bisnis OTT itu Pak investasi OTT global ini, ini wajib bekerja sama dengan penyedia apa namanya operator lokal. Nah ini katanya mereka ber inilah mereka itu menulis surat kepada Pemerintah itu tidak sepakat Pak dengan aturan tersebut.

Nah saya minta juga Pak Menteri, Pak Kepala BKPM ini juga *strict* di sini Pak, kita memang mau terbuka dengan investasi tapi ketika kita bicara informasi kita perlu kedaulatan Pak, kedaulatan informasi kita dan juga kita perlu yang namanya pengamanan data pribadi kita jadi kita membuka investasi tapi harus ada persyaratan-persyaratan yang dilakukan Pak. Jadi saya tetap mendukung Pak bahwa kewajiban daripada OTT global ini di dalam berinvestasi harus bermitra, harus bekerjasama dengan operator lokal Pak karena ini kembali lagi terkait dengan ketahanan, pertahanan, kedaulatan informasi kita.

Kemudian juga saya *nggak* ngerti mungkin Bapak tahu ini tapi ini tidak investasi. Sekarang saya lihat banyak sekali hal-hal yang di satu sisi kita ingin apa namanya *fresh money* datang ke kita sampai kepada bantuan *data center* kita pun sekarang ini investasinya dari Perancis, nah ini juga saya tidak setuju Pak. *Center* kita *financing*-nya apa Perancis, okelah kalau kita pakai teknologi Perancis teknologi luar negeri saya sepakat, tetapi kalau kita di *financing* untuk data center kita kedaulatan informasi kita kembali lagi oleh asing, *no free lunch* Pak.

Eggak mungkin ada satu negara ingin melakukan investasi di kita melakukan apa *financing* di kita tanpa adanya apa namanya maksud-maksud tertentu saya *nggak* yakin itu Pak. Nah ini juga sekarang lagi di godok di Bappenas, Menteri Keuangan dan saya lihat walaupun Komisi I kemarin menentang saya lihat ini jalan ini terus Pak yang namanya *financing* Perancis ini terhadap *data center* kita. Kita Pak masa data center kita ini orang asing yang *finance* gitu Pak, apa *nggak* ada Telkom? itu Bakti, Bakti ada Bakti kan Bapak tahu, itu Palapa *ring* itu juga teknologi asing yang kita pakai tapi yang di depan itu Bakti ya kan.

Itu yang ini yang harus dilakukan, boleh saja teknologinya asing tapi jangan *financing* semuanya itu oleh asing Pak. Ini menjadi ini saya dan saya *nggak* tahu apakah di BKPM ada aturan-aturan investasi untuk sektor-sektor tertentu Pak yang berkaitan dengan kedaulatan kita dan pertahanan kita ini yang saya harapkan bisa diinikan Pak.

Kemudian saya membaca nih Pak bahwa Mc Kinsey Global Institute itu memproyeksikan kita Indonesia itu menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh di tahun 2030 kalau saya lihat ya Pak ya, karena apa? Ya emang konsumen kita market kita besar. Bayangkan saja dengan 135.000.000 konsumen konsumen kita Pak, potensial pasar saya baca ini bernilai 1,8 T. Nah ini kembali tentu investasi asing akan masuk ke kita Pak, tapi kembali lagi proteksinya terhadap pengusaha dalam negeri karena *market* kita besar, jangan sampai dilupakan yang namanya pengusaha-pengusaha di dalam

negeri. Saya lihat tentunya ada sektor-sektor yang harusnya kita buka secara luas ada juga sektor-sektor yang kita tutup demi kepentingan nasional kita.

Saya rasa demikian Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Kita lanjut ke Bapak Hendrik, silakan Pak.

F-P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan dan seluruh jajarannya,

Kepala BKPM dan jajarannya yang saya hormati,

Forum Rapat Kerja yang saya muliakan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang pertama saya tidak ada catatan khusus terkait serapan anggaran dari Kementerian Perdagangan maupun dari BKPM karena alasannya sederhana saja selain anggarannya kecil memang kerja di dua lembaga ini kan nyata dan karena itu wajar kalau realisasi anggarannya itu sangat maksimal sekali.

Khusus untuk Kepala BKPM Pak Bahlil abang saya, ketika Bapak memaparkan *roadmap* di Komisi VI pada saat negeri ini dilanda oleh Covid-19 waktu itu bagi saya saya merasa *roadmap* itu terlalu progresif dan cenderung tidak realistis Pak. Sebab sederhana saja mana ada investasi yang grafiknya akan naik dalam kondisi pandemik yang ekstrem seperti begitu, tetapi data dan fakta yang Bapak sajikan di forum rapat ini justru mematahkan skeptisisme apa rasa skeptisisme saya gitu kan saya harus apresiasi karena ini adalah capaian yang luar biasa.

Nah tetapi pertanyaan saya adalah apakah 101% realisasi investasi itu riil investasi atau hanya *comittment to invest to Indonesia* Pak? Sebab kalau itu riil investasi Pak saya rasa Bapak layak mendapat *reward* karena itu luar biasa sekali dan indikasi-indikasi yang sederhana adalah tentu berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan sebagainya itu standar sekali yang saya butuh penjelasan dari Pak Kepala BKPM.

Yang kedua terkait realisasi investasi Jawa dan luar Jawa, ini *good news* bagi saya sebagai wakil rakyat dari luar Jawa Pak. Bertahun-tahun realisasi investasi itu Jawa sentris sekali dan di era Bapak ada *switch* ada *alteration* posisi dari Jawa menjadi ke luar Jawa meskipun selisihnya masih sangat minimalis sekali, tetapi itu *good news*-nya Pak.

Nah *bad news*-nya bagi saya sebagai wakil dari Maluku saya tidak melihat ada realisasi investasi di Maluku tahun 2020 dan 2021. Saya mau tanya kepada abang saya ini kira-kira kendalanya apa Pak supaya saya bisa jelaskan kepada konstituen saya di daerah saya karena itu tanggung jawab moral politik saya kepada konstituen saya Pak Kepala BKPM. Lalu saya juga mencatat di forum ini juga Bapak sempat menyampaikan terkait rencana sosialisasi aturan BKPM ke daerah-daerah dan itu meminta partisipasi dan peran serta dari kawan-kawan Komisi VI. Pertanyaan sederhana Pak kapan itu dilaksanakan Pak? Ini sudah 1 tahun berlalu itu belum dilaksanakan Pak Bahliil. Yang ya saya kira untuk sementara itu saja.

Terakhir Pak untuk Menteri Perdagangan. Pak Menteri, ini aspirasi dari wilayah saya Pak. Kebetulan saya ini mewakili dari Maluku dan Bapak pasti tahu bahwa Maluku itu komoditas tradisional yang historisnya adalah cengkeh dan pala ya Pak. Kalau teman-teman anggota dewan yang merepresentasi wilayah pertanian itu konsen mereka karena soal harga gabah, harga gula dan sebagainya, harga bawang putih dan sebagainya, konsen saya terkait dengan harga cengkeh dan pala Pak.

Sampai saat ini tidak ada satu pun aturan ya dari Kementerian Perdagangan ya jadi itu betul-betul dilepaskan kepada mekanisme pasar, kepada hukum *supply and demand*. Nah yang menyakitkannya adalah para pembeli cengkeh dan pala di Maluku nah ini saya tidak menuduh tapi ini fakta Pak, itu hanya 1, 2 orang saja. Ini sebenarnya adalah kartel yang terjadi dan kaki tangan di pulau-pulau itu hanya jaringan-jaringan *downstream* mereka dan karena itu mereka bisa melakukan *fixed pricing* terhadap harga beli atau harga jual cengkeh dan pala. Setiap kali bulan Desember Pak itu kan musim-musim perayaan untuk kaum kaum Nasrani di Maluku atau awal tahun tahun baru untuk semua saudara Muslim maupun Kristen mereka *celebrate* tahun baru di Maluku dan itu adalah *peak season* di mana harganya sangat rendah sekali, tapi ketika bulan Maret bulan musim-musim paceklik harganya melejit tinggi sekali.

Pertanyaan saya Pak, adakah solusi dari Kementerian Perdagangan misalnya ada gudang yang dibangun oleh Pemerintah supaya ketika masa panen cengkeh dan pala itu diserap entah itu oleh koperasi atau apa di subsidi oleh negara dengan harga yang wajar nanti kemudian itu bisa diatur tata niaganya. Kalau *nggak* kan petani-petani cengkeh dan pala ini kan setiap tahun Pak, setiap kali panen cengkeh dan pala mereka menjerit sekali karena keringat yang keluar untuk memanen itu tidak sebanding dengan harga jual itu dan itu tidak ada keadilan di situ Pak Menteri. Saya mohon Pak dalam periode yang baru di Kementerian Perdagangan Pak Menteri mudah-mudahan ada satu kebijakan yang bisa diambil untuk bisa menjadi solusi terhadap penderitaan petani cengkeh yang telah berlangsung sekian lama di Maluku.

Terima kasih Pak Menteri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Kita lanjut lagi Ibu Nevi, silakan Bu.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati,

Bapak Menteri.

Yang pertama kepada Kementerian Pak Menteri Perdagangan. Pak Menteri bahwa untuk pada tahun 2020 neraca perdagangan Indonesia mengalami *surplus* sebesar USD 21,75 miliar, tapi *surplus*-nya itu ekspor Pak. Tapi karena ada penurunan impor sangat tajam sebesar 17,34%, jadi bukan karena meningkatnya kinerja.

Kalau untuk Kementerian Perdagangan kita sudah sepakat Pak untuk mengejar surplus-surplus ya perdagangan tentu bagaimana kita ekspor sebanyak-banyaknya dan impor sedikit-dikitnya. Itu yang kita harapkan dari Pak Menteri baru dilantik. Ke depan ya apalagi terkait impor selama ini kita masih bisa memenuhi reproduksi, tapi kenapa *nggak* kita maksimalkan terutama bahan pangan? Apalagi kemarin kedelai sedang masalah dan terus mungkin juga beberapa pangan lainnya.

Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan kementerian teknis dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan terutama di tengah pandemi ini ini bisa 2 tahun, 3 tahun ke depan Pak, tidak setahun ini kita belum selesai. Untuk itu ya kita tidak perlu impor ugal-ugalan Pak untuk komoditas yang bisa kita produksi sendiri.

Kita harus maksimalkan harus berdayakan kemampuan negeri sendiri yang dengan jangan sampai keluar untuk menjaga inflasi untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok kita impor. Itu harusnya tugas daripada Kementerian Perdagangan yang dikerjakan apa ke depan, kita harus mengandalkan menciptakan harga kebutuhan pokok yang berpihak pada petani, nelayan, pedagang, serta masyarakat umum harus dilakukan dari hulu sampai ke hilir.

Lalu Pak yang ketiga, saya ingin bagaimana evaluasi Bapak tentang pasar rakyat di tengah masa pandemi ini? apakah dari anggarannya ada Bapak memperhatikan pasar rakyat karena kita tahu pasar rakyat ini jangan sampai tutup Kementerian Perdagangan harus melibatkan Pemerintah daerah

ya untuk mencegah penyebaran Covid-19 di pasar rakyat. Kita mohon penjelasannya Pak dievaluasi kita di tahun 2020.

Lalu Pak dengan Kementerian BKPM. Sebetulnya yang perlu saya tanyakan yaitu tentang ini Pak proyek-proyek yang didanai PMA selama tahun 2020 didominasi proyek tambang dalam tabel industri logam dasar dan barang logam. Yang ingin saya tanyakan bagaimana upaya Pemerintah dalam melindungi sumber daya alam yang berpotensi dikuasai asing melalui adanya PMA, tingginya minat investor asing terutama negara tertentu untuk menggarap hasil tambang perlu diwaspadai. Mereka bisa saja menghabiskan cadangan Nikel dengan dalih investasi mengingat negara tersebut ke depan memerlukan bahan setengah jadi untuk kebutuhan industri baterai di negaranya. Apalagi baru-baru ini kedatangan lagi 500 TKA ke Konawe pada tahun pada bulan Juni 2020 untuk menjalankan proyek tersebut. Nah ini perlu kami pertanyakan.

Lalu Pak yang kedua, sebenarnya bagaimana Pak *roadmap* industri mobil listrik, ya ini berkaitan nanti kita bicara masalah harga mobil yang mahal, insentif pajak, sarana dan prasarana pendukung mobil listrik. Dan kita tahu ternyata pembentukan IBH (Indonesia Baterai Holding) karena Indonesia itu dianugerahi material-material Nikel, Sulfat Pak ya ini bahan baku pembuatan baterai mobil listrik. Jadi kan ada 4 perusahaan bagaimana perkembangannya tapi sebetulnya saya ingin Pak Bahlil bagaimana *roadmap* untuk industri mobil listrik ke depan ya karena kita mobil listrik ini mahal Pak harganya, ada 1,5 Miliar, ada 600 juta mana siap ya apa masyarakat kita akan membelinya.

Terima kasih,

Itu saja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Kita lanjut ke Ibu Sondang, silakan Bu.

F-PDIP (SONDANG TIAR TAMPUBOLON):

Terima kasih.

Pak Hekal Pimpinan yang baik, dan juga

Teman-teman Komisi VI yang saya hormati.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama saya mengucapkan selamat Pak Menteri atas jabatan yang dipercayakan oleh Pak Presiden. Kami percaya Pak Presiden tidak sembarangan memilih menterinya karena adanya *reshuffle-reshuffle* karena pasti ada evaluasi-evaluasi yang terjadi di dalam Kementerian Perdagangan yang tidak sesuai dengan harapan. Dengan dipilihnya Pak Menteri ini harusnya ada 1 optimisme baru, harapan baru kepada kita semua khususnya juga Anggota Komisi VI.

Nah saya karena hari ini adalah topiknya tentang anggaran saya tidak terlalu sebenarnya tidak tidak begitu mempermasalahkan masalah anggaran karena juga situasi Covid-19 di tahun 2020 yang menyebabkan memang ya seperti itulah anggaran yang ada. Nah sebenarnya tadi kami harapannya adalah Pak Menteri bisa menjelaskan lebih banyak tentang apa yang akan di rencanakan di 2021, terkait dengan *refocusing* dan segala macam kan tidak bisa sendiri begitu saja tanpa adanya gagasan atau rencana-rencana yang seperti apa yang mau dibawa oleh Pak Menteri sebagai Menteri yang baru kepada Kementerian Perdagangan. Jadi kami mau menanyakan dijelaskan nanti seperti apa Politik Perdagangan yang mau dibawa oleh Pak Menteri di dalam Kementerian Perdagangan di Kementerian Perdagangan baik itu politik perdagangan dalam negeri maupun juga politik perdagangan luar negerinya. Saya yakin Bapak ditunjuk jadi Menteri Bapak sudah melakukan analisis terhadap sistem perdagangan kita sekarang ini gimana, *SWOT*-nya apa, *strength*, *weakness*, *opportunity*, *threat*, bisa dijelaskan. Apa kelemahan sistem yang saat ini terjadi dan apa kira-kira solusi dan *opportunity* yang akan ditawarkan oleh Pak Menteri dan juga apa namanya dengan *manpower* yang saat ini ada di Kementerian Perdagangan, itu saja.

Dan kemudian terkait dengan banyaknya perjanjian-perjanjian perdagangan. Saya menyampaikan kepada Menteri Perdagangan yang lalu untuk melakukan evaluasi kembali terhadap banyaknya perjanjian-perjanjian perdagangan terhadap beberapa negara-negara apakah sebenarnya itu efektif terhadap apa namanya pertumbuhan ataupun pergerakan ekonomi kita? Apakah malah justru merugikan ataukah memang menguntungkan? atau apakah perlu adanya evaluasi re-evaluasi kembali sehingga harus dilakukan berbagai macam apa namanya diskusi kembali atau renegosiasi kembali terhadap berbagai banyaknya perjanjian-perjanjian perdagangan seperti dengan Cina dan lain sebagainya. Apakah kita lebih banyak diuntungkan ataukah banyak dirugikan, kalau banyak dirugikan kenapa tidak melakukan renegosiasi ulang terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan. Itu salah satu catatannya terhadap Pak Menteri Perdagangan.

Kemudian kepada Pak Menteri BKPM. Pak Menteri harus diakui presentasinya yang tadi memberikan semangat, optimisme kepada kita semua. Kami harapkan itu adalah bukan sesuatu gula-gula terhadap kami dengan begitu banyaknya yang tadi 700 triliun berbagai macam tetapi itu riil begitu. Itu harus bisa memberikan satu signifikan terhadap apa namanya pertumbuhan ekonomi kita dan lain sebagainya.

Dan saya juga tapi memberikan apresiasi kepada Pak Menteri BKPM banyak mitra-mitra kami, kolega-kolega kami yang menyampaikan bahwa melakukan perizinan-perizinan di BKPM saat ini semakin mudah dan kami berharap dengan adanya *pasca* Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, ini

akan ada satu integrasi dalam hal pengurusan perizinan-perizinan di seluruh Indonesia. Jadi tidak ada lagi banyak pintu-pintu yang dijalani oleh semua pelaku usaha yang untuk melakukan apa namanya usaha melakukan perizinan harus banyak melewati pintu dan lain sebagainya. Dan *pasca* adanya Undang-undang Cipta Kerja ini kami berharap juga dilakukan sosialisasi terhadap penanaman modal dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja.

Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih Pak Menteri dan Pimpinan yang saya hormati.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Kita lanjut Pak Daeng.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Kementerian Perdagangan,

Kepala BKPM beserta jajaran,

Saya bersyukur sekali hari ini dapat rapat bersama dengan Menteri Perdagangan yang baru ada secercah harapan yang kita bisa harapkan dengan ada perubahan kementerian sehingga saya jujur saja saya butuh sesuatu yang menjanjikan dengan Kementerian Perdagangan dengan Pak Menteri yang baru ini bahkan saya berpikir gini saya lihat foto lama foto jadul ada Trisula dalam filosofi Majapahit ini adalah suatu kekuatan untuk mempertahankan negara. Ada kepala BKPM ada Menteri BUMN ada Menteri Perdagangan ini kan sohib dari lama.

Mungkin kalau jalan kan bisa kompak bergandengan tangan untuk memperkuat bagaimana bangsa ini berkompetisi ke depan saya optimislah. Cuma yang ingin saya garis bawahi adalah berkaitan dengan realisasi anggaran apapun yang ada di Kementerian Perdagangan maupun di BKPM itu harus berbanding lurus dengan output yang dihasilkan untuk bagaimana kebijakan dan rencana-rencana dari kementerian itu mampu mendapatkan hasil yang optimal untuk bangsa dan negara. Yang paling penting adalah menjadi fundamen dasar bagaimana Menteri Perdagangan Kementerian Perdagangan, BKPM itu mampu menopang bagaimana ekonomi bangsa ini ke depan.

Saya agak menggarisbawahi kaitan tadi yang diucapkan oleh Pak Herman Khaeron. Pak Menteri, saya cuman ingin berpesan saya ini petani saya hidup di kampung saya besar dari sektor pertanian keluarga saya adalah

petani dari turun temurun bahkan lima generasi sudah. Saya kemarin datang ke Bulog ada tumpukan beras impor yang dari India dan dari Vietnam.

Saya mengkritik impor itu dari awal ketika mengkritik apa ketika impor itu didatangkan ke Indonesia zaman itu, kenapa? Saya selalu menggarisbawahi begini. Kenapa impor itu dilakukan ketika panen raya gitu loh, data yang ada di Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian itu nggak *match* nggak nyambung? Menteri Pertanian bilang ini swasembada, Menteri Perdagangan ini perlu impor dulu ribut kita rekomendasi Menteri Pertanian 500.000 ton impor beras yang masuk ke kita itu 1,8 juta ton yang terjadi apa barang itu numpuk masuk ke Bulog karena Bulog hanya menjalankan Politik Tata Niaga impor yang dilakukan secara salah dia keluar biaya 1 bulan itu biasanya tuh 120 miliar bahkan dia kena bunga 1,2 triliun pertahun waktu itu. Artinya ada persoalan dari impor, impor yang kita lakukan.

Saya ingin bawa Menteri Perdagangan sekarang ini kalau kita memang butuh impor lakukan impor itu tapi jangan mengganggu yang bisa apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Lindungi Pak petani-petani kita yang memproduksi supaya mereka ketika bertani itu punya semangat bahwa ketika panen mampu mereka jual barang itu dengan punya nilai. Yang terjadi sekarang begini ketika panen ambruk Pak, harga jual kita luar biasa. Bapak bisa bayangkan ada beras yang dijual harga Rp8.500, Rp.8.800,-, biaya produksi kita nggak cukup itu seperti itu apalagi dengan kondisi sekarang yang ketika orang bertani di sana untuk nyari pupuk subsidi aja setengah mati juga saya bertani di sana saya beli pupuk itu harganya Rp.6.000 Pak non subsidi.

Nah kondisi seperti ini menjadi pertimbangan Pak Menteri dengan jajarannya bahwa pertimbangan okelah kita tidak menampilkan bahwa kita juga butuh impor untuk keseimbangan dan stabilisasi dan lain-lain saya memahami itu. Tapi kalau bisa apa yang dilakukan di dalam negeri dorong Pak, Pak Menteri dorong semua *leading sector* yang ada wabil khusus harga diri bangsa itu sektor pertanian untuk tetap eksis petani terproteksi karena gini saya di Dapil 7 Jabar Bekasi itu punya lahan pertanian 45.000 hektar Karawang itu 95.000 hektar.

Jadi 3 kabupaten dengan Purwakarta lahan pertanian kita itu hampir 170 sampai 180.000 hektar. Kondisi ini yang yang perlu keberpihakan keberpihakan itu bukan hanya goodwill bukan hanya niat baik tapi bagaimana strategi perdagangan yang *real* mampu memproteksi mereka jangan sampai impor itu merugikan petani kita impor itu hanya untungkan pihak-pihak tertentu yang bermain pada sistem kartel di sana.

Ini ini masukan saja berkaitan dengan persoalan Menteri Perdagangan. Cara persoalan ini akan terus berulang dan persoalan-soalan ini terjadi sekarang ada setiap gudang itu ada 4.000 sampai 8.000 ton yang beras diimpor waktu itu tahun 2018 sudah 3 tahun sampai 4 tahun numpuk di gudang dan tidak bisa didistribusikan karena lucu saya ketika ada bansos ada apapun kenapa tidak ngambil dari Bulog gitu saya nggak ngerti kenapa harus ngambil ke pemberi-pemberi kecil pedagang-pedagang kecil atau *seller-seller* kecil dengan harga dihabisin sama sekali. Kenapa tidak beli dari Bulog digunakan stok-stok yang ada di Bulog.

Yang kedua berkaitan BKPM. Saya kalau lihat Pak Bahil dari dulu kan memang orangnya kecil tapi biasanya kecil bisa-bisa akrobat biasanya. Kalau orang bisa akrobat optimislah ada Pak Lutfi, ada pak Kepala BKPM, ada Menteri BUMN ini bisa menjadi Trisula yang mampu orang-orang muda yang menjaga martabat bangsa ini ke depan. Saya berharap seperti itu data-data sudah disampaikan tadi ngomong target 817 triliun walaupun sambil senyum sambil dalam kondisi *covid* bisa capaian target sampai 826 triliun saya optimis Pak Bahil mampu menaikkan ini semua.

Tapi bukan hanya dalam hitungan kertas Pak tapi *real* dalam bentuk investasi bukan hanya bentuk hanya portofolio juga Pak *real* yang mampu menyerap tenaga kerja yang mampu menumbuhkan ekonomi kita yang mampu menjaga semua ritme kehidupan ekonomi kita yang ada di bangsa ini tadi keseimbangan juga baru capaian sekarang keseimbangan antara Jawa dan pulau Jawa misalnya. Tapi gini Pak kalau info apa investasi di luar Jawa hanya untuk eksplorasi sumber daya alam kita dan merusak alam kita, saya pikir saya juga tanda tanya juga yang begitu-begitu saya juga bisa Pak melakukannya. Nah saya berharap Pak Bahil mampu mengontrol itu investasi yang betul-betul menjadikan kita berbangsa dan bernegara dengan martabat di mata luar negeri.

Terima kasih.

Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Baik.

Tadi Pak Hilmi kelewat jadi tolong Pak baru kita ke kanan lagi pak.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Ketua Komisi VI.

Anggota Komisi VI dan yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan.

Kepala BKPM, beserta jajaran.

Jadi, saya ini sampai bingung kita ya Pak Menteri ya ini udah dua kali mudah-mudahan ke depan nggak terjadi lagi tentang kelangkaan kedelai sampai pedagang daging nggak mau jual. Nah ini kan tidak ada apa ya neraca barang yang ada di Indonesia Pak supaya nanti ke depannya tidak langka dan saya berharap sekali tentang ini Ka ada dua-duanya BKPM dan Kementerian Perdagangan. Jadi saya berharap Pak Menteri Perdagangan yang bapak kemarin kan menyampaikan ada harta karun 100 eh 500 triliun setelah saya baca itu kan dari *wallet* Pak *wallet* itu .

MENTERI PERDAGANGAN RI:

50 triliun – 50 triliun

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Oh berarti keliru, tadi saya liat di televisi kok 500 triliun makanya salah gitu

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Salah *quote* itu

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Berarti kan ada kesalahan ya udah kalo ada kesalahan ini berarti saya menerimalah, masalahnya saya juga lihat di internet cuma 200 eh 28,9 trilliunlah, jadi gini gini jangan sampai ke depan itu diucapkan tapi salah mengutip wartawannya atau apalah.

ANGGOTA:

Wartawannya Pak.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Nah ini juga gitu saya juga bingung Tadi kan saya liht di Metro TV Pak tadi kan ada ya kita baca-baca kok ini keluar juga di masalah *wallet* ini juga asosiasi ketuanya Pak. Siapa itu yang Damang Tra siapa tahulah. Itu juga menyampaikan kok jadinya lebih begini pembicaraannya 1000 ton lebih yang gitu hampir 1500 orang itu yang bilang Pak bukan bapak itu loh.

Jadi saya berharap ini kita bernegara itu harus memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi dengan ucapan dan keputusan. Saya berharap ke depan ini kita kita terpuruk dengan kebijakan-kebijakan yang ada seperti Pak Bahlil investasi yang didorong ke sini kan kita ini berharap investasi masuk ke Indonesia dengan adanya kawasan industri khusus yang mendapat *protect* yang lebih besar yang kan gitu Pak.

Padahal industri di Indonesia kan udah banyak yang berdiri dengan industri yang sama yang ada di kawasan kawasan industri khusus. Jadi kalau kita ini Pak sebagai *leader* ya kalau kita jual ke industri khusus dari pengusaha Indonesia sendiri kita ini kena PPN 10%, tetapi kalau perusahaan Singapura beli misalnya dari Pupuk Kaltim Amonia terus dijual ke industri kawasan khusus di Pasuruan lah (***suara tidak jelas***) itu kan tidak ada PPN Pak.

Tapi kalau trader Indonesia kalau mau jual ke situ kena PPN nanti bisa di restitusi. Tapi kan Bapak tahu sendiri di sini kayak apa ribetnya tentang perjanjian-perjanjian tentang perdagangan di ASEAN. Nanti kita ini banyak pajak final Pak misalnya di kontraktor kita kena pajak *final* 3% kan gitu perusahaan dari luar negeri juga kena 3% tapi dia beli barangnya nggak kena PPN Pak untuk dibawa ke sini nih.

Jadi ini kita bernegara itu harus memikirkan ke depan ini apa yang terjadi di negara kita ini kalau nanti kemudahan-kemudahan investor asing masuk ke sini tapi pengusaha kita sendiri yang jadi babak belur gitu loh.

Dan saya kepingin ya dalam masa pandemi ini apa yang dilakukan Pemerintah itu bagaimana menyelamatkan industri-industri yang ada nih loh Pak yang ada di Indonesia sekarang ini yang belum gulung tikar apa yang mau di-*protect* gitu loh.

Jangan nanti kayak kartu pra kerja terus kemarin subsidi gaje udah di tidak dianggarkan di 2001 itu kan kegunaannya itu nggak seberapa banyak itu tapi kalau saya kalau dalam kondisi bagaimana kita bisa menyelamatkan industri yang ada sekarang ini gitu loh.

Dan saya berharap sekali pak Bahlil Pak Menteri ini juga udah dua kali jadi menteri jangan sampai kelangkaan-kelangkaan beras, kedelai, daging dan yang lain-lain seperti pupuk itu regulasinya kan di Kementerian Perdagangan tapi barang dari Kementerian Pertanian Pak.

Sekarang itu masyarakat petani udah disuruh bikin RDKK kebutuhannya kan 21 juta tapi Pemerintah kan cuma ngasih 9,5 juta. Jadi ini Bapak nih dalam rapat kabinet kan nanti kelangkaan anunya didistribusi pak itu kan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan. Jadi saya berharap ya Pak ini tentang investasi dan perjanjian-perjanjian tentang perdagangan di Asean ini juga Pemerintah ini bagaimana bisa melindungi pemain lokal ini kayak kita-kita ini lah.

Itu aja dari masukan dari saya, Pak.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Baik.

Kita lanjut ke Pak Mukhtarudin

F-PG (Drs. MUKHTARUDIN):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan komisi VI dan anggota yang saya hormati.

Bapak Menteri Perdagangan dan seluruh jajaran.

Menteri Kepala BKPM dan seluruh jajaran juga yang hadir pada kesempatan pada hari ini.

Selamat kepada Pak Lutfi yang menjabat sebagai yang kedua kali sebagai Menteri Perdagangan dan saya kenal betul dan beliau ini kalau golok gioknya jauh sekali mudah-mudahan juga (*suara tidak jelas*) jauh lebih melesat, lebih baik.

Yang pertama terkait BKPM. Mungkin dua-duanya saja ini saya akan bicara sedikit tentang masalah angka-angka. Bahwa pertumbuhan ekonomi kita tahun 2004-2020 itu kan masih di minus 2 ya perkiraan sampai 2% minus 2% hingga sampai 0,9% itu pada kotak 4. Nah dari minus ini investasi itu masih di minus 4%.

Investasi itu diperkirakan masih minus di 4%. Saya melihat bahwa realisasi 2020 ini 101% investasi. Nah harusnya angka ini ada korelasi ya sumbangsinya kontribusinya terhadap *minus* nya pertumbuhan ekonomi kita di investasi. Saya bukan meragukan angka ini Pak Bahlil atau Pak kepala. Tapi tolong diberikan penjelasan kepada kami analisa 101% tetapi kontribusi *minus* investasi masih di 4%. Jadi belum ada korelasi yang signifikan pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi ini tolong dijelaskan juga kepada kami.

Nah perkiraan pada semester pada 2020 akhir atau perkiraan hitungan perkiraan kita pertumbuhan ekonomi kita 2020 itu adalah investasi itu masih minus di 4 pada,3 sampai minus di 4,4% 2020 ya Pak ya 2020. Ekspor kita *minus* 6,2% hingga 5,7% 2020 jadi setelah *totality* ini untuk Menteri Perdagangan. Impor kita minus 15,0 hingga 14,3%. Saya kira ini menjadi PR yang sangat berat tetapi kita tetap optimis. Kalau olahraga itu kalau sudah optimis ya ujung-ujungnya kalah tapi saya yakin dengan optimisme yang dimiliki oleh Pemerintah terus jajaran Pemerintah bisa menjawab semua tantangan ekonomi kita di tahun 2021. Ini saya berharap yang pertama tadi tolong berikan penjelasan kepada kami 101% investasi tapi belum berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan investasi kita masih minus 4% di 2020.

Yang kedua masalah investasi kita dukung kita dukung dalam rangka kita untuk membangun negara ini tetapi juga kita berharap bahwa investasi itu betul-betul memberikan asas bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi ekonomi kita pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita. Jadi tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi tidak ada sejahteranya jadi kesejahteraan muara kita ini apapun kesejahteraan rakyat.

Negara ini juga dibentuk untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah dibentuk juga untuk kesejahteraan rakyat. Jadi muara semua *ending* daripada semua pekerjaan kita hari ini lah kesejahteraan rakyat. Parameternya di situ, kalau kesejahteraan meningkat berarti Pemerintah berhasil. Nah ini menjadi PR kita. Oleh karena itu, investasi ini betul-betul bermanfaat maksimal tidak hanya sekedar kita target investasi tercapai tetapi manfaatnya kepada rakyat sejahtera itu harus dimaksimalkan terutama masalah tenaga kerja, lapangan pekerjaan, TKDN, padat karya dan lain-lain yang dipertimbangkan sehingga kita betul-betul investasi yang masuk betul-betul bermanfaat kepada rakyat sebesar-besarnya.

Kemudian perdagangan. Saya kira ini memang penting ke depan. Saya kira untuk dijaga masalah stabilisasi harga kita terutama yang beberapa waktu kemarin sampai ada mogok pengrajin tempe kita akibat bahan baku yang sangat mahal akibat suplai *demand* ini akibat suplainya kurang harga naik. Itu hukum pasar saya kira apa ketersediaan, ketersediaan bahan-bahan pangan yang primer bagi rakyat. Kan tempe ini kan tempe tahu nih kan juga kan apa makanan utama rakyat kita rakyat kecil terutama bahkan untuk seluruh rakyat Indonesia itu udah kaya beras aja tempe ini jadi konsumsi sudah besar.

Meskipun masalah tempe ini sudah kedelai ini tata niaganya tidak diatur oleh Pemerintah lagi. Saya kira, Pemerintah juga harus mengevaluasi karena yang menyangkut hajat hidup orang banyak mengganggu stabilitas konsumsi dan inflasi ini harus betul-betul dikontrol oleh negara. Kalau ga bahaya kayak kemarin 4 hari lalu tidak ada yang jual tahu, di pasar mogok bahaya kepada stabilitas pangan kita dan stabilitas negara kita. Jadi tolong yang berkaitan dengan pangan ini betul-betullah menjadi perhatian kita karena negara itu rata-rata hancur pasti kena pangan.

Politik tidak bikin hancur republik atau negara ini tapi pangan itu bisa bikin bubar negara ini. Jadi betul-betul menjadi konsen kita meskipun saya tahu bahwa Kementerian Perdagangan juga tidak berdiri sendiri dalam konteks ini ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Pertanian dan lain-lain nasi lintas kementerian ini harus dioptimalkan dalam rangka kita menjaga stok pangan asal kita terutama pangan-pangan yang strategis demi kebutuhan rakyat dan yang terakhir saya berharap yang dan terakhir terkait *refocusing* anggaran kita prinsip kita setuju karena memang situasi kita pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan sudah normal tahun 2021 ternyata belum.

Covid bukannya turun tapi naik oleh karena itu maka suatu sebuah keniscayaan sebuah ke suatu keniscayaan bahwa kita lakukan satu *refocusing* dari alokasi anggaran di setiap kementerian dan lembaga dan pernah kita menjaga agar Covid ini terkendali maka dari anggaran 300 triliun sekian untuk Covid ditambah 500 triliun sekian untuk Covid tahun 2021. Prinsip kami menyetujui dan bisa kita sahkan dalam raker hari ini.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini perlu saya ingatkan rapat sebetulnya kita sepakati cuman sampai jam 3 ini sudah jam 3.15 jadi harus kita perpanjang dan mungkin kita perpanjang dulu sampai jam 4 nah saya mohon kepada teman-teman karena daftar ini masih lumayan panjang

KEPALA BKPM:

Pimpinan – pimpinan boleh ijin Pimpinan boleh minta waktu 1 menit saja biar tidak terjadi pengertian yang yang bias terkait dengan investasi 1 menit aja biar saya yang meluruskan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan

KEPALA BKPM:

Izin.

Terima kasih.

Pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPR yang saya hormati,

Saya pertama terima dari Pak Mukhtarudin dan beberapa Bapak-bapak sebelumnya. Kita tahu semua saya meluruskan ini aja dikit biar kita persepsinya sama. Kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional kita dari sektor investasi itu 30% konsumsinya itu kurang lebih sekitar hampir 60% selebihnya yang sektor yang lain. Di dalam investasi *item*-nya itu ada 4 : satu dari Sektor Keuangan, yang kedua dari Hulu Migas, yang ketiga adalah Sektor Pemerintah, dan yang keempat adalah Sektor Investasi Langsung. Sektor investasi langsung itu berbicara tentang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

BKPM dalam kewenangannya berdasarkan undang-undang dan ruang lingkup kerjanya hanya masuk pada investasi langsung. Jadi biar kita salah satu satu satu persepsi. Jadi sektor keuangan bukan merupakan domain BKPM, satu itu turun sektor keuangan hulu migas itu turun sektor Pemerintah kan kita lakukan *refocusing* terhadap anggaran-anggaran investasi Pemerintah juga itu berpotensi juga.

Yang BKPM sajikan ini adalah realisasi investasi real dan saya dapat mempertanggungjawabkan berdasarkan project dan sekaligus, mohon maaf ya biar kita tidak salah interpretasi, tidak bermaksud apa-apa nih. Total total *project-nya* itu seribu seratus lima puluh tiga, tiga ratus empat puluh sembilan project, *audit* ini bisa *audit project-nya* di mana, saja nama perusahaannya apa aja bisa *audit* dan ini bukan investasi komitmen, bukan yang berkomitmen melakukan investasi tapi BKPM mencatat berdasarkan LKPM laporan yang dilakukan oleh masing-masing pengusaha yang menyampaikan kepada BKPM dan BKPM melakukan verifikasi.

Kedua, jumlah tenaga kerja 1.126.361 hasil dari investasi 826,3 triliun tersebut *real* bisa di cek verifikasi juga perusahaannya. Dengan kata lain bahwa apa yang disampaikan oleh BKPM dengan data yang ada itu adalah data yang bukan komitmen tapi *real*. Sekali lagi kalau ada kemudian pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan 0,9 sampai masih *minus* 2 dan itu *automatically* juga ada pertumbuhan realisasi investasi kita masih minus tetapi jangan dilihat dari aspek ini tetapi dilihat dari 4 poin ya itu lihat dari

sektor keuangan, sektor Pemerintah dan hulu migas. saya pikir itu sekedar-sekedar

F-PG (NUSRON WAHID):

Bisa diinterupsi Ketua ? atau nanti aja sekalian

KETUA RAPAT:

Ga pa pa sekarang aja biar.

F-PG (NUSRON WAHID):

Begini Pak Menteri, penjelasan Pak Menteri di halaman 9 kan YOY Januari-Desember itu angka realisasi investasi naik 2,1%. Penjelasan Menteri Keuangan pada report pertumbuhan ekonomi investasi itu minus 4%. Yang namanya investasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu adalah PMBT/Penambahan Modal Bruto tetap. Yang namanya penambahan modal bruto tetap itu semua dan investasi langsung bukan investasi sektor ini sektor itu termasuk *government spending* seperti yang asumsi disampaikan oleh Saudara Kepala BKPM.

Jadi anggap saja ini angka yang memang menurut saya tadi begitu saya baca ini angka yang menurut saya *incredible* angka ini, kenapa? Antar Pemerintah angkanya tidak sama. Dulu zaman saya kuliah tentang statistik kami tidak diajari tentang bagaimana menyajikan angka tapi kita diajari adalah bagaimana caranya membaca angka, angka itu harus *credible*. Saya kan staf Bapak itu orang IPB statistik banyak. Jadi ini masalah problem pada penyajian angka statistik yang itu berbeda dengan yang disampaikan Menteri Keuangan ya kan, entah ini salah kutip nya di Menteri Keuangan atau salah kutipnya ada di BKPM.

Nah kalau karena kita agregat makro kita melihatnya ada di Kementerian Keuangan soal masalah ini. Tadi saya semula itu menyadarkan Saudara tidak menyampaikan realisasi tahun 2019, hanya menyajikan bahwa tahun ini raih target 817 realisasi 826 tapi di sini ada YOY naik 2,1 harusnya kalau YOY kalo naik 2,1 ekonomi kita nggak *minus*, *min* 2% karena investasinya tumbuh. Nah ini masalah penyajian statistic. Tolong jangan sampai angka itu disulap sehingga kelihatan tidak *credible*. Jadi menurut saya angka *incredible*, kenapa? Karena nggak sinkron antara data BKPM dengan angka data dari Menteri Keuangan. Tentunya kalau saya pribadi saya lebih percaya data Menteri Keuangan, kenapa? Karena *related to* dengan berbagai lembaga-lembaga Bank Dunia macam-macam tentang semua siklus yang ada.

Demikian Pak.

Terima kasih.

KEPALA BKPM:

Pimpinan Boleh saya

KETUA RAPAT:

Silakan Pak

KEPALA BKPM:

Ini sedikit memang asyik memang kalau senior sama junior dalam menyampaikan pandangannya itu bagus sekali. Mungkin saya akan bisa sekolah ulang tetapi PMTB itu luruskan Ibu Sestama, di dalamnya itu adalah 4 poin, biar saya sekolah ulang nih PMTB itu, itulah gabungan investasi langsung tapi ada 4 poin : sektor keuangan, hulu migas, sektor Pemerintah dan investasi langsung yang dilakukan khusus untuk PMA dan PMDN

ANGGOTA:

Investasi konsumen

KEPALA BKPM:

Ya investasi Konsumen bagian dari pada yang Pemerintah nantinya Pak. Nah yang BKPM lakukan sekali lagi bahwa khusus mencatat investasi langsung untuk PMA dan PMDN minus 3-nya yang lain. Menteri Keuangan dalam konteks mengukur berapa pertumbuhan investasi secara makro itu adalah akumulasi dari empat poin tersebut. Dengan demikian saya katakan mau dibawa ke pengadilan manapun data BKPM. Saya sebagai Kepala BKPM akan siap untuk mempertanggungjawabkan kredibilitas institusi BKPM yang lakukan.

F-PG (NUSRON WAHID):

Urusan itu ga usah dibawa ke pengadilan, Pak Ketua. Angka itu masalah kepercayaan. Jadi kalau angka ini tidak sinkron, ga kredible nanti orang itu tidak percaya sendiri otomatis. Dan kalau angka itu yang Pemerintah itu tidak menyajikan angka yang kredibel yang *impact* menghukum itu market ya itu aja *problem*-nya. Kalau nanti ternyata angka ini salah ya nanti *market* nggak percaya gitu aja karena angka ini penting. Nah ini tolong kita dudukkan perkara ini dengan masalah karena saya yakin kalau angka ini gede tumbuh investasi langsung Pak ekonomi kita ga minus sebetulnya

KEPALA BKPM:

Pimpinan izin Pimpinan.

Saya setuju sama Pak Nusron yang saya hormati karena beliau sebagai mantan sebagai senior. Saya, kita lihat grafik pertumbuhan *item line*, pertumbuhan investasi di sektor keuangan tumbuh atau tidak? Coba cek di situ sektor Pemerintah tumbuh atau tidak? Hulu migas itu pasti turun. Saya pikir hulu migas juga bisa dicek kan itu mitra kerja mungkin mohon maaf Komisi VI atau tidak. Nah PMTB minus itu akumulasi. Dari keempat itu diakumulasikan dihitung rata-rata itu pasti turun karena sektor riil itu turun.

Jadi saya tidak menyalahkan angka Kementerian Keuangan yang menyatakan minus *no* karena itu akumulasi tapi khusus untuk BKPM itu saya katakan bahwa industrialisasi *real*.

Itu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik saya rasa itu cukup ya itu nanti

KEPALA BKPM:

Pimpinan biar-biar kita, siap.

KETUA RAPAT:

Ini dapat diselesaikan dengan mudah ini dapat diselesaikan dengan mudah mungkin kita minta ke Pak Bahlil nanti untuk menyajikan angka-angka itu menjadi salah satu pertanyaan kita agar.

KEPALA BKPM:

Pimpinan-pimpinan mungkin alangkah lebih bijaknya juga ada Kepala BKPM senior untuk menyampaikan apakah benar yang dimaksud dengan investasi PMTB itu 4 *point* yang saya sampaikan tadi atau ilmu saya kurang. Kalau diizinkan saya persilahkan kepada Menteri Perdagangan

KETUA RAPAT:

Setengah menit Pak Kepala BKPM Senior

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Jadi begini Pimpinan.

Jadi nilainya kan kalau kita lihat GDP kita itu kan Kak Rafli 1 triliun dollar. Jadi kalau kita lihat komposisi daripada GDP kita itu, *consumption* itu kira-kira *public consumption* itu kira-kira 57% tahun ini. Kemudian PMTB itu mustinya 33%. Kemudian konsumsi masyarakat *public public expenditure*

government expenditure 9%, konsumsi 57% investasi PMTB di situ 33%, ekspor impor 34%.

Jadi kalau kita ngomong 33% dari 1 triliun dollar gitu kan kira-kira USD 330 miliar gitu kan 3 kira-kira 3 sampai, nggak-enggak dong ya 3000-4000 triliun. Yang dibicarakan oleh Kepala BKPM itu kira-kira 50 billion dollar. Jadi konsisten angkanya yang Pak Kepala BKPM katakan. Jadi PMTB-nya BKPM itu mungkin hanya seperempat daripada investasi langsung karena investasi PMTB itu termasuk konsumsi masyarakat untuk *non perishable goods* misalnya seperti perumahan itu juga termasuk di dalam situ. Jadi memang investasinya besar yang dilayani oleh BKPM itu hanya seperempat atau sepertiga dari pada peta PMTB.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Tapi tadi maaf ya matematik Bapak agak lucu juga ya 57%, 33%, 9% dan kemudian 30% sekian itu menjadi 130 sekian persen. Apa yang *overlapping* itu apa ?

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Ekspor dan impor

KETUA RAPAT:

Oke.

Ekspor dan impor itu overlapping dengan yang mana Pak?

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Jadi komposisinya itu mestinya begitu. Nah ini yang yang di yang yang PMTB sekarang ini kira-kira 33%,34% dari GDP. Jadi gini Pak ini angkanya berubah-ubah teruskan karena 57%, 30% itu angkanya berubah-ubah terus tetapi kira-kira komposisinya begitu sekarang. Artinya mungkin hari ini komposisi dari pada PMTB itu mungkin turun di bawah 30%.

F-DPIP (DARMADI DURIANTO):

Jadi kesimpulannya ini kan mau menjelaskan bahwa itu lho rumus itu lho Pak Bahli $Y = C + E + Q + X \text{ min } M$ itu gitu.

KETUA RAPAT:

Oke ini kita berikan

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Ini dia angkanya. Jadi konsumsinya 57,13, belanja Pemerintah 9,6, investasi 31,12, ekspor impor hari ini hanya 15,3%. Investasi itu PMTB tadi itu

F-PG (NUSRON WAHID):

Tidak termasuk *government spending* kan?

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Tidak termasuk , tapi investasi

F-PG (NUSRON WAHID):

Lah kenapa Pak Bahlil mengatakan bahwa *government spending* sebagian dari PMTB

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Bukan-bukan *government spending*, itu sendiri

F-PG (NUSRON WAHID):

Sendiri kan.

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Itu *government spending* itu adalah APBN.

F-PG (NUSRON WAHID):

Betul saya setuju, saya setuju kalau memang penjelasannya angkanya yang ini hanya *direct investment* sementara *indirect investment* yang kapital market dunia keuangan itu tidak melalui tidak dimasukkan dalam komponen ini tetapi hampir semua lembaga investasi dengan menggunakan instrumen itu Pak yang kita perlu cek juga intinya meskipun menurut kamu data ini *real* tapi saya aku itu saja.

KEPALA BKPM:

Baik, Pimpinan.

Saya pikir bisa kita masuk pada ruang yang lain khusus ini persoalan perdebatan senior junior yang diselesaikan dengan baik.

KETUA RAPAT:

Oh iya itu asyik untuk ditonton bersama nanti.

KEPALA BKPM:

Iya tapi bahwa Pak Nusron sama saya sepaham bahwa PMTB tidak hanya pada konteks untuk investasi langsung PMA dan PMDN sektor keuangan, hulu migas juga merupakan bagian kita koreksi mungkin.

F-PG (NUSRON WAHID):

Tapi tapi realisasi hulu migas udah satu pintu di tempat BKPM juga kan?

KEPALA BKPM:

Belum-belum ga belum

F-PG (NUSRON WAHID):

Belum ya itu

KEPALA BKPM:

Belum

F-PG (NUSRON WAHID):

Jadi itu di SKH migas

KEPALA BKPM:

Itu (*suara tidak jelas*) migas

F-PG (NUSRON WAHID):

Hasil ini kemaren yang cipta kerja belum masuk juga.

KEPALA BKPM:

(suara tidak jelas) baru diteken kemarin Pak

F-PG (NUSRON WAHID):

Oh baru mau akan? Oh

KEPALA BKPM:

Itu yang baru mau saya sampaikan polis setengah kamarnya di situ supaya satu kamar penuh. Tapi gak pa pa ini juga bagus dalam rangka membangun *transparasi* dan *kredibilitas* data yang disajikan.

Terima kasih.

Sekian

F-PG (NUSRON WAHID):

Saya agak penasaran saja ditengah-tengah semu, kok bisa dalam situasi seperti ini dunia seperti ini kok investasi langsung tumbuh 2,1% makanya saya agak ragu. Kalau ada pertumbuhan investasi langsung 2,1% saya yakin nggak ada kontraksi karena dampak investasi itu kalau kita buat regresi maaf terpaksa kita ngomong seperti ini *impact*-nya kan jauh lebih 4 kali lipat daripada dengan investasi tidak langsung.

KEPALA BKPM:

Pimpinan biar tidak miss lagi nih Pimpinan.

Tadi di awal pengantar saya menyampaikan bahwa kita mempunyai cadangan investasi mangkrak 708 triliun. 708 triliun itu kita mengeksekusi di tahun 2020, 474 triliun itulah jawaban kenapa investasi kita tidak terlalu anjlok. Gak Pimpinan

KETUA RAPAT:

Justru saya kepengen tanya juga tadi sebutulnya nih jadi mau nahan diri mau tanya tapi tabungan investasi mangkrak itu saya lihat ada contoh-contohnya beberapa di dalam sini. Ini ada juga yang sudah bertahun-tahun di dalam situ. Nah apakah pernah tercatat sebelumnya atau tidak bagaimana pencatatannya di BKPM gimana.

KEPALA BKPM:

Ada-ada. Jadi contoh begini Pimpinan ya. Kayak katakanlah Hyundai Pimpinan. Hyundai itu investasinya 21 triliun di Karawang. Dia mulai kami tandatangani MoU itu bulan November 2019 di Korea. Itu sudah 4 tahun Pimpinan ga jalan-jalan karena persoalan tanah dan beberapa insentif yang diminta. Kemudian itu baru mulai jalan di Januari Januari Februari 2020. Realisasi di tahun berjalan itulah disebut dihitung sebagai bagian yang realisasi tapi itu belum semuanya. 2021 itu ada lagi karena belum total 21 triliun. Yang dicatat adalah berapa yang diserap di tahun itu, itulah dicatat sisanya di-over lagi ke tahun berikutnya begitu Pimpinan sebagai contoh kecil aja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ok nah ini kita kasian ga fair teman-teman yang masih ngantri tapi kita persingkat ya Pak Andre, silakan.

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kirain masih lama.

Baik.

Terima kasih pimpinan yang baik hati kangen kita Pimpinan Bang Haikal udah lama gak ketemu, kangen dong udah lama ga keliatan.

ANGGOTA:

Atau pengen gantiin?

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Eenggaklah kita gantiin Pak Haikal kalau jadi menteri.

Menteri Perdagangan yang saya hormati,

Pak Kepala BKPM yang saya hormati,

Saya langsung aja beberapa hal yang menjadi apa namanya menjadi pertanyaan saya sebentar sudah lama ya hanya mengingatkan supaya ini jadi catatan dan bisa direalisasikan. Pertama tadi semua bicara soal mobil listrik kita bicara soal baterai lalu kita juga sudah mendengarkan presentasi pak Bahlil, Pak Erick Thohir berapa saat yang lalu bahwa sudah datang ke Korea ke Jepang, Insyaa Allah kita akan bangun pabrik baterai dari konsorsium

BUMN. Saya rasa itu harus kita dukung dan bagus bahkan kita dengar Tesla udah diundang oleh presiden itu tapi mungkin belum datang tapi intinya ini luar biasa.

Nah tapi ada hal-hal yang mungkin sepele tapi penting bagi kita, satu mungkin untuk Pak Menteri Perdagangan bagaimana pengusaha Pak Bahlil tahu persis itu pengusaha Nikel lokal kita itu kalau menjual Nikel ke Morowali ke smelter-smelter Tiongkok itu ya itu tolong *surveyor*-nya itu ada *surveyor* yang diakui oleh Pemerintah yang terdaftar oleh Pemerintah gitu loh, kayak Sucofindo ya *surveyor* Indonesia.

Jangan sampai pengusaha kita pakai *surveyor* Indonesia, Sucofindo sudah masuk ke smelter Cina itu lalu dipakai *surveyor* yang tidak bersertifikat Indonesia lalu dia seenak perutnya bilang ini di bawah spek sehingga yang rugi pengusaha nasional kita.

Nah ini penting Pak ini yang berkuasa ini *surveyor* kita. Pemerintah kita *surveyor* atau dari Tiongkok itu yang semena-mena. Ini penting Pak Menteri Perdagangan ini tolong direalisasikan. Pasti dalam rapat ke depan saya tanya Pak Menteri Perdagangan diberesin ini atau tidak karena kasihan ini pengusaha Nikel kita. Teman-teman pak Bahlil semua itu pengusaha Nikel kita, itu satu karena itu satu.

Yang kedua, bagaimana kita menjaga marwah Pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan Harga Patokan Mineral/HPM tapi sekali lagi HPM ini di atas kertas doang gitu loh. Pemerintah kita gak punya wibawa untuk menerapkan harga HPM. Kasihan temen-temen Pak Bahlil juga gitu loh pengusaha-pengusaha Nikel itu yang tidak bisa mendapatkan harga yang layak. Padahal sebenarnya Pemerintah sudah menerbitkan peraturan menteri-nya di Kementerian ESDM.

Harapan saya tentu Pak Menteri Perdagangan bisa kalau perlu bikin tata niaganya supaya kita pastikan, kita menjadi tuan rumah di negara sendiri. Maka saya sudah bilang ke Pak Erick tolong BUMN kita segera bikin smelter yang besar sehingga pengusaha tambang Nikel kita bisa jual ke smelter BUMN kita dengan harga yang layak ya jangan sampai investor asing ini mengekeruk sumber daya alam kita mereka semena-mena terhadap bangsa kita, itu satu.

Lalu yang lalu kedua sesuai dengan pidato Pak Kepala BKPM 4 bulan yang lalu yang menagih saya makan malam, belum-belum ajak kita makan malam itu. Kita apresiasi Presiden dalam Ratas Februari 2020 bahwa sudah memutuskan berkat perjuangan kepala BKPM, Pak Menteri BUMN itu loh Pak Erick Thohir bahwa moratorium pembangunan pabrik semen sudah dilakukan. Betul Pak Kepala BKPM Februari 2020 Kalau tidak salah dalam Ratas Pak Kepala BKPM bilang itu di dalam forum ini.

KEPALA BKPM:

Ini betul permintaan Pak Andre waktu itu

F-P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Alhamdulillah memang Andre Rosiade anggota DPR RI yang berjuang, mengingatkan saja. Tapi Pak kita baca di berbagai berita ini lagi rame di Kutai Timur ya. Di Kutai Timur ada rencana pembangunan pabrik semen baru di Kutai Timur. Yang lagi rame bagaimana di situ disebutkan izinnya belum ada, tapi sudah melakukan izin *land clearing* ya, izin pemanfaatan kayunya. Mereka sudah *land clearing*, lalu izin tenaga kerjanya belum jelas tenaga kerja asing yang sudah, saya dengar itu ada Kobexindo atau apa tuh Hongshi itu terjadi Pak Bahlil.

Saya tidak tahu ya apakah izinnya sebelum Februari 2020 atau sesudah tapi saya ingin memberikan gambaran, saya dengar akan memproduksi 14.000.000 ton pabrik semen ini Pak Bahlil Pak Menteri Perdagangan saya ingin sampaikan produksi semen pabrik semen nasional kita hari ini 120 juta ton, 120 juta ton. Konsumsi kita sebelum Covid itu 70 sampai 75 juta ton ya kita sudah surplus sebesar 45 sampai 50 juta ton. Nah sekarang kita Covid otomatis konsumsi semen kita menurun. Jadi surplus kita mungkin 60 ton saat ini sampai 50-60 juta ton ditambah lagi 14 juta ton otomatis kita surplus bisa 64 atau 74 juta ton.

Nah kalau itu jalan itu pabrik, kemungkinan yang mati 4 pabrik nasional baru lama Semen Tonasa, Semen Bosowa punyanya ketum sebelum Pak Bahlil atau setelah Bang Lutfi ya lalu Semen Kupang sama Indosement Tarjun. Ada 4 pabrik yang bisa baik BUMN maupun swasta nasional yang akan In Syaa Allah meninggal dunia yang ada 14 juta ton baru. Nah saya tanya ini izin ya itu setelah ratas atau sebelum, itu pertama.

Kedua bagaimana ke depan kita bisa memastikan dan mengelola investasi baru ini tidak menghancurkan dunia usaha yang lama gitu loh itu. Pemerintah harus berani moratorium stop dulu kalau memang akan menghancurkan karena terus terang industri semen ini adalah industri strategis satu-satunya koreksi saya kalau salah yang masih Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Yang lain kita udah jadi penonton di negara sendiri ya hanya ini satu-satunya industri strategis yang kita menjadi tuan rumah di negara sendiri. Kalau kebijakan yang tidak pro akhirnya kita jadi penonton karena sekali lagi pengusaha semen Tiongkok itu memang diduga prakteknya di berbagai negara, dia melakukan praktek *predatory pricing* dulu itu sudah terbukti di KPPU kemarin dia jual murah kita bangkrut dia beli pabrik kita abis itu dia naikin harga dikerek, itulah modusnya di berbagai negara.

Nah sekarang Bapak-bapak sebagai pemangku putusan mau Indonesia kehilangan industri strategis satu-satunya yang kita jadi tuan rumah atau bagaimana tolong jadikan ini. Saya ingin jawabannya nanti dari Pak Kepala BKPM karena saya penasaran terus karena penting ini.

Lalu soal Pak Lutfi, Pak Mendag, abang saya ini. Saya ingin mengingatkan dulu menteri yang lalu saya juga sudah mengingatkan untuk revisi Permendag 7 Tahun 2018 soal impor semen *clinker* dan semen. Dulu Pak Sekjen, Dirjen dulu perdagangan sekarang sudah Sekjen In Syaa Allah ingin merealisasikan itu untuk kita revisi Permendag 7 Tahun 2018.

Ini memang sekarang tidak ada impor semen dan *clinker*, tapi saya takutkan Pak Lutfi setelah Pak Lutfi berhenti nanti impor semen dan *clinker* jalan lagi gitu karena dulu abis Pak Menteri Lutfi berhenti jadi Mendag, impor baja sampai itu 100 triliun per tahun, impor semen dan *clinker* dibuka. Nah maksud saya selagi Pak Lutfi sebagai Mendag tolong Permendag 7/2018 ini direvisi. Pastikan kita surplus 60 ton, kita tidak butuh lagi impor semen dan *clinker* kalau masih ada peraturannya segera revisi, segera revisi itu harapan saya, nanti saya tanya lagi di rapat selanjutnya.

Lalu terakhir soal tadi Tante Evita bilang *over-the-top* tante, peraturan *over-the-top* itu saya sudah bersuara ini bukan soal hanya sebatas apa apa namanya soal keamanan negara tapi juga rasa keadilan. Ini saya sudah disuarakan, saya sudah bicarakan ke Pak Menteri BUMN soal peraturan *over-the-top*.

Kita tahu Telkom setiap tahun diperintah oleh Presiden dan Menteri BUMN untuk investasi lanjut terus. Tapi faktanya perusahaan-perusahaan seperti Netflix, Netflix itu yang menghabiskan bandwidth Telkom itu sampai 90% lebih sehingga internet anak sekolah itu lelet ya internet orang protes kok internet lelet karena itu semua orang banyak nonton Netflix.

Nah perusahaan-perusahaan seperti Netflix ini tidak bayar kepada Telkom mereka memanfaatkan *bandwith*. Nah makanya *over-the-top* ini penting. Saya harapkan Pak Kepala BKPM dapat bicara juga sama Pak MenkoInfo supaya ini dibuat *over-the-top* ini untuk kepastian jangan sampai Telkom investasi bandwidth triliunan tiap tahun tapi dibuka itu keran bandwidth-nya tiba-tiba Netflix masukin program lagi habis itu, akhirnya internet kita lelet Nah harapan kita tentu *over-the-top* itu jelas sehingga dia memanfaatkan jaringan bandwidth kita, dia harus bayar kepada kita sehingga pembayaran itu bisa untuk investasi lagi.

Mungkin itu saja sekali lagi selamat bertugas Pak Mendag. Saya lagi lagi Pak Bahlil kita apresiasi ya Pak Bahlil luar biasa bisa meyakinkan Pak Jokowi. Jadi Gus Nusron, saya menyaksikan perjalanan hidup Kepala BKPM ya dari yang enggak mungkin dibikin mungkin sama dia, yang pasti kalah itu bikin menang sama dia. Itu sejarah hidup Bahlil. Jadi yakin saya bahwa data yang disampaikan kepala BKPM itu *real* dan saya harapkan itu betul *real* In Syaa Allah Indonesia bisa bangkit keluar dari krisis ekonomi karena saya sudah menyaksikan langsung perjalanan beliau di kota Bandung dan di kota Bogor ya enggak mungkinlah pasti kalah gitu dan dia bisa menang. Itu hebatnya Bahlil.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, ada yang sudah meninggalkan ruangan enggak jadi nanya kelihatannya. Silakan Pak Mufti

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Terima kasih Pimpinan atas kesempatan yang telah diberikan.

Pertama tentu untuk Pak Menteri Bahlil, kami sangat kami sangat mengapresiasi Pak atas kerja keras panjenengan di tengah pandemi Covid 19 yang tidak mudah. Kita hadapi mampu merealisasikan investasi 826,3 triliun Pak Bahlil ya, yang jauh meningkat dibanding 2019 yaitu 800,9 triliun. Pak Nusron mohon izin Pak Nusron saya lama bergaul dengan Pak Menteri Bahlil saya seperti sekarang ini juga karena tempaan beliau. Saya tahu beliau besar karena integritasnya sehingga kami yakin kami percaya atas angka-angka ini Pak begitu ya. Dan kedua tentu apa namanya di tengah pandemi ini juga bangsa kita ini sebenarnya bangsa besar. Yang membuat bangsa kita merasa tidak besar adalah karena ya kita banyak muncul pesimisme di tengah-tengah masyarakat. Maka kita penting di tengah pandemi ini sebenarnya satu-satunya cara adalah membangun optimisme. Kalau kita saja sudah tidak optimis yang duduk di kursi ini tidak optimis bagaimana rakyat kita di bawah begitu Pak. Tapi tentu apa yang Pak Menteri hadirkan, Pak Menteri hadirkan realisasi investasi yang cukup besar itu tidak mudah dan ini menjadi harapan yang besar untuk masyarakat kita yang mereka sudah mulai apa putus asa sehingga sekarang mulai ada apa namanya kepercayaan untuk bagaimana membangun usaha lagi di tengah situasi ini Pak.

Nah kami berharap ke depan di tengah apa namanya hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja bisa lebih optimalkan lagi Pak Menteri ya. Kami juga mengapresiasi Pak Menteri Bahlil sudah mulai berpikir besar tentang bagaimana untuk menghadirkan investasi yang super besar Pak Menteri dari hulu ke hilir seperti apa namanya industri baterai itu sungguh luar biasa kalau dulu dari sektor per sektor tidak ada yang dari hulu ke hilir. Tentu ini kalau betul-betul berjalan Pak ini akan bisa menghadirkan in apa devisa untuk bangsa kita.

Kemudian yang ketiga Pak Menteri, kita harus menangkap momentum dari kudeta Myanmar Pak. Harapan kami ke depan ini bisa ditangkap peluang ini karena kami lihat kemarin beberapa berita internasional, kudeta Myanmar tidak cukup sebulan dua bulan, setahun 2 tahun Pak dan juga apa namanya menteri apa Presiden Amerika terus aja menyampaikan apa namanya kalau ini terus berlanjut dia kan mem-boycot ekonomi Myanmar. Nah harapan kami bisa ditangkap peluang ini untuk bagaimana investasi yang sudah masuk di sana dari Cina yang sudah berlokasi di Myanmar bisa di beralih Indonesia Pak. Ini kami baca juga nilainya tidak kecil, ada produk-produk internasional seperti HCN, pabrik koper, Samsonite, Adidas dan sebagai ada di Myanmar ini yang kami harap bisa dibawa ke Indonesia dengan waktu yang cepat karena akan tentu bisa membantu memulihkan perekonomian kita begitu.

Kemudian yang kedua Pak Menteri Lutfi, terima kasih selamat atas dilantiknya menjadi Menteri Perdagangan, senior kami di HIPMI. Kami cukup bangga Pak cukup senang Kementerian Perdagangan sekarang dipegang oleh benar-benar orang yang membidangnya Pak. Harapan kami sektor perdagangan bisa terus tumbuh dan berkembang ke depan tapi hati-hati Pak biasanya yang manis-manis itu bisa bikin diabetes.

Yang kedua Pak, Pak apa namanya Pak Lutfi, salah satu PR utama Kementerian Perdagangan adalah bagaimana kita meningkatkan ekspor Pak meski hari ini kita sebenarnya surplus tapi sebenarnya itu surplus yang semu karena ekspor kita sebenarnya turun impor karena impor kita juga sebenarnya juga apa namanya sedang loyo begitu. Nah, harapan kami, Pak ke depannya bisa dipercepat diberikan dilakukan apa akselerasi-akselerasi bagaimana izin ekspor, izin impor ini Pak terutama impor bahan baku Pak terutama untuk kebutuhan industri yang untuk kebutuhannya lagi-lagi adalah untuk ekspor itu dipercepat dipermudah Pak, agar bagaimana ini ke depan diciptakan digitalisasi di kemudian pedagang terhadap seluruh apa namanya aspek perizinan Pak.

Bagaimana bapak menghadirkan perizinan yang cepat, murah dan apa namanya agar kemudian bisa menumbuhkan apa namanya apa nama ekspor dan impor begitu Pak. Mungkin itu sedikit dari kami.

Kemudian selanjutnya, oh ya Pak kebiasaan di Kementerian Perdagangan selalu menjadi pemadam kebakaran. Jadi ketika inflasi ketika terjadi kenaikan bahan-bahan pokok baru berusaha diturunkan, Pak. Harapan kami sebentar lagi sudah puasa ini untuk bisa dilakukan pengendalian harga bahan pokok Pak. Saya yakin di tangan panjenengan Kementerian Perdagangan bisa jauh lebih optimal lagi.

Mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Lanjut kepada Pak Lamhot.

F-PG (LAMHOT SINAGA):

Baik terima kasih, Pak Ketua.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Kepala BKPM.

Menteri Perdagangan yang baru dan seluruh jajaran yang saya hormati.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama BKPM dulu nih. Apresiasi terhadap indikator-indikator yang positif dalam rangka kinerja investasi yang dilakukan oleh seluruh jajaran BKPM walaupun ada pro-kontra perdebatan data dan selainnya, saya kira semangat Pak Bahlil itu luar biasa. Hanya yang menjadi fokus pertanyaan saya adalah saya meyakini bahwa dari komitmen investasi yang diturunkan menjadi realisasi investasi dari waktu ke waktu harapan saya semakin naik

dan akhir-akhir ini saya lihat itu angka itu semakin naik walaupun Menteri Keuangan mengatakan berbeda. Namun kemudian dari seiring dengan naiknya realisasi investasi dari komitmen investasi itu harapan saya salah satu saya lihat dari KPI ke BKPM itu adalah penyebarannya inveksi di seluruh tadi Pak Hendrik sudah menegaskan soal ini bagaimana.

Saya lihat juga rasio antara Jawa dan luar Jawa itu masih terjadi ketimpangan Pak Bahlil ininya masih lebih besar di Jawa. Dalam rangka pandemi Covid dan penyebaran itu harapan kita terjadi di seluruh Indonesia khususnya di kawasan-kawasan ekonomi khusus yang sekarang ini banyak melambat investasinya karena memang terfokus di Jawa. Salah satu contoh misalnya Sei Mangke yang di tempat kami di Sumatera Utara, Pak Bahlil sampai saat ini belum ada realisasi investasi yang masuk di kawasan ini pada masa pandemi Covid ini. Maksudnya investasi ke kawasan Sei Mangkei ini sebagai yang tadinya direncanakan oleh Pemerintah sebagai pusat pengolahan sawit terbesar di dunia. Harapannya ini menjadi stimulan untuk membantu investasi akan ada perubahan struktur ekonomi di Daerah Sumatera Utara.

Nah ke depan harapan kami seiring dengan naiknya angka investasi itu penyebaran itu terjadi dan secara khusus nanti harapan kita bisa dipusatkan di kawasan-kawasan ekonomi yang bisa membangkitkan ekonomi kita secara keseluruhan. Nah, kemarin yang memang menjadi persoalan utama di Sei Mangkei itu adalah harga gas tapi kemarin tuh sudah ditemukan solusi oleh Pemerintah. Kemudian yang Sumatera Utara Pak Nusron Sumatera Utara ini ini kan proyek raksasa sebenarnya yang bisa kita bangkitkan di sana karena saat ini kan dunia luar itu tidak mau.

Memang kita maunya mereka kan kita ini gelondongan ekspor sawitnya tapi dengan adanya Sei Mangkei itu harapan kita seluruh industri turunan dari sawit itu bisa ada di republik ini. Nah, ini kaitanya juga dengan nanti terhadap neraca perdagangan antara di Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, bagaimana caranya harapan saya, Pak Bahlil bagaimana caranya dari naiknya realisasi investasi ini diarahkan terhadap kawasan-kawasan ekonomi di daerah-daerah yang bisa dengan cepat akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Khusus di tempat kami di Sumatera Utara, saya berharap di tahun 2021 ini ada investasi masuk di kawasan Sei Mangkei itu poinnya.

Lalu kemudian kedua adalah Kementerian Perdagangan. Selamat Pak Menteri sudah diamanatkan untuk mengemban tugas yang sangat berat. Saya bilang ini sangat berat khususnya perdagangan kita ini dari tahun ke tahun kita selalu bergelut masalah klasik di mana neraca perdagangan ini selalu defisit dan lain sebagainya. Apalagi di zaman pandemi Covid 19 ini tantangannya sangat luar biasa.

Nah maksudnya Pak Lutfi kembali di Kementerian Perdagangan ini adalah tantangan sangat luar biasa. Kemudian bagaimana Pemerintah sekarang sudah mencanangkan dengan ini ke soal antara ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan. Pemerintah sudah mencanangkan *food estate*. Yang menjadi kekhawatiran kami adalah saya juga sebelumnya sebelum Pak Lutfi jadi Mendag, saya selalu bertanya ke seluruh jajaran Kementerian

Perdagangan ini persoalannya banyak komunitas-komunitas kita hasil pertanian kita yang memang terjadi sebuah dikotomi yang akibat daripada disparitas harga yang impor lebih murah sementara komunitas dalam negeri lebih mahal dan juga kualitas.

Nah saya membutuhkan saya kira kita membutuhkan sebuah strategi baru Pak bagaimana komunitas-komunitas lokal kita ini mampu bersaing dengan impor sehingga itu tidak menjadi halangan terhadap para petani-petani kita. Salah satu contoh misalnya Pemerintah sekarang sudah mencanangkan beberapa komunitas melalui program strategis nasional yaitu *food estate* dengan berbagai komunitas. Seperti di tempat kami misalnya bawang putih lagi dikejar Pak Lutfi dan ini kami sedang masalah terus ini masalah bawang putih.

Pertanyaan saya adalah Kementerian Perdagangan harus punya strategi menjadi *off taker* dari seluruh komunitas yang hasil dari pada *food estate* ini. Apakah Kementerian Perdagangan sudah mempunyai strategi bagaimana hasil-hasil komunitas daripada *food estate* ini nantinya yang bisa mengendalikan, bisa mampu mereka bersaing dengan impor. Ini sangat penting Pak kalau ga nanti stres Pak para petani kita itu. Gagal ini program *food estate* yang dicanangkan Pemerintah ini kalau kemudian mereka kalah bersaing dengan produk-produk impor di mana produk-produk impor ini banyak secara leluasa oleh Kementerian Perdagangan.

Nah ini yang mungkin nanti ke depan adalah bagaimana dari sekarang mumpung komunitas *food estate* ini masih dalam proses penanaman dan lain sebagainya. Salah satu contoh misalnya di Kalimantan Tengah itu prioritasnya adalah padi dalam rangka swasembada beras. Nah kalau kemudian nanti kita juga seperti pertanyaan Pak Daeng tadi kalau kemudian informasi ini lajunya tetap seperti yang sekarang maka sudah bisa dipastikan *food estate* yang tadi di Kalimantan Tengah itu akan gagal. Nah itu implikasinya sampai ke belakang nantinya akan membuat kita semakin sulit.

Nah, oleh karena itu punya saya berharap Kementerian Perdagangan di era Pak Lutfi ini menjadi bagian mensukseskan *food estate* dalam rangka komoditas-komoditas hasil *food estate* ini dijamin dan juga bisa di ini kan dalam rangka neraca perdagangan kita semakin lama semakin bisa seimbang antara impor dan ekspor tersebut.

Kembali lagi ke BKPM tadi Pak Bhalil. Saya lupa dalam rangka itu kita mungkin membutuhkan suatu dulu Pak Bahlil pernah ngomong ini menurut saya sangat baik ini bagaimana caranya itu kita punya *roadmap* investasi di masing-masing daerah kan dulu Pak Bahlil janji mau menyusun ini, misalnya di Aceh apa di Kalimantan apa dan lain sebagainya mau menyusun ini secara nasional.

Lalu kemudian mungkin ini yang kita sosialisasikan terkait kaitannya adalah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini Undang-Undang Cipta Kerja, berita baiknya hari ini 59 RPP sudah mau ditandatangani. Pertanyaan saya adalah ini karena Cipta Kerja ini kan pintu utamanya itu adalah BKPM, pintu utamanya adalah BKPM.

Nah pertanyaan saya adalah ketika nanti mudah-mudahan Cipta Kerja ini operasionalisasinya sampai kebawa bagaimana bisa jalan itu tentunya adalah BKPM. Oleh karena itu, yang paling pertama kali adalah *roadmap* investasi di masing-masing daerah itu. Kalau bisa diturunkan tidak hanya di provinsi sampai ke tingkat kabupaten kota. Oleh karena itu, mungkin Pak Bahlil perlu keliling seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia bagaimana menyusun *roadmap* investasi daerah ini. Dulu Pak Bahlil mengatakan kepada kita di forum RDP Komisi VI ini bahwa akan menyusun dalam waktu dekat *roadmap* investasi di daerah.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Jadi Pak Nusron tolong masih tolong singkat

F-PG (NUSRON WAHID):

Makasih, Pak.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang pertama untuk Pak Bhalil sama Pak Lutfi senior saya ini yang jadi rebutan banyak partai akhirnya singgah ke PKB. Andai Demokrat diminta Pak Lutfi mungkin ga ada kudeta. Soal industri kelanjutan industri gula dan masa depan ekosistem gula nasional, harusnya ada Menteri Perindustrian tapi karena rapatnya terpisah maka saya sampaikan. Dari Pak Bahlil dulu dari hulunya dulu, dari prestasinya saya memulai.

Berdasarkan Permen Perind Nomor 10 Tahun 2017 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2017 PKBM itu dikasih kewenangan untuk melakukan uji petik maupun audit investasi yang itu berkaitan dengan prasyarat pendirian pabrik gula rafinasi yang terkait dengan bahan baku. Di dalam Permen itu dijelaskan bahwa pabrik rafinasi wajib menyerap atau pun mempunyai lahan atau pun bekerjasama dengan petani tebu minimal 20% baru yang bersangkutan itu mendapatkan hak untuk *import raw sugar* kemudian memprosesnya menjadi *refined sugar* yang dijual ke industri makanan dan minuman dan beberapa pabrik lainnya malah mendapatkan bonus untuk impor *raw sugar* untuk atas nama operasi pasar yang dijual ke konsumsi masyarakat di luar industri mamin, ini konstruksinya.

Saya melihat di lapangan hampir tidak ada pabrik gula rafinasi tersebut yang mempunyai binaan petani tebu sendiri atau punya lahan sendiri baik itu lahan beli mau itu HGU maupun itu adalah punya milik pribadi SHM maupun HGU, hampir saya tidak menemukan itu khususnya yang di Pulau Jawa. Kalau yang di luar Jawa mungkin. Yang ada adalah perang harga binaan petani tebu PTPN grup dibajak oleh gula rafinasi diiming-imingi dengan harga yang lebih baik karena memang mesinnya baru tapi yang dibeli tidak

mencapai angka 20% tapi hanya akal-akalan mungkin hanya beli 100 atau 1.000 ton atau 2.000 ton kemudian mengajukan kapasitas impor 100.000 ton.

Harusnya kalau kapasitasnya mengajukan impor 100.000 ton dia menyerap petani tebu gula tebunya adalah 20%, 20.000 ton tapi faktanya tidak seperti itu di lapangan. Nah saya kalau memang Saudara Kepala BKPM ini karena meskipun saya dekat banget sama dia karena info resmi saya sampaikan sebagai saudara kalau senior lama di sini mungkin manggilnya adinda dulu ada Pak Azwir Dainyara manggilnya tuh adinda itu kapan instrumen kewenangan yang Saudara miliki itu digunakan untuk mengaudit investasi berbasis bahan baku tersebut tahun Nomor 10 Tahun 2017. Yang ada justru sebaliknya hari ini para pendahulunya Pak Lutfi memberikan bonus fasilitas kepada teman-teman Pabrik Gula Rafinasi tersebut untuk impor *raw sugar* yang kemudian diproses menjadi *refined sugar* yang dikonsumsi untuk umum alasan untuk *buffer stock*. Sementara PTPN *group* yang dia itu menyerap gula petani petani tebu justru malah tidak dikasih kesempatan untuk *import raw sugar*.

Jadi ini salah kaprah, bagaimana kemudian petani tebu berdaulat, kita berdaulat akhirnya PTPN-nya rugi, swastanya bergelimang untung, kenapa? Karena nggak adil di sini. Ga adilnya kenapa? PTPN yang itu mengampu tebu petani nggak dapat fasilitas sementara temen-temen pabrik gula rafinasi yang baru-baru ini yang tidak menanam tebu tidak mengampu petani. Justru malah mendapatkan fasilitas double.

Fasilitas pertama adalah manipulasi angka untuk mendapatkan impor *raw sugar* untuk kepentingan industri yang fasilitas kedua adalah bonus atas nama untuk operasi pasar. Ini kan ga *fair* situasi kalau seperti ini akhirnya PTPN rugi sampai sekarang, pabrik-pabriknya mati, di Dapilnya Pak Aryo Bimo ada dua pabrik mati Gondang sama mana lagi Pak Bimo Tasikmadu malah dibuat museum gedung pertemuan sekarang terus dibuat *rest area* pabrik gulanya kan akibat kesalahan seperti ini terus-menerus.

Nah karena itu saya minta mumpung ini ada semangat baru ya kan Pak Menteri Perdagangan ini sangat paham dunia ini, saya punya harapan besar untuk kita restrukturisasi ekosistem industri gula itu dari hulu sampai pada level hilirnya supaya apa supaya satu, konsumen tidak dirugikan harganya lebih murah, kedua petani nggak dirugikan, yang ketiga pabrik-pabrik gula punya negara yang itu mengampu petani tebu juga bisa survive tidak mudah dibiarkan mati tapi justru itu yang dikasih fasilitas adalah yang swasta. Ini yang pertama ingin saya tanyakan.

Yang kedua Pak Bahlil khusus, menurut data Bappenas setiap 1% angka pertumbuhan ekonomi tahun 2000 dari tahun 2019 termasuk sekarang itu mampu menyerap tenaga kerja maksimal 250.000 pekerja, Bappenas sumber BPS. Dari total investasi realisasi angka ini yang tadi saya mengatakan *incredible* 826,3 triliun di sini tertulis mampu menyerap angka investasi 1,156 juta orang ini sudah *ekuivalen* dengan 4,5 % pertumbuhan ekonomi daya serap tenaga kerjanya karena kalau setiap 1%, 250.000 tanyakan saja Bappenas sendiri, wong itu presentasi Bappenas. Ini saya jujur aja angka ini basis ngitungnya dari mana proxy, sensus atau pendataan atau *survei* atau *proxy* cara menghitungnya.

Harusnya nggak sampai segini kalau toh angka ini benar berarti PHK jauh lebih banyak karena logikanya minus pertumbuhan pasti enggak ada, berarti ada PHK gede-gede. Tapi instruksi Menteri Tenaga Kerja maupun Pemerintah selama pandemic Covid ini dan diminta pengusaha untuk komitmen tidak boleh ada PHK. Nah logikanya ada serapan tenaga kerja baru, logikanya ada pertumbuhan ekonomi dari aspek serapan tenaga kerja. Ini minus kok bisa ada tumbuh angka seperti ini basisnya dari mana ini cara menghitungnya?

Yang terakhir Pak Lutfi gagasan besar yang ingin saya sampaikan. Salah satu kanker ekonomi kita adalah inflasi meskipun hari ini angkanya masih sudah mulai agak turun di bawah 4% inflasi kita 1,62. Kita sama-sama tahu ada dua *variable* dalam inflasi *cost push* dan *demand pull*. Kalau *cost push* itu *rezimnya monete*, kalau *demand pull rezim-nya fiskal*, *ex officio* paling bertanggung jawab terhadap *rezim fiskal* inflasi adalah Menteri Perdagangan.

Dulu sebelum sebelum ada Pak Jokowi jadi Presiden inflasi itu tinggi kemudian masih ada inflasi tinggi pengaruhnya *demand pull* selalu menggunakan alasan domestik *connectivity* kita itu mahal. Kemudian antar pulau pedagang antar pulau tuh mahal.

Nah sekarang Pak Jokowi sudah ada tol laut pelabuhan dibangun di mana-mana, jalan tol di mana-mana. Nah sekarang adalah tinggal ekosistem perdagangan dalam negeri yang harus Bapak ciptakan supaya efisien sama suplainya supaya pengaruh dan kontribusi harus perdagangan dalam negeri ini yang itu menyangkut kemahalannya barang akibat bukan produk ongkos *cost* produknya yang mahal tapi akibat biaya transport-nya yang mahal itu dan domestik *connectivity* itu menjadi berkurang.

Kebijakan besar apa yang Bapak berikan kepada kita harapan baru kepada Pak Muhammad Lutfi Bin Firdaus Wajdi, kepada kita semua ini supaya kita mempunyai harapan baru sehingga ke depan inflasi yang dari *demand-pull* ini menjadi berkurang di sektor perdagangan Pak Firdaus Wajdi itu seniornya Pak Bahlil dan senior kita juga tokoh legendaris itu Pak, Pak Firdaus Wajdi itu kalau saya baca buku sejarah itu fotonya selalu ada apa itu Pak Firdaus Wajdi itu yang ikut menghadap Pak Presiden Soeharto tahun 66 itu.

Saya kira itu Pak 3 poin itu Pak.

Terima kasih Pak Bahlil semoga sukses.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .

KETUA RAPAT:

Salam balik.

Terima kasih kita sekarang sambung teman-teman *online* kita mudah-mudahan masih ada Pak Deddy

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH) :

Terima kasih Pimpinan

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Kedengaran suara saya Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Ya Pak Deddy baru Pak Ananta abis itu.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih Pimpinan. apa suara saya cukup jelas?

KETUA RAPAT:

Jelas.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Baik.

Terima kasih.

Yang pertama ke ketua BKPM nih kawan kita ini memang selalu asik didengar ya ya mudah-mudahan apa yang dipresentasikan tadi memang sesuatu yang *real* dan kita bangga dengan pencapaian seperti itu. Mudah-mudahan ke depan bisa dipertahankan. Saya hanya mengingatkan Pak bahwa yang namanya investasi itu adalah *trigger* bagi investasi dalam negeri. Jadi mohon jangan melulu hanya memperbanyak yang termasuk impor investor asing tanpa keterlibatan dari investor lokal kita karena orang lokal kita yang punya uang di luar negeri itu ribuan triliun Pak. Mudah-mudahan itu bisa diajak juga untuk *combine* ya. Itu yang pertama.

Yang kedua tadi informasinya bahwa penyebaran investasi sudah meluas sekarang malah banyak di Sulawesi dan di apa namanya Maluku Utara. Tetapi saya khawatir. Itu hanya membuktikan bahwa investor yang barunya tertarik pada industri ekstraktif karena pasti itu kebanyakan kan tambang dan smelter gitu. Sementara kita berharap sebenarnya bahwa hilirasi dan manufaktur kita tumbuh dengan demikian *ekspor* kita bisa digenjut ya. Itu yang saya ingin titip Pak Ketua Kepala BKPM

Nah kepada Pak Menteri Perdagangan Pak, saya sangat berharap supaya Kementerian Perdagangan benar-benar bisa menjadi katakanlah dirijen untuk mengorkestrasi ini antara sinergi antara apa namanya

Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kementerian Pertanian, BKPM dan lain yang terkait sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan satu ekosistem industri apa namanya perdagangan atau katakanlah ekonomi *real* yang baik buat kita. Nah saya ingin titip, ini nggak ada lagi Menteri Perdagangan ya Pimpinan? Oh ada ya.

Terima kasih Pak Lutfi salam kenal ya selamat juga. Saya ingin titip satu Pak dari Dapil saya Pak ini dari tahun 2018 kita sudah perjuangkan termasuk kepada Bea Cukai untuk menunjukkan Pelabuhan Tanuntaka di Kabupaten Nunukan menjadi pelabuhan ekspor produk tertentu Pak. Kalimantan Utara saya tahu memang di Tarakan sudah ditetapkan juga sebagai pelabuhan ekspor tetapi kalau di Nunukan itu bisa ditetapkan juga menjadi pelabuhan ekspor produk tertentu maka kecepatan aktivitas ekonomi akan menjadi lebih baik karena sangat dekat dengan Sabah dan juga dengan Filipina Pak juga sehingga tidak hanya transitmen yang kita bisa dorong tetapi juga untuk ekspornya, Pak.

Nah, itu kami sangat berharap dalam waktu dekat mungkin kami juga nanti mohon waktu Pak Menteri untuk menghadap supaya akseleratif pembangunan daerah perbatasan yang menjadi visi Pak Jokowi ini membangun Indonesia dari pinggiran benar-benar bisa dilaksanakan Pak. Jadi tahun 2018 sudah diajukan dan Bea Cukai juga sedang menunggu respon dari Kementerian Perdagangan.

Saya kira itu saja harapan saya Pak Menteri.

Pimpinan terima kasih atas waktunya

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Baik, lanjut Pak Ananta

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Terima kasih.

Pak Hekal.

Anggota Komisi VI.

Pak Menteri, Pak Bahlil.

Pak Menteri Lutffi selamat atas amanah yang diberikan Pak Presiden sebagai Mendag.

Yang pertama saya langsung saja ini persoalan anggaran bahwa anggaran tahun 2020 ini anggaran tentang pasar untuk khususnya untuk tipe D itu 55M. Kemudian karena Covid itu dipangkas menjadi separuh 2,5 miliar. Nah, saya hanya ingin menyambungkan aspirasi para nahdiyin maupun *marhaen* yang ada di Pasar Poris. Pasar Poris mengatakan bahwa karena

mendapatkan alokasi separuh sehingga pasar yang mestinya dibangun semuanya hanya dibangun oleh separuh karena hanya 2,5 miliar.

Lah yang menjadi persoalan Pasar Poris itu pedagangnya ada kira-kira 230 yang mendapatkan apa namanya kue pembangunan pasar ini hanya 100 hingga 130 ini akhirnya protes. Nah kemudian dari pihak pasar ini mengundang saya untuk menenangkan agar tidak terjadi apa namanya persoalan apa konflik apa namanya horizontal di antara mereka dan saya juga sudah memberikan penjelasan. Memang ini kondisinya sehingga kami menjanjikan agar itu nanti mestinya akan dibangun secara keseluruhan karena ini menjadi apa namanya menjadi denyut nadinya perekonomian di Kota Tangerang.

Kemudian yang kedua pada saat Pak Presiden datang di Kota Tangerang juga beliau ini kan senang datang ke pasar-pasar sehingga pada saat melihat Pasar Anyar itu apa namanya ya katakanlah memberikan harapan bahwa Pasar Anyar akan direvitalisasi sehingga dialokasikan 75 miliar. Nah kemudian dari APBD sudah memberikan pendampingan 60 miliar tapi karena Covid dipotong menjadi 45 miliar dan setelah itu saya nggak tahu kemudian sekarang ini hilang sehingga ini mesti harus dipikirkan oleh Kementerian Perdagangan. Kemudian lagi juga persoalan sepele mengenai kelangkaan-kelangkaan barang.

Kemarin di Tangerang Raya terjadi kelangkaan apa namanya daging sapi kemudian tidak ada tukang-tukang jual bakso, mandek dan sebagainya. Bulog tidak ada stok barang sementara perdagangan ketika kita mintai agar ini apa namanya menyelesaikan persoalan supaya negara hadir ini juga tidak tidak mampu memberikan solusi sehingga sampai demo itu apa capek sendiri kemudian sampai akhirnya normal kembali.

Kemudian ini juga keluhan Pak jadi saya hanya ingin menyampaikan keluhan-keluhan saja. Pada saat kami kira-kira Desember yang lalu melakukan kunker di Kalimantan Barat itu masyarakat perbatasan Entikong itu juga menyampaikan bahwa ada kesenjangan antara sebagai warga negara mereka dengan kota-kota lain apalagi kalau di dibandingkan dengan negara tetangga. *Border* yang dibangun oleh Pak Presiden 1 triliun itu hanya dipakai untuk foto saja sehingga kami berharap dari Menteri Perdagangan ini memberikan denyut di sana agar tidak terjadi kesenjangan.

Apalagi banyak perdagangan-perdagangan ilegal maupun apa nama penyelundupan-penyelundupan. Saya berharap Menteri Perdagangan sekarang ini membentuk gugus tugas khususlah setidaknya untuk daerah-daerah perdagangan perbatasan yaitu 3T yaitu terluar, tertinggal dan terdepan. Jadi ini saya berharap menteri yang dahulu sudah mau merespon kemudian kami tidak tahu apa Pak Menteri yang sekarang ini juga akan apa namanya memikirkan atau menyelesaikan solusi mengenai perdagangan-perdagangan di pintu-pintu perbatasan ini supaya bisa terjadi harapan kesenjangan kemudian kesejahteraan di daerah perbatasan ini bisa terselesaikan.

Kemudian yang terakhir untuk perdagangan kaitannya dengan ekspor impor. Ini banyak ekspor kita di Filipina kaitan dengan mobil itu di-*block*, kemudian sawit di-*block* di Swiss ya. Lah ini yang kemudian banyak negara-

negara menerapkan peraturan proteksi ya kan mereka terhadap produk-produk mereka. Kemudian kita bagaimana ini ya kan ini. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan agar ada kesetaraan.

Kemudian kalau kaitan dengan BKPM itu. Tadi Pak Nusron sudah menyampaikan kan tapi saya hanya ingin secara spesifik. Terus terang kami mengapresiasi karena mencapai lebih dari target yang di apa namanya yang sempat ditargetkan itu melebihi tadi kita mengapresiasilah apakah itu itu benar *real* atau tidak saya tidak mempersoalkan itu tetapi tetap kita berikan apresiasi. Tapi saya ingin sampaikan kaitannya dengan dengan manfaat kepada rakyat.

Jadi penambahan investasi itu berkaitan dengan yang betul-betul yang memberikan manfaat kepada padat karya sehingga padat karya dengan mengenai perguruan kita itu kira-kira berapa persen dan itu menyerap berapa ratus ribu berapa juta karena di Banten sekarang ini sudah ada 700 700.000 apa karyawan yang sekarang ini sudah apa namanya dirumahkan walaupun di PHK.

Yang terakhir kaitannya dengan BKPM gitu. BKPM kalau saya lihat kelihatannya sekarang mulai menggeser memprioritaskan yang kaitannya dalam negerilah kan karena juga kita juga tidak bisa berharap mengenai pemodal luar negeri karena sama-sama menghadapi Covid. Nah kemudian, supaya ini tumbuh investasi ini. Kira-kira insentif apa yang kira-kira Kepala BKPM ini berikan agar investasi dalam negeri ini bisa tumbuh.

Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Lihat siapa yang masih bertahan di video. Pak Toha, tapi kayaknya masih telepon. Pak Singgih.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Izin Pimpinan

KETUA RAPAT:

Oh udah?

F-PG (H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.):

Daftar, Pimpinan.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Pimpinan jangan lupa

KETUA RAPAT:

Oiya ada Ibu Melani juga ya Oke, Pak Toha dulu

ANGGOTA:

Pak Pimpinan

KETUA RAPAT:

Kemudian Pak Singgih baru Pak Abdul Hakim dan baru Bu Melani. Habis itu cukup ya.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota yang dihormati.

Pak Menteri Perdagangan, dan

Kepala BKPM dan jajarannya yang saya hormati.

Jajaran itu penting, Pak karena ketika bosnya itu kebijakan, teknisnya di jajarannya soalnya, kemudian

Semuanya yang hadir yang saya hormati.

Yang pertama ke Pak Menteri. Sedikit aja Pak Menteri sambil kenalan. Saya Muhammad Toha. Saya membaca mandat Presiden tadi Pak, bagus sekali. Jadi, *roadmap* nya Kementerian Perdagangan sebenarnya kan sudah *ceto* gitu, stabilis, stabilisasi harga membantu UKM, meningkatkan ekspor dan juga didukung sasaran strategisnya, meningkatkan ekspor dan menstabilkan harga.

Nah, ada 1 kasus mungkin kasus ini juga terjadi di beberapa komoditas. Kasusnya adalah komoditas mebel di Surakarta, di Dapil saya. Kebetulan itu temen-temennya Pak Jokowi juga sih, mebel. Pengusaha mebel itu pernah diundang oleh Pak Jokowi beserta dikumpulkan juga, ada Mendag, ada Menperin, ada pengusaha.

Tapi, Mendag yang dulu ya, yang sebelumnya. Kemudian, di secara teknis, secara ininya diserahkan kepada Mendag dan Kementerian Perindustrian. Nah, mohon nanti dicek lagi apa perintah Pak Jokowi itu, yang

jelas ada ada kesulitan. Saat ini, barang-barang komoditas, barang-barang mebel yang ekspor ini, ini tidak bisa ekspor. Padahal, pengusaha yang ada di Solo itu, itu adalah menampung kerajinan atau menampung hasil-hasil produksi dari UMKM atau UKM yang ada di sekitarnya.

Jadi sebenarnya, mereka sebagai tangan panjang UMK-UMK yang ada. Di Sukoharjo, Solo itu kan ada yang ada diserut rotan, ada jati, ada macam-macam, ada apa namanya anyaman-anyaman dan sebagainya. Nah itu sebenarnya udah komoditas ekspor sejak dulu, akan tapi sekarang menumpuk karena tidak bisa ekspor.

Saya tanya kepada salah seorang pengusaha katanya kapal dan kontainernya. Kontainernya ini sebenarnya dengan Menperin juga sebenarnya. Kontainer itu tidak ada, tidak tersedia karena sekarang, katanya diambil Cina semua kontainer-kontainer itu. Nah, saya mohon penjelasan agar saya bisa menjelaskan kepada mereka karena, ini juga aspirasi Dapil kami, nggak bisa menjual karena ada ini.

Kebetulan, saya juga bertemu dengan Sekjen INSA, Pak. Pak, kapal saya nggak bisa apa Pak, nggak bisa apa berlayar untuk membawa barang dari Indonesia ke luar negeri. Apa karena apa, Pak? Katanya juga, nggak ada kontainer. Nah, ini mungkin perlu perhatian serius dicari solusinya, agar mereka berdagangnya itu bisa. Sebagaimana sasaran strategis tadi. Peningkatan ekspor dan membantu UKM tadi, 2 hal itu sebenarnya yang paling penting.

Itu aja, Pak. Jadi untuk Kementerian Perdagangan itu aja. Dan mungkin gini, Pak. Punya kewenangan nggak Kemendag ini dalam hal apa ya mengatur, kewenangan mengatur volume ya. Mengatur volume kebutuhan, misalnya bahan pangan ya sebagaimana disampaikan temen-temen sebelumnya. Kita itu kebutuhan, misalnya daging itu sebulan berapa dan hasil produksi dalam negeri berapa, maka harus impor berapa. Jadi, perlu diperhitungkan sekali agar tidak terjadi kelangkaan atau *over over supply*. Ini juga mengganggu Pak, mengganggu para peternak. Kemarin kan, telur-telur juga kan juga pada dibuangin itu. Sebenarnya, kita juga menyesalkan juga dikasih kan fakir miskin, yatim piatu, sebenarnya masih banyak, kenapa dibuang begitu.

Lalu dulu, saya pernah pada Raker sebelumnya saya pernah minta inventarisasi atau daftar komoditas impor, itu apa saja. Mohon, nanti kalau dijawab dengan apa secara tertulis, kami mohon disebutkan itu, Pak. Saya pikir itu saja dari untuk Kementerian Perdagangan.

Kemudian, Pak Bahlil. Mainkan aja ini. Pak Bahlil,

KETUA RAPAT:

Pak Bahlilnya sedang di toilet kayaknya.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Oh, Pak Bahlil sedang di toilet. Mungkin, ada Bu Ariesta atau siapa itu.

KETUA RAPAT:

Ada Bu Sestamanya di sini, mencatat ya. Oke, silakan Pak.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Jadi gini, Pak Bahlil dan jajaran. Itu tadi kan di Deputi Pelayanan ada nggak itu, Pak Firdi atau Pak siapa itu. Deputi Pelayanan kemarin di pelayanan itu kan dananya cuman 9 miliar 420 kalau nggak salah. Tapi sekarang, meningkat 179 miliar. Apa kaitannya dengan apa namanya semua perizinan ini kan melalui KPM sekarang. Nah, saya minta inventaris perizinan apa saja yang melalui BKPM karena di pengusaha-pengusaha kecil UKM-UKM daerah masih bingung ini, harus ke Jakarta, harus sampai sana, harus berbiaya, harus rapid test, harus macam-macam. Itu mohon keterangannya. Tapi, saya acungi jempol, karena kalau dulu hanya 9 miliar, sekarang 179 miliar 963.724 itu, jadi itu.

Kemudian yang kedua, mohon terobosan Pak karena, perizinan sekarang itu masih konvensional. Jadi, ya nggak bisa di nggak bisa disederhanakan lagi, katanya ada Undang-Undang Cipta Kerja, tapi belum juga teraplikasi di daerah-daerah.

Contoh, perizinan untuk property itu aja. Saya sudah sampaikan berulang kali itu, itu izinnya banyak sekali dan pajaknya banyak sekali. Ada izin prinsip, ada izin lingkungan, ada lurah, ada camat, ada kabupaten, ada PPh, ada PPh, pengalihan hak, pajak jual beli, pengeringan, SLF sertifikat setelah bangunan jadi, *high plan*, IMB dan seterusnya. Itu mau usaha properti kecil-kecilan.

Mau jadi agen aja macam-macam, Pak. Pendirian, PWB, pengakuan usaha, SIUP, OSS, NIP, KBLI, rekening koran terakhir 3 bulan terakhir, surat macam-macam. Rekomendasi Dewan APTRI dan seterusnya. Jadi, mau usaha ini juga kesulitan. Padahal, BKPM ini kan lebih condong ke PMDN sekarang ini. Jadi, penanaman modal dalam negeri, PMA-nya. Kalau kita trennya ini, trennya PMA turun, trennya PMDN naik. Oleh karena itu, harus digenjut bener PMDN-nya dengan memberi kemudahan kepada para orang-orang yang mau berusaha.

Kemudian yang ketiga, saya minta tolong didorong kawasan-kawasan industri di daerah itu untuk investasinya. Jadi, investasi yang di pusat kalau bisa di-*share*, disebar ke daerah-daerah yang sudah ter SK kan sebagai kawasan industri di kabupaten kota maupun di provinsi. Itu permohonan kami.

Saya pikir itu Ketua dan terima kasih atas perhatiannya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumussalam.

Baik, Pak Singgih. Silakan, Pak Singgih.

F-PG (H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.):

Iya, Pak. Iya, Pak terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya langsung aja ke perdagangan, Pak. Jadi mungkin, saya menindak apa memperkuat aja dari Pak Nusron tadi. Jadi, untuk *transport* memang harus dipikirkan, Pak benar-bener. Jadi, karena harga jagung sekarang misalnya, sekarang harga jagung itu di Indonesia termahal di dunia dibandingkan dengan impor. Walaupun, kalau kita ngomong harga di tingkat peternak, di tingkat petani di mana di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi itu murah, Pak. Tapi, pas sampai Jawa harganya lebih mahal daripada impor dari Cina. Itu yang mungkin harus di dari Brazil mungkin. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan oleh Kemendag supaya apa bagaimana *transport* itu bisa menjadi murah sehingga, harga-harga barang produksi itu bisa lebih kompetitiflah intinya.

Yang kedua Pak, mungkin Pak Lutfi mungkin kita udah pernah kenal lama, Pak. Pak Lutfi itu membantu juga di perunggasan, Pak. Dulu 2014, jadi mungkin yang kedua Pak, mengenai kurang lebih mengenai harga kemarin yang tadi harga telur dan ayam jatuh, Pak. Nah, kemarin kita sudah diskusi. Kita mohon dukungan dari Kemendag supaya benar-bener harga yang ditetapkan oleh Kemendag kemarin seperti harga referensi itu, Pak bisa berjalan Pak. Atau memang bagaimana harga referensi itu bisa ditetapkan telur dan ayam di harga, harga referensi tapi harganya itu jarang di harga referensi itu. Kalau telur atau ayam juga referensi itu lebih sering daripada di atasnya Pak. Itu mungkin yang adi PR-nya Pak ataukah harga referensinya yang salah atau kah cara managemennya yang salah, sehingga harganya itu kalau di ayam tidak pernah tercapai, untuk ayamnya.

Yang ketiga, mungkin ada usulan Pak dari teman-teman ternak kemarin supaya harga itu apa tidak fluktuatif, itu kita memerlukan penyimpanan Pak untuk *cold storage*. Kita harapkan dari Kemendag bisa memfasilitasi untuk *cold storage* yang besar di sentra-sentra produksi, Pak. Misalnya, di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, Pak.

Jadi, Pemerintah membangun *cold storage*, nanti dikelola oleh pemda, jadi dari peternak nanti bisa sewa, Pak. Itu yang kemarin sebenarnya bisa kita obrolin dengan Pak Dirjen, Pak Dirjen Pak Syailendra. Tapi, datanya saya lihat dari tadi, dari apa anggaran tadi untuk *cold storage* kok belum ada, Pak. Mungkin, itu bisa di apa diutamakanlah, Pak. Kita coba yang besar dulu di Jawa Tengah atau di Jawa Timur, nanti yang ngelola pemda, kita bisa sewa, Pak. Itu mungkin.

Mungkin, itu dulu Pak dari saya Pak. Nanti mohon dukungannya untuk supaya stabilisasi harga ayam dan telur itu bisa benar-bener sesuai dengan

dengan harga yang direferensikan oleh Kemendag, Pak. Jangan sampai harganya itu di bawahnya, sehingga peternak-peternak juga kasihan.

Yang mungkin yang terakhir, Pak. Tadi untuk bahan-bahan impor tadi juga kemarin mengalami kenaikan yang sangat tinggi, terutama bahan baku untuk pakan. Mohon, segera bisa diatasi sehingga, harga bahan baku pakan yang impor itu bisa segera pulih kembali, stabil sehingga harga pakan yang kemarin naik dapat segera kembali ke harga normal.

Terima kasih, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, kita Mas Abdul Hakim.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan juga anggota Komisi VI yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual.

Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, salam kenal Pak.

Yang saya hormati Kepala BKPM, Bapak Bahlil dan juga seluruh jajaran yang hadir dalam kesempatan ini.

Saya ke Pak Lutfi dulu, ke Pak Menteri Perdagangan. Itu tadi sudah disinggung Pak terkait surplus yang mana kita selama 5 tahun terakhir ini belum pernah surplus neraca perdagangan, akan tetapi betul yang disampaikan oleh teman-teman. Bisa jadi itu merupakan surplus yang semu.

Nah sebenarnya dari kesempatan ini Pak itu ada apa namanya, ada kesempatan kita untuk tidak tergantung terhadap impor. Nah yang ingin saya pertanyakan, pertama Pak ke panjenengan. Respon dari Kementerian Perdagangan menanggapi fenomena ini seperti bagaimana? Kemudian yang kedua, sudah ada atau belum kaitan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian terkait produk substitusi impor karena ini menjadi momen, menjadi kesempatan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap impor. Kita tidak bisa menghilangkan keseluruhan Pak ya, tapi mudah-mudahan menjadi momen dan sudah sejauh mana koordianasi dengan Kementerian Perindustrian.

Kemudian yang ketiga, dari data neraca perdagangan ini, Pak Mendag. Itu kan impor hampir semua turun, tetapi ada satu item atau ada beberapa item itu yang mengalami lonjakan luar biasa. Contohnya, di produk buah-buahan dan sayur-sayuran itu justru melonjak. Padahal, kita ini kan nggak kalah Pak produksi dan kualitasnya terkait hal itu. Nah, tanggapan dari Kementerian Bapak seperti bagaimana.

Kemudian yang ke empat, kaitan dengan postur anggaran. Jadi, di sini melihat, ini cukup unik Pak postur anggarannya. Jadi, di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, itu serapan sebesar 97% akan tetapi di 2020 itu malah ada penurunan sebesar 36% atau setara dengan 500,2 sekian miliar, perdagangan dalam negeri. Padahal kita harus bisa menguatkan perdagangan dalam negeri Pak ya, akan tetapi untuk perdagangan luar negeri dan Dirjen Pengembangan Ekspor, itu untuk 2020 jika ditotal nilainya 200 hampir 285 miliar. Akan tetapi di 2021, itu nilainya melonjak menjadi 570,6 miliar. Ada begitu lonjakan luar biasa di apa di salah satu Dirjen di Kementerian Bapak khususnya memang berkaitan dengan produk luar negeri, maaf perdagangan dalam negeri dan juga ekspor.

Nah, jujur saja saya bingung Pak. Ini pertimbangannya alasannya kenapa dan mungkin nanti bisa dijelaskan, Pak sebenarnya target, sebenarnya target dari Kementerian Bapak berapa sih sebenarnya sih angka pastinya nilai ekspor yang ingin dicapai dengan anggaran yang cukup besar itu.

Kemudian yang kelima, terkait aspirasi di dapil, Pak. Kebetulan dapil saya ini, Jawa Timur 8 itu Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan Madiun. Itu di Jombang itu ada salah satu produk kopi terbaik di Indonesia, bukan arabika, bukan robusta, tapi namanya ekselsa, Pak. Nah, itu komoditi ekspor. Mungkin, nanti saya ingin pertanya-tanya atau mungkin berdiskusi dengan Bapak, gimana caranya mengembangkan apa komoditas di dapil saya ini biar bisa *go to* internasional. Itu untuk Pak Menteri Perdagangan.

Itu lanjut ke Kepala BKPM, Pak Bahlil. 10 besar negara asal investor di Indonesia masih didominasi oleh negara-negara dari Asia Timur atau partner-partner lama yang *image*-nya itu terkesan kurang ramah lingkungan, Pak Bahlil. Kemudian di sisi lain, banyak di dunia ini yang udah mulai mengalihkan industrinya yang ramah lingkungan.

Nah pertanyaannya, pertama. Sebenarnya, kendala apa yang dihadapi di BKPM untuk menghadirkan investor-investor dari negara yang ramah lingkungan atau bagaimana memproteksi terhadap investor itu yang peduli terhadap Indonesia. Saya bicara terkait ramah lingkungan. Tadi ada Bu Evita, ada Bang Andre yang terkait data atau informasi, itu yang pertama, Mas Bahlil.

Yang kedua, bagaimana *roadmap* dari BKPM menyongsong era industri yang ramah lingkungan. Kita sama-sama tahu baik Tesla dan Hyundai itu sudah berencana. Bahkan yang yang, kalau Hyundai kan *direct investment* dia memang langsung bikin pabrik, langsung nyerap tenaga. Nah, *roadmap* dari BKPM terhadap industri-industri yang ramah lingkungan ini seperti bagaimana.

Kemudian yang ketiga, target realisasi investasi 2021 yang ditampilkan BKPM 858,5. Sedang, saya baca di Bisnis Indonesia 26 Januari lalu, itu Pak Jokowi memintanya sebesar 900T, itu di Bisnis Indonesia itu gambarnya Mas Bahlil lagi bawa karung gede itu mas, saya masih ingat itu. Nah, strateginya dari Mas Bahlil seperti bagaimana Mas. Karena ini, saya yakin saya yakin dan optimis Mas Bahlil bisa, cuman saya ingin tahu rencananya sebesar apa, rencananya sejauh mana. Itu kami ingin tahu, karena fungsi pengawasan kami di situ, Mas.

Kemudian, yang terakhir adalah di 2020 100,1%. Nah, saya masih bingung Mas, itu 100,1% itu itu capaian dari investor baru murni 100,1% atau beberapa investasi-investasi mangkrak yang mungkin bisa berjalan di 2020. Itu yang kami ingin meminta datanya, Mas. Jadi, biar keliatan oh ternyata yang dari mangkrak terealisasi sekian, yang baru sekian, yang *direct investment* sekian, yang *indirect* sekian. Jadi, kita berdiskusi kita saling mengawasi enak, Mas di situ.

Sementara itu dulu Pimpinan dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Yang *online* sudah ya, oh Bu Melani. Yang terakhir nih *online* ya. Silakan, Bu.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI DPR RI.

Yang saya hormati Menteri Perdagangan dan Pak Wamen Perdagangan beserta jajarannya.

Yang saya hormati Kepala BKPM, Pak Bahlil beserta jajarannya.

Saya udah cepat saja. Mungkin menanyakan kepada Pak Menteri Perdagangan. Pertama-tama tentunya selamat atas tugas dan amanah yang diberikan kepada Pak Luthfi sebagai Menteri Perdagangan, selamat. Kita bertemu terakhir waktu Pak Luthfi menjadi Dubes di Jepang.

Nah saya, di sini hendak menanyakan unggulan yang diprioritaskan tentunya produk-produk Indonesia yang menjadi unggulan untuk meningkatkan ekspor nonmigas khususnya di sini saya membahas tentang yang perhiasan, karena yang sepanjang tahun 2020, ekspor perhiasan

Indonesia mengalami kenaikan 24,21% meskipun kita semua dilanda pandemi dengan total pemasukan sekitar USD 8,2 miliar. Saya rasa ini sangat penting kalau didorong, karena banyak melibatkan tentunya para UMKM dalam proses pengerjaannya.

Saya juga menanyakan bagaimana tentang ekspor perhiasan ini, karena negara-negara yang saya ketahui untuk mengekspor perhiasan yaitu, ke 37% ke Singapura, 30% ke Swis dan 12% ke Jepang juga 10% Hongkong dan 7% Amerika Serikat, juga Australia 4%. Bagaimana ke depannya dengan rencana pembukaan target ekspor dan negara-negara lainnya. Tetapi, saya menanyakan apakah Pak Menteri pernah menjadi Dubes di Jepang, apakah ekspor perhiasan Indonesia di sana benar-benar bisa meyakinkan atau bisa untuk menjadikan ekspor perhiasan Indonesia lebih diminati oleh masyarakat Jepang.

Kemudian, di sini juga saya tentunya bicara tentang konstituen saya yang termasuk orang-orang diaspora, karena dapil saya juga luar negeri. Pada waktu itu, pernah raker yang dengan menteri yang lalu. Pak Jerry, Wamen mengatakan bahwa komunikasi dengan ITPC dan para diaspora di luar negeri dengan adanya pandemi ini, mungkin secara *online* dan dengan zoom, itu lebih lebih bagus komunikasinya dan ini apakah akan diteruskan seperti ini, karena saya harapkan ITPC-ITPC yang dulu di luar negeri bisa diaktifkan dengan adanya apa namanya pandemi ini, mungkin mereka juga *work from home* lebih-lebih komunikasinya lebih lancar ya.

Jadi, kita nggak usah datang. Tetapi, dengan komunikasi melalui zoom atau *online* bisa juga mengangkat produk-produk kita di luar negeri, juga para diaspora apakah juga nantinya akan dilibatkan untuk meningkatkan promosi ataupun ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Mungkin untuk Pak Menteri Perdagangan itu.

Kemudian untuk Kepala BKPM, tentunya saya apresiasi dengan yang dicapai oleh Kepala BKPM yang lebih dari target. Dalam pemberitaan detik finance tanggal 25 Januari 2021, Pak Bahlil mengungkapkan 2 produsen baterai listrik raksasa yang akan berinvestasi di Indonesia yaitu: Tesla dan Eron, Tesla Eron dan juga BASP buatan Jerman yang nanti akan disusul oleh CATL yang dari Cina dan juga LG Change yang dari Korea Selatan. Saya mau nanyakan, instansi mereka itu mungkin lokasinya di daerah mana saja, ini saya belum mengetahui dan mudah-mudahan semuanya berlangsung dengan lancar sehingga, Indonesia menjadi kebanggaan untuk ada yang terealisasi perusahaan raksasa di Indonesia berinvestasi di Indonesia.

Mungkin, itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Mungkin, ini terakhir dari Anggota, Mas Muhammad Devi. Silakan.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati dan yang paling saya banggakan.

Kemudian dari mitra, Kementerian Perdagangan, Kepala BKPM, Abang Bahlil Kemudian Wakil Menteri Kemenag dan seluruh jajaran yang sempat hadir pada siang menjelang sore hari ini.

Saya ringan-ringan saja membahasnya, karena kebetulan tadi senior-senior sudah membahas yang lebih rinci. Kemudian juga, ini juga merupakan pertama kalinya saya masuk di Komisi VI yang sebelumnya saya berada di Komisi IX. Jadi oleh karena itu, saya membahas yang ringan-ringan saja.

Tentu kami mendukung penuh tugas sesuai mandat Pak Presiden kepada Menteri Perdagangan dan abang Kepala BKPM. Sesuai mandat Presiden soal solid, Pak sesolid Partai Demokrat, *In Syaa Allah*. Terkait dengan stabilitas harga membantu UKM dan meningkatkan ekspor. Setelah itu, setelah itu semua baru berjalan dengan baik agar kita bisa lebih fokus untuk lebih efektivitaskan dan efisienkan *value chain* ya atau rantai pasokan perdagangan kita.

Terkait masukan dengan pemanfaatan teknologi karena, itulah yang dibutuhkan masyarakat di masa pandemi seperti sekarang ini. Kita benar ingin perdagangan kita ini terus pulih, baik dengan dan meningkat karena hari ini banyak usaha-usaha kecil yang saat ini sudah mulai gulung tikar. Tidak hanya yang urusan-urusan ekspor, tapi yang skala UKM apalagi ultra mikro. Jadi, tolong Pak Menteri dan Kepala BKPM serius betul agar mereka semua tetap sehat dan produktif ekonominya khususnya di sisi perdagangan dan investasi. Kedua-duanya sama pentingnya.

Selanjutnya untuk Pak Menteri Perdagangan, ini terkait dengan program 2021, Pak. Saran saya Pak Menteri, semoga sudah dilakukan mengenai pembangunan dan revalidasi revitalisasi 119 unit pasar Tipe C atau D, Pak. Dengan masih adanya pandemi, maka sebaiknya kita desain pasar yang disesuaikan dengan prokes kesehatan, Pak. Tentu, tolong dilanjutkan koordinasi dengan Kementerian PUPR sehingga, mudah-mudahan dengan kita memberikan apa namanya pasar ini, bisa meningkatkan kita kewaspadaan kita terhadap Covid ini.

Kemudian selanjutnya, terkait dengan fenomena mengenai pengembangan SDM perdagangan. Di Jawa Timur, setelah viral karena kisah Pak Edi, mantan pemulung yang menjadi asal Madiun, Jawa Timur yang kini menjadi miliarder usaha budidaya porang suksesnya, Pak. Kemudian, petani berbondong-bondong, berbondong-bondong menanam umbi porang yang dikabarkan harganya sangat tinggi di ketika diekspor. Nah sekarang, banyak petani di Dapil Jatim 7 yang sudah mulai budidaya porang. Bingung kemudian hasil budi dayanya mereka ini mau dipasarkan ke mana, pasar ekspor masih terbuka lebar. Tetapi, petani ada bimbingan dalam penjualan hasil panen yang belum ada bimbingan. Itu saja Pimpinan.

Terakhir juga saya juga sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Sondang tadi terkait dengan materi yang disampaikan Pak Menteri terkait dengan realisasi anggaran 2020 ini. Saya belum mendengar progres-progres ke depannya Pak Menteri karena, Pak Menteri juga baru di Kementerian Menteri Perdagangan ini. Saya mau dengar progres ke depan Pak Menteri mau dibawa ke mana Kementerian Perdagangan ini.

Mungkin, itu saja Pimpinan.

Terima kasih banyak.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, ini dari Anggota sudah semua. Mungkin dari Pimpinan sebelum kita beri kesempatan. Tolong jangan lama-lama, Pak ya. Silakan, Pak Aryo Bimo.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan kawan-kawan Anggota Komisi VI yang ada serat fisik maupun secara virtual.

Yang saya hormati Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM beserta seluruh jajarannya.

Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan selamat buat Pak Lutfi yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kebetulan dulu sebagai mitra Komisi VI, waktu itu sebagai Kepala BKPM.

Terkait dengan keinginan kita tentunya Komisi VI ingin meninggalkan *legacy*, Pak. Begitu juga permintaan Jokowi periode kedua, tentunya dengan Pak Menteri Perdagangan kita juga ingin meninggalkan *legacy* yang tentunya ada sesuatu kisah *story* kita, baik di Komisi VI maupun oleh Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM.

Untuk itu, kami ingin betul-betul menginginkan ada satu kemitraan yang yang mana bukti artikulasi dan agregasi dari berbagai *stakeholder* yang beradab dengan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi pada kami. Dan tentunya kami percaya Pak Menteri beserta seluruh jajarannya, Pak Kepala BKPM beserta jajarannya, sangat mengerti betul situasi yang saat ini maupun bagaimana skenario-skenario pandemi beserta dampaknya ini kan bisa kita atasi. Maka, saya sangat berharap Indonesia yang kita lihat menjadi pasar strategis untuk tujuan bagi negara-negara produsen atau industri ini, sangat sangat ingin masuk ke Indonesia sebagai pasar dengan produk-produk yang unggul dan kompetitif, Pak Menteri.

Ini yang saya kira menjadi catatan penting kita dan menjadi catatan penting Pak Kepala BKPM juga dan kita ingin ini perang, ini siasat mensiasati. Siasat-siasat itulah kita ingin bagaimana Kementerian Perdagangan ini mampu mengantisipasi perdagangan global yang semakin kompetitif, Pak. Apalagi ini pandemi selesai barang akan saling melempar yang tertahan tahan ini. Ini yang saya pikir kita penting, jangan sampai Indonesia ini hanya menjadi negara tujuan pasar.

Nah, ada yang kita tidak kompetitif. Tapi, mari kita siasati. Kita sikapi supaya hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan impor barang ini menjadi suatu persoalan, Kalau perlu kita besar-besarkan Pak karena, kita ingin perdagangan internasional itu, kita ingin juga *leading*. Jadi Pak Menteri, waku itu periode, saya periode ke-empat periode ke-2, itu kita lahirkan di Komisi VI ini Undang-Undang Perdagangan.

Pak Menteri tahu berkaitan dengan satu kata, Pak. Itu lobinya sampai berbulan-bulan. Saya ingat betul, dalam hal menentukan untuk impor dan ekspor terkait barang penting, terkait dengan bahan pokok dan barang penting lainnya, Pemerintah dapat melakukan ekspor atau impor barang dengan memperhatikan harga tidak hanya di tingkat konsumen, tapi juga di produsen, satu kata, Pak Menteri. Dengan memperhatikan harga tidak hanya di tingkat konsumen, tapi di tingkat produsen. Kata ini tekanannya luar biasa, Pak.

Kenapa kita masukkan di Komisi VI waktu itu, bahwa dalam hal menentukan ekspor atau impor Pemerintah tidak hanya memperhatikan harga di tingkat konsumen, tapi juga di produsen dalam kaitan kita ingin memperkuat hal-hal yang menyangkut kemampuan industri kita, industri nasional kita. Waktu itu Undang-Undang Perdagangan dibuat berbarengan dengan 2 undang-undang, Pak Menteri. Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Pangan.

Nah, dalam Undang-Undang Perindustrian kita masih satu Komisi, waktu Undang-Undang Pangan ada di Komisi IV. Kelihatan sekali bahwa keinginan untuk mengatur terkait dalam kondisi kondisi global saat ini, kita ingin betul. Karena itu, kita membutuhkan bagaimana kondisi-kondisi yang terkait dengan upaya Pak Menteri untuk melakukan koordinasi di kementerian-kementerian hulu-nya, Pak Menteri.

Ini yang sementara ini sering terjadi satu satu ketidaksinkronan antara kementerian-kementerian hulu dan kementerian-kementerian hilir. Kita ingin ingin mendapatkan sesuatu progres setiap kita rapat, sebenarnya koordinasi dengan kementerian-kementerian hulu itu seperti apa.

Jadi, bentuk kerjasama Mendag dengan Mentan misalnya, ini koordinasinya seperti apa ya. Karena, sebelum-sebelumnya itu ada semacam ketimpangan antara kebijakan hulu sama hilir sehingga, nanti ada impor di masa panen. Kemudian, gula tadi ada di masa giling. Kemudian, garam juga demikian. Kemudian, impor berbagai komoditas. Kita impor sejauh itu menjadi suatu kalkulasi-kalkulasi untuk menjaga stabilitas pangan dalam konteks tidak menjaga inflasi kita, iya.

Tetapi, misalnya gula. Dulu kita sepakat bahwa swasembada gula itu tidak bisa lepas dari kaitan peningkatan kesejahteraan petani gula. Nah, *roadmap*-nya antara hulu sama hilir, tadi nggak sinkron. DNA konsumsi, DNA industri itu waktu itu importir produsen defisit gula konsumsi itu keuntungannya memang importir produsen untuk PTPN yang mana keuntungan itu sebagian untuk *on farm* dan sebagian besar sebagian untuk *off farm*-nya karena, tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada uang waktu itu.

Nah, Pak Bahlil saya pikir ini penting sekali untuk masalah gula ini. Misalnya, yang di Klaten tadi di singgung Pak Bahlil. Jelas kok itu dibutuhkan hampir kurang lebih 6.000 hektar untuk 5 TCD, untuk perbaikan di Gondang misalnya. 6.000 ini sudah disediakan oleh lahan menggunakan lahan bengkoknya para kepala desa. Kepala daerah sudah ada 16.000 lahan bengkok, kita hanya butuh 6.000.

Kemudian kemudian, investasinya jelas ditarik aja. *Roadmap* dari revitalisasi gula nasional kita ini yang mau kita jadikan gula konsumsi untuk meningkatkan produksi gula yang sudah SNI, standar SNI itu dibuka aja Pak. Karena, untuk *on farm*-nya, *on farm*-nya itu hampir kepala daerah menyiapkan kok Pak Bahlil. Memang, kepala daerah harus dimasukkan juga bagian daripada pemegang saham. Nanti kebijakan di hilirnya, tentunya perdagangan akan mengatur *timing-timing* strategi, Pak. Kalau sekarang memang seluruh defisit industri konsumsi dibawa ke rafinasi. Dulunya, *roadmap*-nya itu DNA konsumsi di industri.

Nah monggo, sekarang dibicarakan sehingga, kita tahu tidak terjadi berbagai hal-hal yang antara hulu dan hilir karena, hulunya di konsumsi, di pertanian. Hulunya di industri, industri itu di perindustrian. Hilirnya yang memutuskan ke perdagangan dan sudah disampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Pangan itu ada yang namanya Badan Pangan Nasional, Pak. Yang sampai hari ini undang-undang itu, Badan Pangan itu juga belum ada realisasi.

Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kompleksitas masalah di Komisi VI ini penting sekali karena peningkatan domestik bruto itu ada di investasi, ada di tingginya ekspor dan impor, kemudian, ada di konsumsi, kemudian, ada di penerimaan pajak, itu juga dalam kendali kita. Maka, produk domestik bruto itu akan kita capai seberapa, itu wilayah di mikro ekonomi itu sangat sangat berpengaruh. Kita sangat berharap misalnya, Pak Bahlil harus cepat, secepat mungkin upaya ekstra untuk melakukan, memastikan investasi di di kita itu supaya menarik seperti sektor-sektor apa saja dalam konsumsi atau struktur pasar dalam dan luar yang berubah ini, Pak Bahlil. Yang paling *urgent*, yang paling bisa di di cepat dilakukan seperti apa. Saya kira pangan dan kesehatan menjadi 1 skala *priority* untuk pasar yang 260 Juta ini, itu penting untuk membuat skenario-skenario di dalam proses kita berinvestasi.

Demikian yang bisa kami sampaikan kepada Pak Menteri Perdagangan. Kita sangat sangat berharap betul keinginan kita bagaimana Kementerian Perdagangan ini mampu membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut perdagangan dalam dan luar negeri serta ekspor dan impor untuk kepentingan perekonomian Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, terima kasih. Pak Martin, silakan.

F-P. NASDEM (MARTIN Y MANURUNG, S.E., M.A.):

Makasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan dan Pak Kepala BKPM.

Pertama saya ucapkan sekali lagi selamat, Pak atas amanah ini. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan dan ini terkait mungkin ada satu hal dengan keduanya. Yang pertama memang, tadi sesuai dengan paparan Bapak. Kita tertolong di neraca perdagangan akibat mungkin harga komoditi. Tapi, seingat saya dalam Raker-raker dengan Pak Mendag yang sebelumnya. Kita juga memang sudah berkali-kali mengingatkan soal neraca perdagangan ini dan kalau harapan kami sih ke depan, kita memang bisa merancang satu kebijakan secara khusus. Jadi, bukan hanya tertolong oleh faktor eksternal gitu, Pak. Nah, yang harus diantisipasi ke depan menurut saya terkait dengan pemulihan ekonomi nasional.

Seiring dengan memulihnya akibat pandemi Covid ini. Kita harusantisipasi juga kemungkinan melonjaknya impor apa namanya barang-barang modal, Pak seperti mesin dan lain sebagainya, ketika si *supply* mulai bergerak. Saya pikir ini, memang ini rapat masih rapat perkenalan, Pimpinan. Jadi, mungkin perlu ada rapat secara khusus yang kita bisa tajamkan lagi terkait dengan agenda ke depan dari Kementerian Perdagangan. Tentu kami akan sangat apa namanya berkepentingan juga untuk ya kerjasama antara kita Kementerian Perdagangan Komisi VI ini bisa membuahkan kebijakan-kebijakan yang lebih terstruktur gitu, Pak. Jadi, bukan hanya tertolong oleh faktor-faktor eksternal.

Nah yang kedua, saya juga ingin menanyakan. Mungkin, ini bisa dijawab secara tertulis tidak apa-apa. Bagaimanaantisipasi kita terkait dengan gugatan atau sengketa dagang dari Uni Eropa terkait dengan ekspor bijih nikel dan mineral. Nah, ini mungkin terkait juga sama Pak Kepala BKPM. Kita tahu bahwa gugatan ini sedang berlangsung. Bagaimana Kementerian Perdagangan sudah menjalankan apa langkah-langkah terkait hal ini dan juga Kepala BKPM mungkin bisa juga memberi perhatian untuk tetap meyakinkan investor, walaupun sengketa ini ada dan sedang berlangsung. Tapi, tetap bisa masuk karena, sebenarnya *resources* kita sangat cukup untuk kita bisa mengembangkan sebenarnya terkait dengan baterai dan lain sebagainya untuk negara kita, untuk menjadi salah satu yang unggulan.

Nah yang ketiga yang terakhir, Pak. Tadi, di paparan Bapak juga sudah mengatakan revitalisasi pasar. Nah, saya pikir ini juga perlu ada satu pembahasan, Pimpinan agar ini kan sudah banyak juga perubahan apalagi

terkait dengan pandemi dan lain sebagainya. Mungkin, perlu ada satu paparan yang secara khusus menerangkan apa yang sudah dilakukan terutama pada tahun anggaran yang lalu sehingga, kita juga bisa ter-*update* bahwa ini sudah ada pembangunan di sekian katakanlah kabupaten kalau di pasar ya basisnya kecamatan. Nah kemudian, apa rencana ke depan gitu. Jadi, supaya kita juga bisa *match*, Pak antara apa yang dijalankan oleh Komisi VI dan juga apa strategi atau dukungan yang apa yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan dan strategi dan dukungan yang bisa diberikan oleh Komisi VI.

Saya pikir itu, Pak Pimpinan.

Terima kasih tiga hal itu.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Sebelum diberikan tanggapan, saya mungkin ada beberapa poin termasuk ada titipan juga dari Pak Ketua sebelum beliau pergi. Memang sebenarnya, saya harapkan ada satu sesi yang kita ada undang juga Menteri Perindustrian. Karena sebetulnya, ini 3 ini saling kait-mengait. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Pak Bahlil hari ini akan menentukan apa yang harus dilakukan oleh Pak Lutfi kemudian dan begitu juga sebaliknya. Apa yang beliau lakukan sekarang akan menentukan apakah investasi yang dilakukan oleh orang-orang ini berhasil atau tidak dan seterusnya.

Ambil contoh misalnya, tadi ada yang menyebut soal sektor investasi. Saya sangat setuju itu, mungkin kita harus pilah-pilih mana sektor investasi yang mau kita gencarkan dan investasi di sektor tertentu oleh siapa. Mohon maaf, ini Pak Andre ini selalu teriak-teriak soal ributnya smelter nikel. Sebetulnya, Indonesia dapat apa dari investasi ini, gitu kan. Itu adalah kekayaan alam kita yang kemudian harganya dijual *at below market price* kepada investor asing yang mendapatkan segala macam fasilitas, mungkin termasuk *free tax* sehingga, apa yang kita dapat. Apalagi saya dengar *at one point* sempat ada 10.000 tenaga kerja asing yang di situ untuk membangun pabrik itu.

Nah, tentu kita harus pilah-pilih investasi yang menguntungkan rakyat Indonesia. Baik kita udah bolak-balik kepengen denger kalau bisa ada smelter Antam yang naik gituan atau Inalum yang naik, Mine Id lah sekarang namanya. Itu kita pernah memberikan PMN di periode lalu tuh, nggak jadi-jadi itu barang. Sedangkan, yang lain begitu cepat memberikan peningkatan.

Nah, itu salah satu contoh tentang sektor dan siapa pelaku investasi yang harus kita dukung. Harusnya yang kita *push* adalah investor-investor yang mau bikin hi-tech dari hasil sumber daya alam kita, tapi jangan sampai terus kita jadi penonton atau bahkan kekayaan alam ini mereka rebut. Mohon maaf nih, kalau saya lihatnya sebagian daripada smelter itu sebetulnya kekayaan alam kita yang bayar, kalau mereka beli *resources at half price*, gitu kan. Ini kan *market price* yang tidak normal.

Nah kemudian saya dengar juga, ini mohon maaf Pak Lutfi, saya juga baca-baca seperti Pak Darmadi apa yang Bapak sampaikan. Karena walaupun, Bapak sangat terkenal, saya ini belum pernah secara pribadi bertemu. Saya hanya melihat Bapak *jogging* di sekitar rumah saya ya kan, karena kita kebetulan tetangga. Dulu saya belum *jogging*, jadi cuman lihat aja.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO) :

Maksudnya, Pak Menteri kurang bersosialisasi?

KETUA RAPAT:

Bukan, bukan.

Nah, yang saya ingin sampaikan saya ada tertarik dengan penjelasan Bapak bahwa itu surplus perdagangan kita sebagian mungkin semu. Nah, semu ini kan tentunya kita sama-sama tahu bahwa ekonomi melemah. Tapi, ekspor kita melemahnya tuh nggak seberapa. Kalau nggak salah kita mencapai ekspor masih 167 triliun. Sedangkan, ketimbang tahun lalu turunnya nggak seberapa. Yang turun besar adalah impor, impornya turunnya mungkin sekitar 40, iya 17%. Nah cuman artinya, barang-barang ini yang mungkin sebagian diklaim adalah bahan baku impor tidak terlalu berdampak kepada ekspor, gitu kan. Artinya, sebagian besar daripada barang ini adalah untuk *men-service* kebutuhan konsumsi kita dalam negeri.

Ambil contoh kenapa tadi saya sampaikan kepada Pak Bahlil saya lihat beberapa PT-PT ini yang ada di dalam daftar investasi sangkutnya dan yang selalu diributin oleh temen-temen adalah mengenai gula. Misalnya, ada itu PT Sumber Mutiara Indah, gitu kan. Ada lagi saya dengar di Sulawesi bangun lagi. Ujung-ujungnya mereka kepengen impor, lebih daripada kepengen nanam gula, gitu kan. Ini kan, menanam tebu. Jadi kembali lagi tadi yang saya maksud, ini harus benar-benar pilah-pilih. Mana sih yang memanfaatkan, menguntungkan kita. Jangan kita dorong investasi yang kemudian menguntungkan ekspornya negara lain, ketimbang kepentingan kita gitu kan.

Nah ini juga kita perlu, apalagi kita pernah disampaikan pemaparan oleh Menteri Perindustrian bahwa beliau kepingin ada substitusi impor sebesar 35%. Nah, mudah-mudahan itu kan sesuatu yang bagus. Sebagian itu pasti menyangkut bahan baku industri. Seperti cerita jagung. Jagung kita, kenapa nggak bisa pakai jagung lokal. Oh satu mahal, kedua alfatoksin tinggi. Ya, ini kan harus kita bisa mulai bina. Ada *roadmap*-nya menuju situ. Kalau nggak ini akan tambah besar aja dan kita cuman ambil *value added* yang sedikit, ketimbang kita benar-benar meningkatkan produktivitas industri kita. Nah, mungkin hal itu yang sebetulnya kita harus buat sesi tersendiri, supaya ini bisa disinkronkan supaya benar ada *legacy* daripada Komisi VI yang bermanfaat buat masyarakat.

Dan mungkin ini khusus catatan dari Pak Ketua, ini sebelum beliau meninggalkan ruangan kepada Pak Bahlil. Memang, itu prestasi tercapai 817 triliun investasi dengan anggaran 500. Tapi kok, dengan anggaran sekarang

hampir 1 triliun, tahun depan targetnya cuma naik 50, malah nggak nyampe 40 triliun. Nah, jadi harusnya ini 1.600 nih Pak Bahlil, ya kan. Itu pesan dari Pak Ketua.

Baik, ini kan karena waktu kita sudah sangat habis. Saya mohon nanti secara detailnya semua disampaikan secara tertulis. Kalau Bapak Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM ada yang mau disampaikan jawaban secara umum dulu, bisa sekaligus *closing statement* bahkan abis itu kita langsung ke kesimpulan karena, kita masih ada satu sesi lagi dengan Pak Lutfi. Ya, nanti kita bicarakan abis ini.

Oke, mau Pak Kepala BKPM dulu.

KEPALA BKPM:

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Dewan yang kami hormati.

Yang pertama, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sekali yang kesemuanya adalah memberikan penegasan bahwa kita harus meninggalkan sebuah *legacy* yang baik. Sebelum saya memberikan *closing statement*, satu hal yang saya sampaikan bahwa sudah saatnya pengusaha tidak boleh mengatur negara. Negara yang harus mengatur pengusaha. Namun di balik itu, Pemerintah juga tidak boleh semena-mena terhadap pengusaha. Artinya, kehadiran Pemerintah itu harus menjadi penyeimbang bagaimanapun kita butuh pengusaha.

Atas dasar itu, beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semua, saya akan jawab secara tertulis dan apa yang disampaikan tadi dalam konteks investasi, saya hanya menggaris bawahi BKPM mencatat realisasi investasi itu bukan atas dasar *survey*, tapi atas dasar *real*, berdasarkan LKPM itu dan itu yang dicatat itu bukan baru komitmen, tapi yang sudah terealisasi. Uangnya sudah ke luar, mesinnya sudah diadakan, itu yang ditulis. Tetapi kalau yang berkomitmen, yang belum terealisasi, itu belum dimasukkan dalam LKPM. Nanti, kami juga akan menyampaikan format LKPM, Ibu Sestama. Nanti kita sampaikan bagaimana metodologi yang mereka laporkan ke BKPM.

Yang terakhir untuk Pak Lewerissa, Pak kebetulan saya mau ke Maluku, besok dengan Menteri Kelautan sama Menteri Perhubungan. Kita membangun investasi kawasan industri perikanan yang sudah dicanangkan sejak zamannya Pak SBY untuk Maluku sebagai lumbung ikan. Jadi, kami diperintahkan oleh Bapak Presiden. Besok malam saya berangkat, saya izin Pimpinan di dalam forum yang terhormat ini, dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan keterlibatan langsung dari dewan. Kami mengundang Bapak untuk bersama-sama saya, supaya kita *clear* kan di sana, Pak supaya jangan hanya jadi tema-tema besar terus dan In Syaa Allah, Pak anggaran investasinya sudah ada. Jadi, kita ke sana rapat dan saya harap Bapak bisa ikut bersama-sama. Ibu Sestama tolong komunikasikan secara baik.

Saya pikir hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Gimana, Pak? Memang, investasi ini terkait dengan komunikasi. Investasi sehebat apapun tanpa komunikasi yang baik, itu sulit untuk dilakukan.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO) :

Loh Bapak Hendrik bukan kunspek besok?

KEPALA BKPM:

Yang kedua.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Lebih besar di kunspek ini. Kenapa hanya, Pak Bahlil Pak Bahlil.

KEPALA BKPM:

Yang terakhir, Pimpinan. Saya terakhir, Pimpinan untuk..

F-PDIP (DARMADI DURIANTO) :

Pak Bahlil, kenapa hanya Pak Hendrik yang direspon?

KEPALA BKPM:

Karena, terkait dengan tinggal dua hari, dua hari aja. Jadi, waktunya cuma dua hari ini cuma Pak Hendrik. Nah, nanti untuk Bapak Ibu semua, seperti apa yang kita sampaikan bahwa penting kita sosialisasi undang-undang baru, OSS, insentif fiscal. Maka, itu di program BKPM kita membutuhkan Bapak Ibu semua, kita mulai *start* bulan 3 ya. Bulan tiga tahun ini, semua Anggota DPR kita turun ke masing-masing dapil, kita sampaikan kepada rakyat, bangsa dan negara bahwa investasi penting dengan regulasi yang baru.

Saya pikir itu, Pimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf.

Wabilahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syalom.

Om Santi Santi Om.

Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam.

Baik, Pak Lutfi silakan.

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Terima kasih, Pimpinan.

Sebenarnya, udah mau gregetan sama angka-angkanya nih. Tetapi, karena waktu, izinkan saya untuk memberikan sedikit yang diutarakan oleh Pak Darmadi dan sedikit masalah daripada harga.

Jadi, terutama dalam komoditas dan saya setuju bahwa Kementerian Perdagangan ini mustinya bisa sebagai pensejahterah untuk bisa menciptakan nilai tambahnya untuk kita bisa mengerjakan bersama-sama. Tetapi kalau Pimpinan, saya ingin memulai bahwa saya berjanji bahwa saya akan bekerja sama dengan seluruh kementerian lain.

Jadi, kalau saya sama Menteri Pertanian, ini akan menjadi tupoksi pertama. Kalau saya sampai tidak cocok sama beliau, kita udah punya janji. Saya pokoknya nggak ada beliau sekali satu minggu atau sekali dua minggu, 2 minggu sekali. Saya akan pergi ke kantornya untuk memastikan bahwa apa yang saya kerjakan itu sesuai, setara atau paling tidak sepengetahuan beliau apa yang kita kerjakan.

Nah, saya ingin menjawab kenapa saya selalu menganalogikan Menteri Perdagangan ini sama seperti wasit, wasit tinju. Wasit tinju itu ada ada *smart spell*-nya. Artinya begini, penjual sama pedagang itu mereka berinteraksi. Ketika saya, ketika wasit menjalankan seluruh apa namanya kekuasaannya untuk mengatur pertandingan, pertandingan itu tidak seru karena, penjual sama pedagang itu aturan *boxing*-nya tidak jalan. Tetapi, kalau saya diamkan ketika wasit tinju mendiamkan mereka bertarung tanpa aturan yang jelas, akan berlangsung sebagai liar dan itu juga mesti kita jaga.

Nah Bapak dan Ibu, saya setuju tadi pembawaan, perumpamaan Kepala BKPM itu. Saya tidak mau diatur oleh pengusaha, tapi saya berjanji akan mem-*protect* pengusaha karena, *fight* ini masih jalan, penjual dengan pembeli dan yang menonton ini 270 juta rakyat Indonesia. Ketika saya salah, ini ditonton sama semua orang mengatakan bahwa, oh wasitnya bodoh atau ketika saya curang gitu kan, 270 juta rakyat Indonesia mengatakan bahwa wasitnya curang, bermain. Saya berjanji Pak Darmadi.

Kalau ditanya sekarang, basis daripada strategi saya adalah apa yang diutarakan Pak Jokowi ketika beliau disumpah di MPR pada tanggal 20 Oktober tahun 2019, yaitu beliau mengatakan bahwa beliau mau melihat Indonesia ini akan menjadi negara kelima terbesar di dunia. Artinya, pendapatan per kapita tahun 2004, 2045 itu sekitar 23.000 dollar per kapita dengan *trajectory* pertumbuhan 5,7% hari ini agregat ke depan.

Dengan begitu, kita bisa pecahkan daripada rumus GDP tadi yang diutarakan. Artinya, kita ini yang sekarang konsumsi menguasai perekonomian Indonesia dengan 57%, artinya Pak Kepala, Pak Ketua, kalau kita sekarang kita tahan ini apa namanya impornya, karena impor yang

berkualitas itu penting untuk pertumbuhan konsumsi kita, GDP kita akan turun. Jadi, impor berkualitas sangat penting Ibu Nevi. Nah, itu sekarang PMTB hari ini 31% turun dari 33% 2 tahun yang lalu, *government expenditure* mustinya tidak lebih dari 4%, hari ini hampir 10% dan ekspor impor kita tahun lalu minus. Makanya, komposisi begitu. Bagaimana komposisi yang sehat? Komposisi yang sehat itu ekspor-impor ini musti di atas 50%. Siapa yang sehat seperti begitu, Vietnam hari ini yang di belakang kita sebenarnya merdekanya sudah melampaui itu. Nah, kita musti mentransformasi dari yang sekarang konsumsi menjadi ekspor impor yang di situ termasuk industrialisasi dan investasi.

Kalau kita lihat Pak Darmadi, ini semua situs *sequeance*. Jadi, orang datang buka pasar dulu menjadi tujuan investasi dan tujuan investasi masuk industrialisasi dan penguatan untuk ekspor. Contohnya, Vietnam tertutup saya minta tolong jangan di *quotes* ya karena nggak pengen gede-gedein Vietnam.

KETUA RAPAT:

Tapi, ini rapat terbuka Pak Menteri.

MENTERI PERDAGANGAN RI:

Iya, saya minta tolong bahwa ini nggak usah di gede-gedein ceritanya. *It's okay off the record*, karena kenapa? Kita lihat sekarang, mereka masuk TPP, investasi di sektor elektronika 11 miliar dolar. Apa yang kejadian 4 tahun kemudian, ekspor elektronika mereka *export* mereka 105% dari GDP. Begitu 105% dari GDP, dikurangi impornya separuh itu sama tingkatannya dengan GDP mereka 54% adalah rasi daripada ekspor dan impor. Jadi artinya apa, buka pasar masuk TPP, datang investasi di elektronika, mereka menjadi basis industri industrialisasi dan mereka mengekspor. Cocok nggak dengan Indonesia? Sama. Indonesia juga begitu.

Ketika saya menjadi Kepala BKPM dengan Mas Ario Bimo, saya sudah katakan bagaimana menghitungnya, setiap 1.000 orang di Amerika Serikat mempunyai 1.001 mobil. Di Jepang setiap 1.000 orang ada 583 mobil. Di Indonesia, di Thailand waktu itu yang dekat dengan kita setiap 1.000 orang ada 179 mobil. Tahun 2007 di Indonesia setiap 1.000 orang hanya 47 mobil. Saya jamin pasti 1 hari Jakarta macetnya 4 kali lipat sama dengan Thailand.

Apa yang kejadian Pak Darmadi? Waktu saya menjadi Dubes di Jepang semua mobil datang. Toyota *double* kapasitas, Daihatsu dan *double* lebih besar apa produksinya di Indonesia daripada di di Jepang. Yang namanya Suzuki *double* kapasitas, Mitsubishi motor *double* kapasitas dan ada apa namanya Nissan *double* kapasitas. Apa yang kejadian, 5 tahun kemudian tiba-tiba *export* mobil dan sparepart kita nomor 8. Hari ini adalah nomor 6 ekspor nonmigas kita dari mobil dan *sparepart*. Artinya apa, semua sama. Buka pasar datang investasi, basis produksi industrialisasi dan penguatan ekspor.

Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu 10 tahun yang lalu, ketika menjadi Kepala BKPM tidak pernah terpikir dalam mimpi saya yang paling gila bahwa Indonesia akan menjadi produsen dan eksportir barang industri berteknologi tinggi seperti mobil. Dan Bapak dan Ibu saya jamin bahwa yang dikerjakan Kepala BKPM untuk UV Car pasti akan sukses. Kenapa, basisnya sudah ada dari mobil tersebut.

Jadi, ini pasar besar ini. Musti kita jaga dan kita jaga bisa kejadian. Contoh, itu yang namanya TKDN, saya saya tidak setuju pada tahun 2014 itu. Apa yang kejadian dengan TKDN. Jadi, Bapak dan Ibu tahun 2014 kita ini impor *handphone* namanya Samsung dari Vietnam, 2 miliar dolar. Diatur itu sama dirjen namanya Budi Darmadi. Dia *tweet* pakai TKDN. Saya nggak setuju sebenarnya. Karena, kenapa kita mesti tutup tutup impor. Apa yang kejadian, itu Samsung dan LG terpaksa tutup pabrik mereka di di Vietnam pindah ke Indonesia.

Hari ini surplus kita dari dengan Vietnam, 1,5 miliar dollar, dari mana. Karena, itu impornya impor *stop* dari Vietnam pindah menjadi industri di Indonesia dan kita sekarang menjual mobil ke Vietnam. Sekarang surplus satu setengah miliar. Jadi artinya apa, kita mesti jaga. Contoh, kemarin ditutup yang namanya AC, gitu kan impor AC selama Covid ini. Itu tiga-tiganya sudah datang, dua datang ke tempatnya Pak Kepala BKPM, satu ke tempat saya. Tiga Daikin, LG sama Samsung akan buka pabrik di sini. Jadi, impor ini penting. Tapi, musti berkualitas dan kita musti jaga sama-sama.

Nah, yang menjadi permasalahan kita hari ini adalah industri pangan kita Pak Kepala, Pak Ketua, Bapak Pimpinan. Kenapa, ini yang menjadi permasalahan. Selama industri pangan kita diatur sama dengan industri rumah tangga, maksudnya begini sama kayak industri beras kita. Itu kan industri kayak industri rumah tangga, kecil-kecilan. Beras besarnya cuma 250 meter, 400 meter Jawa, tidak akan *profitable*. Kita mengadakan industri pangan itu dengan *food estate* tadi itu.

Jadi Bapak Pimpinan, kalau saya ditanya masalah gula. Ini akan menjadi seru. Jadi saya nih, begitu kemarin jadi Menteri Perdagangan yang pertama kali saya kasih keluar izin gula semua. Kenapa, saya takut kalau ditahan-tahan datangnya gula itu nanti impornya itu persis dengan masa giling bulan 5, bulan 6, bulan 7.

Saya pastikan untuk tidak sama-sama. Keluarin dulu semuanya. Tapi, ini menjadi permasalahan nanti. Kenapa? Saya itu dulu waktu zaman 2014 ada dua Mas Ario Bimo. Satu, dari dewan gula, harga berapa petani musti dapatnya. Yang kedua dan ini selalu tinggi, yang kedua saya dapat surat dari Menteri Pertanian. Rendemen gula berapa. Rendemennya itu 7,5 *average*. Kalau rendemennya 7,5, artinya harga gula per kilo dari petani itu dengan harga 6.500 sudah untung. Jadi, kalau saya kasih harganya itu BPP 8.500, semuanya mestinya *happy*. Hari ini harga gula kita 10.500.

Bapak dan Ibu saya minta maaf, *off the record* ya. Harga impor sekarang, kalau ini dimasukkan beli dari Thailand masukin ke Malaysia, diselundupkan ke Jakarta bayar kanan kiri itu harganya 8.000. Siapa yang jadi korban? 270 juta rakyat Indonesia. Saya sebagai wasit tidak ikhlas. Saya tolak. Kalau yang namanya petani itu dan ini petani saya petani sama saya di

hubungannya dekat sekali. APPRI, Pak Sumitro itu hubungannya bisa telfon langsung *my heart goes with them*. Tapi, untuk membayar lebih mahal daripada orang lain, tidak masuk akal.

Jadi, Bapak Pimpinan kalau kita mau duduk sama-sama, saya mau duduk. Kita atur, karena tidak bisa membela petani, tapi kita mengorbankan 270 juta rakyat Indonesia. Yang petani gula itu hanya 2 juta orang, hanya 2 juta total menghasilkan gula petani itu cuman 1 juta ton, 1 juta ton. Karena, PTP-nya itu minta maaf dengan segala ketidakefisien, efisiensi, efisiensinya, itu diaduk, itu gula petaninya 600.000, gula gula PTP nya 400.000. Ini kita masih tanggung 5 juta konsumsi kita, rafinasi industri atau gula PTP atau gula industri itu, itu jumlahnya 5 juta dan yang menanggung itu 270 juta rakyat Indonesia. Sekarang, kita bicara atas nama rakyat. Siapa yang mau proteksi. Kalau kita menaikkan harga gula untuk petani yang katanya itu. Kita tidak menyelamatkan gula petani, yang kita tolong itu adalah pemain gula yang sebenarnya sudah lebih dari cukup apa namanya keuntungan mereka.

Jadi, kita masih satu perbaiki gula ini nggak bisa dibelah dua. Gula ini mesti dimasukin jadi satu, mesti jadi satu dan ini kita masih bicara industrialisasi dan yang pertama untuk masalah industrialisasi musti keluar dari Jawa. Ini studinya sudah ada dari zaman Soeharto, tapi tidak pernah di implementasi. Ini posisinya sekarang.

Jadi Bapak dan Ibu, dengan segala hormat. Saya akan berusaha setransparan mungkin dan seadil mungkin. Jadi, kalau Bapak dan Ibu tanya, saya akan jawab apa adanya dan ini adalah bagian yang kita mau kerjakan.

Jadi Bapak dan Ibu sekali lagi, ini perkenalan kita. Tetapi, saya akan kerjakan baik-baik dan ini yang paling penting adalah masalah pasar rakyat ini. Kalau boleh Bapak dan Ibu ke depan, kita musti punya ekstensifikasi daripada *cool storage*, pasar penting. Tapi, *cool storage* dan apa namanya atmosfer sistem *charge* itu menjadi sangat penting untuk membela petani. Karena, begitu harga naik, begitu paceklik harganya naik, salah Menteri Perdagangan, begitu panen harganya turun salah Menteri Perdagangan, risiko saya nggak ada menangnya ini. Tapi, kita masih berpindah kepada kepentingan yang lebih penting, pasar penting. Tapi menurut hemat saya, Bapak Pimpinan, *cool storage* juga masih lebih penting, karena itu bisa apa namanya memberikan nilai *bargaining* lebih kepada petani-petani kita.

Saya cukupkan segitu, Pak Bapak Pimpinan. Mudah-mudahan perkenalan kita ini bisa kita cukup. Lebih kurangnya saya mohon maaf.

Wabiilahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Demmer, silakan.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Ini sangat menarik sebenarnya apa apa yang disampaikan tadi, baik oleh Pak Menteri Perdagangan maupun BKPM dan saya meyakini beliau bekerja dengan baik karena, masih punya masa depan yang panjang, 2024-2029 masih panjang, siapa tahu. Kan siapa tahu, kan gitu. Ini sekarang ini menduduki kunci-kunci penting saya lihat.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Tapi, nggak nggak nggak kudeta kan.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Menduduki kunci-kunci penting. Karena, saya meyakini..

F-PDIP (DARMADI DURIANTO) :

Siapa tahu Bahlil Presiden ya.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Dan saya yakini melihat dari tadi Pak Menteri Pedagangan juga sudah empormennya juga bagus dengan Menteri, Wakil Menteri itu juga menyenangkan di pihak kita gitu.

BKPM juga saya lihat kalau memang hanya naik 40 rasanya sih itu untuk mencapai prestasi, Pak Pimpinan. Karena, kalau nanti naik juga pasti lebih dari 40, itu persoalan. Jadi, sengaja dia rendahkan karena kita tahu bahwa kita ini negara kita ini tidak kalah oleh negara manapun sebenarnya soal *resources*. Kita lihat dari sumber daya alam laut punya, dalam tanah punya, di atas tanah punya, udara punya, matahari sepanjang tahun. Hanya di persoalan *omnibus law* ini kita akan bisa selesaikan.

Kalau itu negara lain semua kalah. Apa yang disampaikan Pak Menteri tadi tentang negara nomor 5 itu, saya meyakini sangat pasti terjadi ketika *omnibus law* ini benar-benar bisa kita terapkan. Hanya itu aja persoalannya. Kita kan tahu, nggak pernah tahu berapa meja, nggak pernah tahu berapa instansi, nggak pernah tahu berapa biaya sampai kapan izin, tapi itu kan terselesaikan dengan omnibus law, Pak Airlangga yang bikin kemarin itu, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh gitu ya.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Itu, Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nanti dibahas di Belanda.

Baik, tolong *draft* kesimpulan.

F-PDIP (DARMADI DURIANTO):

Ciptaker itu kalau nggak di-*support* PDI Perjuangan nggak mungkin berhasil.

KETUA RAPAT:

PIC-nya malah dari Partai Gerindra.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE) :

Ketua Badan Legislasi itu Gerindra loh, jangan lupa.

F-P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., L.L.M.):

Itu kerja kolektif, Pak Darmadi.

KETUA RAPAT:

Oke, ini kita bacakan *draft* kesimpulan ya.

Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang pembahasan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, tahun negara 2020 dan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2021, Rabu, 3 Februari 2021 :

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.244.519.263.966,- (*Tiga Triliun Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar 93,31% dari Pagu Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp3.477.064.284.000,- (*Tiga Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Ini dapat disetujui ya, angkanya sudah benar semua? Baik.

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan : S-30/MK.02/2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan penghematan/realokasi anggaran sebesar Rp91.577.906.000,- (*Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah*) dari Pagu Anggaran sebesar Rp3.028.964.712.000,- (*Tiga Triliun Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) sehingga Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp2.937.386.806.000,- (*Dua Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah*).

Sudah benar angka-angkanya, Pak Menteri? Dapat disetujui ya.

(RAPAT:SETUJU)

3. Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 512.081.055.659,- (*Lima Ratus Dua Belas Miliar Delapan Puluh Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 97,65% dari Pagu Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp 524.406.706.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah*)

Benar ya, ini nomor 3. Sudah benar angkanya Pak Kepala? Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

4. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Pagu Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Menteri Keuangan: S-30/MK.02/2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan penghematan/realokasi anggaran sebesar Rp158.574.714.000,- (*Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) dari Pagu Anggaran sebesar Rp1.089.500.127.000,- (*Satu Triliun Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) sehingga Pagu Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2021 menjadi sebesar Rp930.925.413.000,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).

Setuju ya, Pak?

(RAPAT:SETUJU)

5. Komisi VI DPR RI mengapresiasi capaian kinerja Kementerian Perdagangan RI dan Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) RI Tahun 2020 dan mendorong agar meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2021 mengingat di masa pandemi Covid 19, kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih rentan.

Kenapa? Pak Toha. Nggak ada ya. Baik. Oke, secara prinsip ini intinya kita mendorong agar meningkatkan indikator atau capaian inilah. Saya rasa bisa disetujui ya. Oke, setuju.

(RAPAT:SETUJU)

6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

Setuju ya? Oke, baik.

(RAPAT:SETUJU)

Betul, Bu. Yang jelas ini udah mau jam 6, jadi kita selesaikan dulu yang ini.

Kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI, saya ucapkan terima kasih dan tentunya kepada mitra kita yang telah hadir pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kesabarannya mengikuti Rapat Kerja kita pada hari ini dan karena sudah disampaikan *closing statement*.

Demikian rapat kami tutup.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.35 WIB)

Jakarta, 3 Februari 2021

a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP.197104071992032001